LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

SEKRETARIAT UTAMA

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas capaian kinerja tahunan yang dicapai.

Tahun 2020 ini adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2020 – 2024. Laporan Kinerja tahun 2020 menyajikan capaian target kinerja, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Diharapkan Laporan Kinerja yang disajikan ini dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis Sekretariat Utama dapat tercapai secara optimal di akhir periode Renstra.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja BPOM di masa yang akan datang.

Jakarta, 25 Februari 2021

Sekretaris Utama,

Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR LAMPIRAN vi
RINGKASAN EKSEKUTIF vii
MILESTONE SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020 ix
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
BAB IV PENUTUP 134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama 4
Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II 5
Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan 5
Gambar 4. Jumlah pejabat fungsional per unit kerja 6
Gambar 5. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama 11
Gambar 6. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama 12
Gambar 7. Kerangka Logis Evaluasi RB 25
Gambar 8. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi Tahun 2020 46
Gambar 9. Grafik Tingkat Efektivitas Obat dan Makanan Berdasarkan Media KIE sampai dengan Periode Triwulan IV tahun 2020 90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 13
Tabel 2. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2020 17
Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran 18
Tabel 4. Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2020 20
Tabel 5. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2020 22
Tabel 6. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama Tahun 2020 118
Tabel 7. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2020 128
Tabel 8. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2020 132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 140
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama (Renja) Tahun Anggaran 2020 .. 142
Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama (Renstra) Tahun Anggaran 2020143
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama (Renja) Tahun Anggaran 2020..... 145
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama (Renstra) Tahun Anggaran 2020..... 147
Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Triwulanan Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2020 154
Lampiran 7. Pengukuran Kinerja Kegiatan Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2020..... 156
Lampiran 8. Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2020 166
Lampiran 9. Mapping Anggaran Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2020 168
Lampiran 10. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output 174
Lampiran 11. Capaian Kinerja BKKBN Tahun Anggaran 2019Pengukuran Efisiensi Kegiatan Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2020..... 180

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang

Sekretariat Utama telah menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program dengan Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSP) sebagai berikut: 1) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama tercapai dengan kategori Baik (99,09%); 2) Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama tercapai dengan kategori Baik (107,99%); 3) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan tercapai dengan kategori Baik (100%); 4) Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM tercapai dengan kategori Sangat Baik (112,26%); 5) Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran tercapai dengan kategori Baik (100%); 6) Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum tercapai dengan kategori Baik (108,80%); 7) Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif tercapai dengan kategori Sangat Baik (111,79%); 8) Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama tercapai dengan kategori Baik (104,39%); 9) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal tercapai dengan kategori Baik (93,19%); 10) Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal tercapai dengan kategori Baik (99,19%); 11) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama tercapai dengan kategori Sangat Kurang (13,25%), dan 12) Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel tercapai dengan kategori Baik (99,18%).

Sampai dengan tahun 2020, dari 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Sekretariat Utama, terdapat **1 (satu) indikator dengan kategori sangat kurang (<50) yaitu** Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik (13,25%)**; 2 (dua) indikator dengan kategori cukup (70-<90)** yaitu 1) Indeks RB Sekretariat Utama (84,18%) dan 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama (75); **18 (delapan belas) indikator dengan kategori baik** (90-<110) yaitu 1) Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama (98,41%), 2) Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama (95,4%), 3) Opini BPK atas laporan keuangan BPOM (100%), 4) Nilai Kinerja Anggaran BPOM (102,54%), 5) Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen (107,3%), 6) Indeks Kepuasan Media (101,4%), 7) Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen (102,65%), 8) Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan

kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (100%), 9) Nilai Pengelolaan BMN (98,75%), 10) Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (100%), 11) Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (100%), 12) Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (100%), 13) Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (100,25%), 14) Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (100,48%), 15) Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama (102,27%), 16) Nilai AKIP Sekretariat Utama (99,62%), 17) Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama (99,19%), dan 18) Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama (98,35%); **5 (lima) indikator dengan kategori sangat baik** (110-120) yaitu 1) Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal (119,10%), 2) Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal (118,93%), 3) Persentase Advokasi Hukum yang efektif (117,60%), 4) Persentase kerja sama yang efektif (111,79%) dan 5) Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama (114,58%); dan **1 (satu) indikator dengan kategori tidak dapat disimpulkan** yaitu Indeks Opini Publik BPOM (120,61%).

Pada tahun 2020, pagu anggaran Sekretariat Utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020 yang semula adalah **Rp391.009.078.000,00** dan mengalami revisi APBN-P menjadi **Rp328.548.378.000,00.** Dari total anggaran tersebut, direalisasikan sebesar **Rp284.410.751.968,00** atau 86,57% dari total pagu. Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Program "Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama" yaitu sebesar 75,28%, hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang mejalankan fungsi dukungan manajemen, didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan Gedung, layanan internal (overhead), dan pemeliharaan).

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Melakukan pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit, pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC dan verifikasi/pemutakhiran BOC.
2. Mengawal masa kontrak dan percepatan pencairan belanja modal.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.
4. Melakukan monitoring IKPA terhadap indikator pagu minus, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, dan kesalahan SPM.
5. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB dan SAKIP di Lingkup Settama secara berakala.

MILESTONE SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020

1. Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan atas kinerja anggaran K/L (NKA) berupa insentif kepada 3 K/L tertinggi dengan kategori pagu besar, sedang dan kecil. BPOM masuk peringkat ke 3 untuk K/L kategori pagu kecil dengan NKA 96,62 (sangat baik) dan mendapatkan insentif tambahan anggaran sebesar Rp30M.

2. Badan POM kembali berpartisipasi dalam ajang kompetisi *The Best Contact Center Indonesia (TBCCI)* 2020 yang diselenggarakan oleh Indonesia *Contact Center Association (ICCA)*. TBCCI 2020 diikuti oleh 52 instansi, baik lembaga pemerintah, badan publik, dan perusahaan swasta di Indonesia. Tahun ini menjadi tahun ke-2 Badan POM mengikuti ajang bergengsi ini.

3. Badan POM raih Anugerah Badan Publik "Informatif" berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 dengan berada di peringkat ke-5 kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 94,09. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2020 diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat yang digelar secara daring pada Rabu 25 November 2020

4. BPOM menerima Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit dengan kategori "Sangat Baik" (kategori IV) dengan nilai 364 (tiga ratus enam puluh empat) dan indeks 0.88 (nol koma delapan puluh delapan) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN di lingkungan Badan POM dalam melakukan perencanaan kebutuhan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi serta pengelolaan sistem informasi yang telah terintegrasi terkait pengelolaan ASN.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan BPOM;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan Masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung oleh 5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:

Biro Perencanaan dan Keuangan

TUGAS

Melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

FUNGSI

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan
2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara
3. Penyiapan koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja
4. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Biro Kerja Sama

TUGAS

Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang Pengawasan Obat dan Makanan

FUNGSI

1. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan obat dan makanan
2. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan obat dan makanan, dan
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Biro Hukum dan Organisasi

TUGAS

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

FUNGSI

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian
2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumentasi, analisis, dan evaluasi hukum
3. Pelaksanaan advokasi hukum
4. Penataan organisasi dan tata laksana
5. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

TUGAS

Melaksanakan koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara, kerumahtanggaan, perencanaan dan pengelolaan karir dan kinerja sumber daya manusia, dan urusan persuratan dan kearsipan

FUNGSI

1. Pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa
2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan
3. Perencanaan dan pengelolaan karir dan sumber daya manusia
4. Pengelolaan kinerja sumber daya manusia
5. Pengelolaan persuratan dan kearsipan

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan

TUGAS

Melaksanakan pengelolaan hubungan Masyarakat, komunikasi, publikasi, pengaduan Masyarakat, koordinasi dan pemberian dukungan strategis kepada pimpinan, keprotokolan, dan urusan kesekretariatan pimpinan

FUNGSI

1. Pengelolaan hubungan Masyarakat, komunikasi, dan publikasi
2. Pengelolaan pengaduan Masyarakat
3. Pengelolaan informasi dan dokumentasi di bidang pengawasan obat dan makanan
4. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan strategis kepada pimpinan, dan
5. Pelaksanaan urusan protokol dan kesekretariatan pimpinan

Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga mengkoordinir secara administratif untuk unit yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, antara lain:

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai/Loka POM)

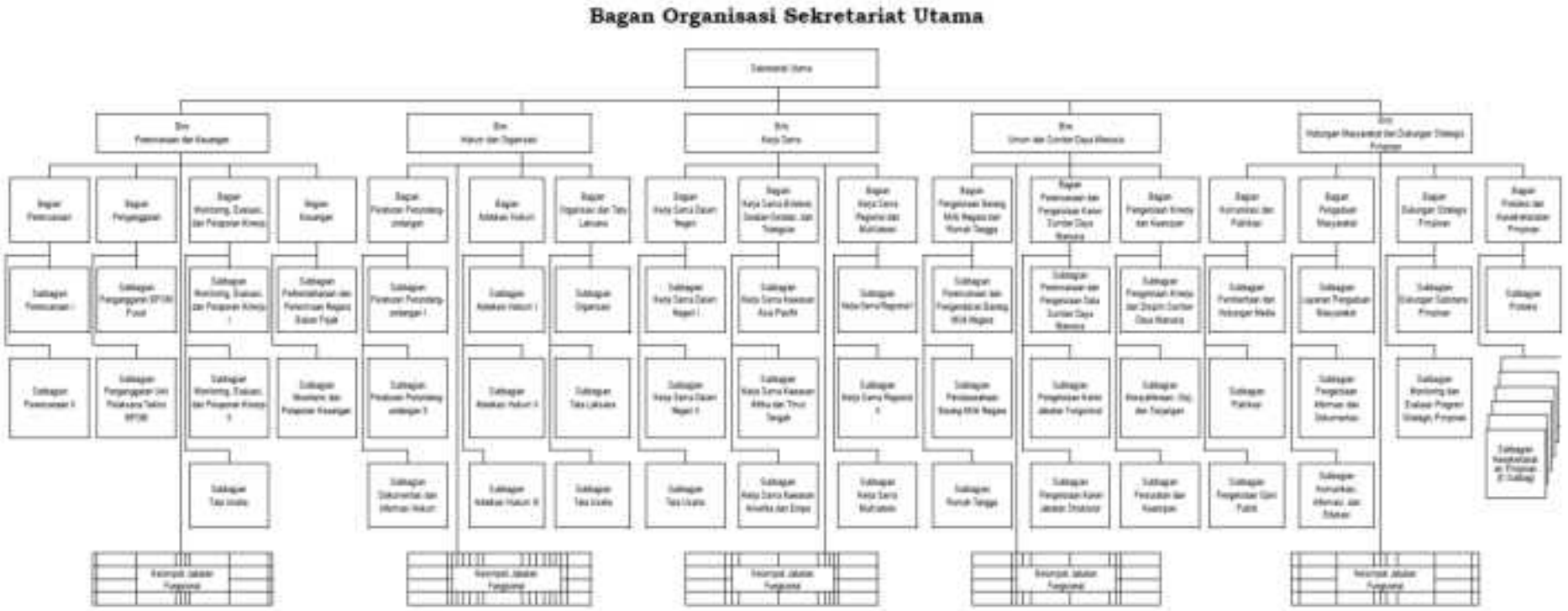

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah SDM aktif di Sekretariat Utama per tanggal 29 Desember 2020 adalah sebanyak 279 orang dari total kebutuhan pegawai sebanyak 459 orang. Profil pegawai di lingkungan Sekretariat Utama sebagai berikut:

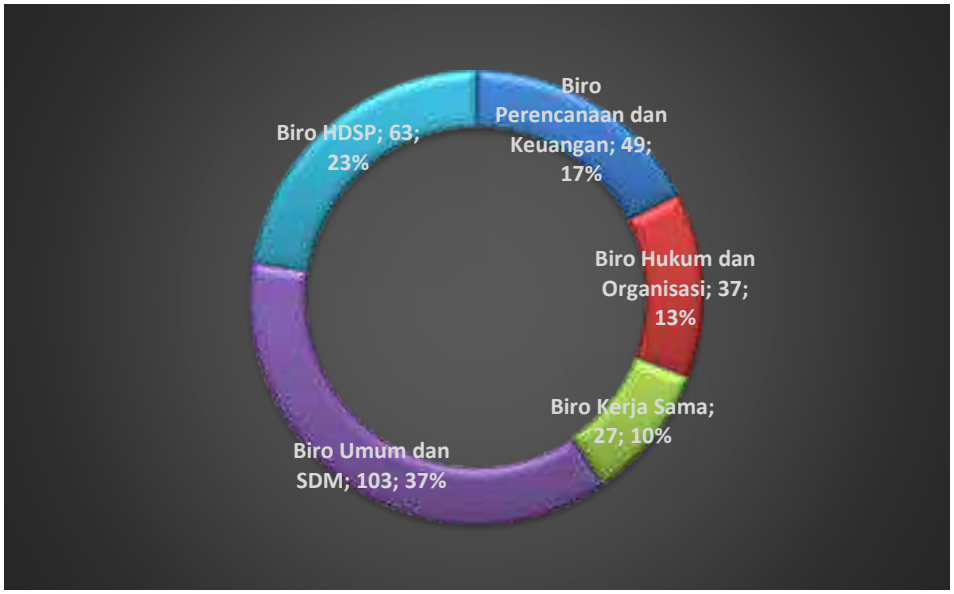

Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II

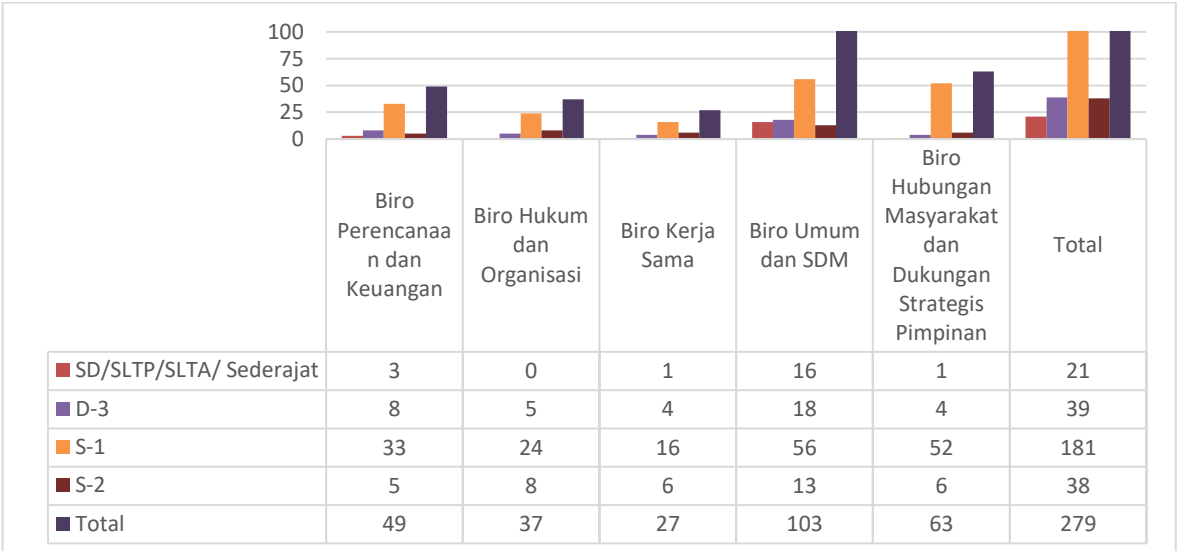

	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Hukum dan Organisasi	Biro Kerja Sama	Biro Umum dan SDM	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan	Total
SD/SLTP/SLTA/ Sederajat	3	0	1	16	1	21
D-3	8	5	4	18	4	39
S-1	33	24	16	56	52	181
S-2	5	8	6	13	6	38
Total	49	37	27	103	63	279

Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penyetaraan Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan POM sesuai rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berjumlah 502 (lima ratus dua) jabatan dengan komposisi Penyetaraan Jabatan Administrator (156 orang), Penyetaraan Jabatan Pengawas(223 orang), Mekanisme Inpassing (2 orang), Mekasnisme Pengangkatan kembali (121 orang).

Sedangkan jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada setiap unit kerja di lingkungan kesekretariatan Utama sampai dengan Desember 2020 sebagai berikut:

Gambar 4. Jumlah pejabat fungsional per unit kerja

Berikut jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Utama berdasarkan Analisis beban kerja (ABK) :

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Existing	Jumlah Kebutuhan (ABK)
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	49	86
2	Biro Hukum dan Organisasi	37	88
3	Biro Kerja Sama	27	80
4	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	63	
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan	103	205
TOTAL		275	279

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Sekretariat Utama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Sekretariat Utama yang berkaitan dengan kelembagaan. Seringkali peraturan perundang-undangan mengalami perubahan yang akan mempengaruhi tugas-tugas Sekretariat Utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum. Peraturan perundang-undangan tersebut mendorong BPOM untuk segera menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang organisasi, keuangan, manajemen kinerja, dan lain-lain. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yang saat ini mengalami perubahan dan harus segera dapat menyesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, tata kelola Barang Milik Negara (BMN), dan penyelenggaraan pelayanan umum di BPOM.
2. Peraturan yang berkaitan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan.
3. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPOM.
4. Peraturan yang mengatur kerja sama bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Peraturan yang berkaitan dengan kehumasan, pengaduan masyarakat, dan keterbukaan informasi publik.

Perubahan Peraturan tersebut harus segera disikapi dengan cepat karena akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM.

2. Jejaring Kerjasama

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, pramuka, *e-commerce*, dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga meliputi peningkatan daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat menghasilkan produk nasional yang kompetitif.

3. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM khususnya Sekretariat Utama untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi dapat memudahkan akses informasi dan memperluas jangkauan pengawasan Obat dan Makanan ke berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh keberadaan *Contact Center* BPOM secara nyata telah membuka akses masyarakat atas informasi Obat dan Makanan. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan sumber daya di lingkungan internal BPOM. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), Sistem Pengarsipan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran merupakan beberapa bentuk manfaat teknologi. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, pemberitaan Obat dan Makanan yang belum terbukti kebenarannya di media sosial maupun media massa yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Settama dituntut untuk cepat tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi agar pengawasan Obat dan Makanan semakin efektif.

Kemajuan teknologi membuat sistem pengawasan juga harus dikembangkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. Untuk itu BPOM mengembangkan pengawasan berbasis digital dan melakukan integrasi sistem management data *pre dan post market* menuju *one data* pengawasan Obat dan Makanan. Sistem ini diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan serta meminimalisir pemalsuan produk karena masyarakat mampu membedakan antara produk palsu dan produk asli.

4. Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjembatani kedua peraturan perundangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi dilakukan untuk meningkatkan kterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN

dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik (terfokus), holistic (menyeluruh), integrative (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Pendekatan ini adalah salah satu upaya menghadapi permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan sebelumnya, antara lain duplikasi program dan anggaran, perencanaan yang tidak terintegrasi, serta belum terpadunya perencanaan dan penganggaran.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi sesuatu yang berdaya ungkit. Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan yang harus didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi misi pembangunan pada tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi.

5. Ekspektasi Masyarakat dan Unit Kerja Terhadap Layanan Sekretariat Utama

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Settama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM. Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Settama melakukan koordinasi bersama seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di Lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan fungsi koordinasi tersebut, Settama dituntut memberikan layanan dukungan manajemen yang optimal sehingga mampu menggerakan kinerja dari level organisasi hingga Unit Kerja secara optimal. Selain layanan kepada internal BPOM, Settama memberikan layanan langsung kepada masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Tingginya ekspektasi masyarakat untuk segera mendapatkan informasi dari BPOM perlu disikapi dengan kecepatan dan ketepatan/kesesuaian informasi yang diberikan kepada masyarakat.

6. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Sekretariat Utama mendukung pelaksanaan RB BPOM melalui area perubahan 1). Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum, 2). Penguatan

Kelembagaan, 3). Penataan Tatalaksana, 4). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

7. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya sebatas pada lingkup penyediaan laboratorium maupun kualitas layanan publik tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan operasional maupun laboratorium keliling yang memungkinkan mobilitas kerja dan pengawasan Obat dan Makanan.

Usaha pemenuhan serta penataan sarana dan prasarana tersebut harus selaras dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berlaku, termasuk Peraturan BPOM tentang Pengelolaan BMN di lingkungan BPOM yang saat ini tengah disusun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Kinerja di tahun 2020 disusun dengan mengacu pada dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024, serta capaian kinerja tahun 2015-2019.

Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024 yaitu:

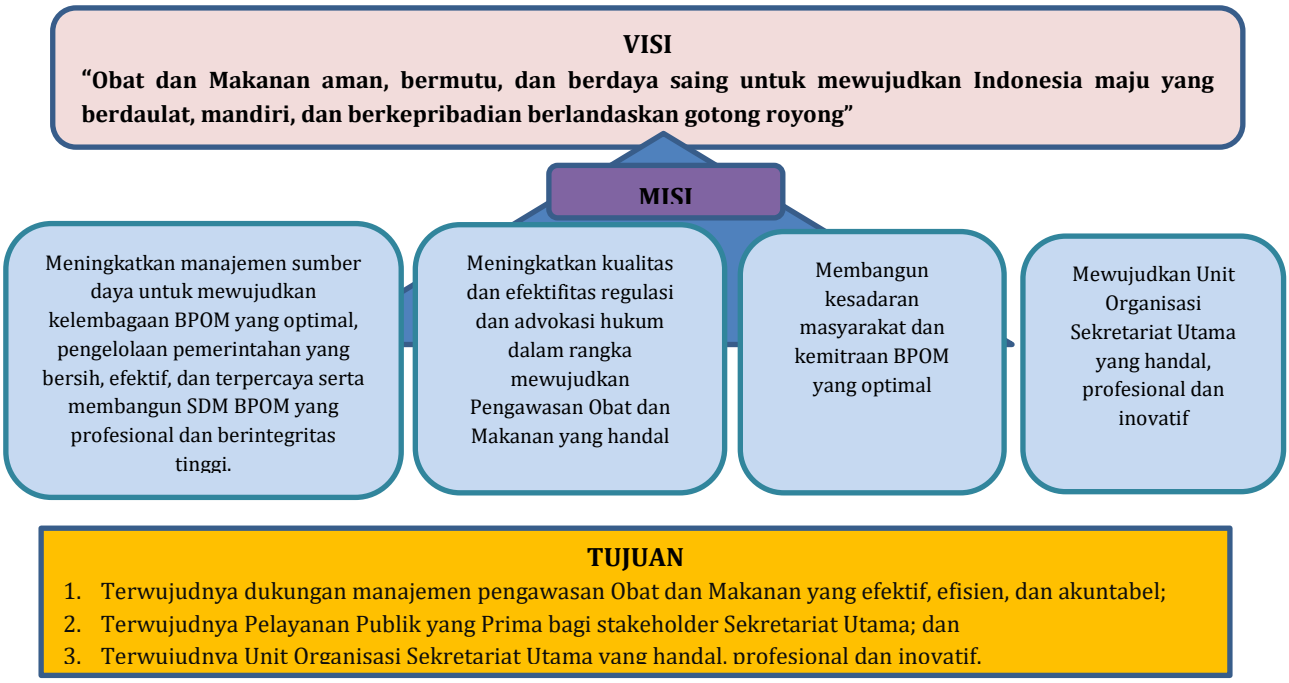

Gambar 5. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama

Dalam penyusunan sasaran Program, Sekretariat Utama menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholders perspective, customers perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

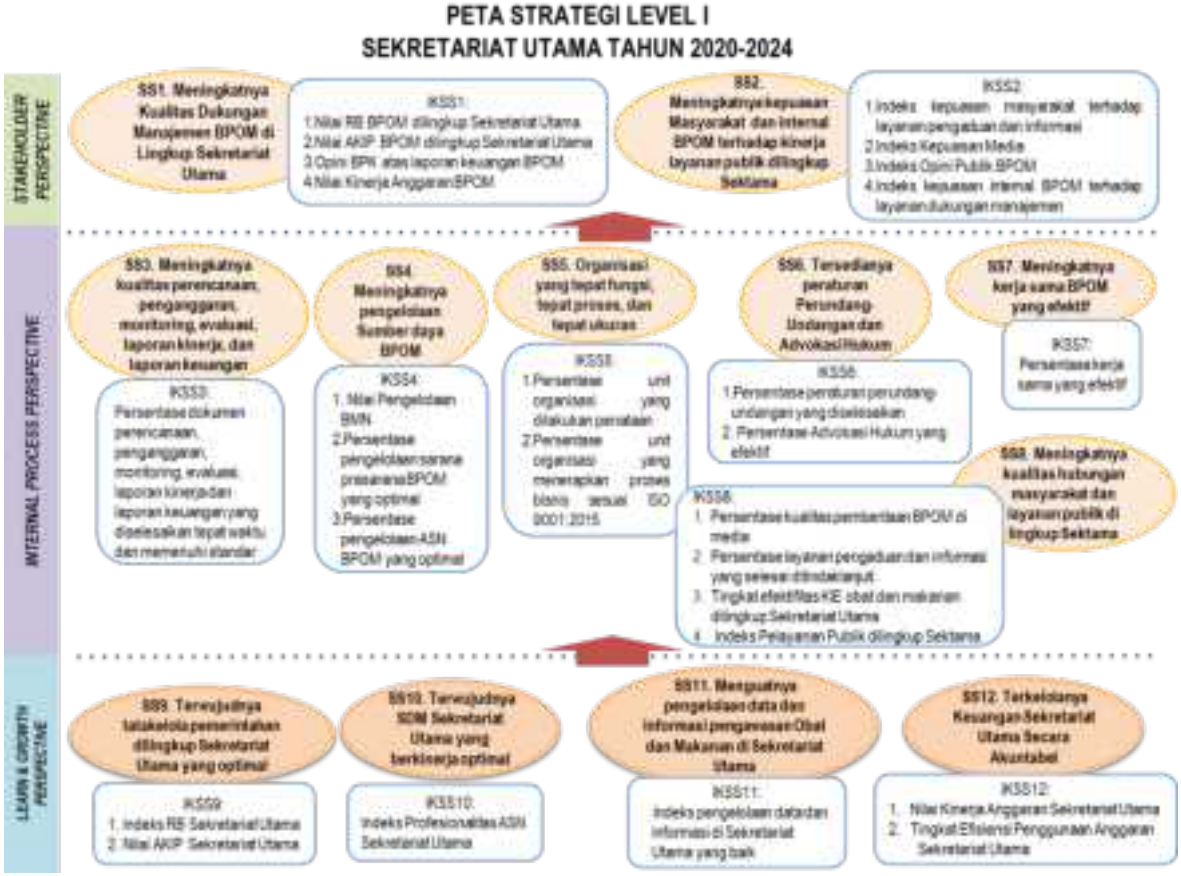

Gambar 6. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 laporan ini.

II. PERJANJIAN KINERJA (PK)

A. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya *(*pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024. Sekretariat Utama telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM pada 2 Juni 2020. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap sasaran program yang dapat dilihat pada Lampiran 3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2020 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	41
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93
Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5
	Indeks Kepuasan Media	73
	Indeks Opini Publik BPOM	66
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,70
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	80
	Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	78

Sasaran Program	Indikator	Target
	Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	81
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82
Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	82
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59
	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	88,98
	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	3,91
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sektama yang Optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	85
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81
Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	78
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	1,51
Terkelolanya Keuangan dilingkup Sektama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja per triwulan. Pemantauan dan pengendalian capaian

rencana aksi perjanjian kinerja telah dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan Evaluasi Internal lingkup Settama yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Interim Sekretariat Utama. Selain itu juga dilakukan pelaporan triwulanan melalui aplikasi secara online yaitu e-*Performance* BPOM. Capaian per triwulan dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Dalam rangka menjamin pelaporan data kinerja yang tepat waktu dengan data yang akurat, mudah telusur, dan terkini (*up to date*), telah ditetapkan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Lingkup Sekretariat Utama berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PI.04.2.21.09.20.567 tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

1. Secara umum, pengumpulan data kinerja lingkup Sekretariat Utama mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.04.20.132 Tahun 2020 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Badan POM (selanjutnya disebut Pedoman Monev).
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan dan triwulanan) dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pedoman Monev.
3. Penanggung Jawab Data pada masing-masing Biro yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Progran dan Kegiatan Badan POM, bertanggung jawab menjamin validitas dan kesahihan sumber data kinerja dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan Pedoman Monev.
4. Apabila terjadi kesalahan data, Penanggung Jawab Data menyampaikan perbaikan data kepada Biro Perencanaan dan Keuangan u.p. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja (email monevlapkinbpom@pom.go.id) melalui surat yang ditandatangani Kepala Biro dan disertai dengan justifikasi/alasan perubahan data
5. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan data kinerj unit kerja dan memberikan tanggapan terhadap usulan perubahan tersebut. Tanggapan dapat diberikan baik secara langsung maupun tertulis.
6. Kepala Biro dapat mengakses data kinerja melalui http://eperformance.pom.go.id/bpomv3 dan https://command-center.pom.go.id/ serta aplikasi monitoring dan evaluasi online lain yang terdapat pada Pedoman Monev.

B. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2020, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp391.009.078.000,00. Pada bulan April 2020, terdapat pemotongan pagu anggaran pada Satker Sekretariat Utama sebesar Rp60.871.370.000,00 (15,57%) dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, sehingga Pagu APBN-P Satker Sekretariat Utama menjadi Rp330.137.708.000,00. Pada Bulan Oktober 2020, terdapat realokasi anggaran dari Satker Sekretariat Utama kepada Satker lain sebesar Rp1.589.330.000,00 dalam rangka KIE dengan tokoh masyarakat, sehingga pagu Satker Sekretariat Utama menjadi Rp328.548.378.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan utama yang terangkum dalam 1 program sebagai berikut:

No.	Program	Pagu APBN(Rp)	Pagu APBN-P (Rp)	Pagu Refocusing KIE (Rp)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	391.009.078.000	330.137.708.000	328.548.378.000

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama yang mengacu pada arah kebijakan BPOM. Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama oleh 5 (lima) Biro dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan 5 (lima) kegiatan utama yaitu:

a. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM.
b. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.
c. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana
d. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan
e. Pengelolaan SDM, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM

Berikut rincian anggaran Sekretariat Utama untuk mendukung capaian sasaran program:

Tabel 2. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2020

Program/Sasaran Program	Pagu APBN(Rp)	Pagu APBN-P (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	**391.009.078.000**	**330.137.707.800**	**328.548.378.000**
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	12.788.898.610	8.167.286.110	10.040.367.970
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	287.348.364.000	272.342.472.900	247.333.180.000
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	8.025.368.120	5.873.365.700	4.317.644.740
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	51.466.503.000	15.615.013.000	38.973.739.000
5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses. dan tepat ukuran	1.726.170.000	1.534.410.000	1.085.954.000
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	4.819.141.000	3.676.090.000	3.404.360.000
7. Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	6.079.563.000	4.162.455.000	3.818.143.000
8. Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	9.088.903.000	6.012.987.000	7.297.044.000
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	3.705.791.320	3.715.917.940	5.752.772.350
10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	2.712.784.000	5.838.013.000	1.777.571.000
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	1.820.876.000	1.671.901.400	790.801.200
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	1.426.715.950	1.527.795.750	3.956.800.740

III. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

%Capaian = (Realisasi/Target) x 100%

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata capaian dari seluruh indikator. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) = {%capaian$_1$ + %capaian$_2$ + ... %capaian$_n$}/ n

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran

Status	Capaian Indikato	Penjelasan
	<50%	Sangat kurang
	50% ≤ χ <70%	Kurang
	70% ≤ χ <90%	Cukup
	90% ≤ χ <110%	Baik
	110% ≤ χ <120%	Sangat Baik
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

I. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020-2024. Laporan kinerja tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan yang berjalan selama tahun 2020 dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan perencanaan sampai dengan akhir periode Renstra. Evaluasi dilakukan pada 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II, maka beberapa indikator sasaran program yang telah melebihi target akhir periode Renstra, perlu direviu.

1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Sekretariat Utama Tahun 2020 seperti pada tabel berikut:

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2020

PERPECTIVE / SASARAN PROGRAM	NPS	KRITERIA
A. Stakeholder Perspective	103,48	Baik
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	99,09	Baik
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	107,86	Baik
B. Internal Process Perspective	106,21	Baik
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	100,00	Baik
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	112,27	Sangat Baik
5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	100,00	Baik

PERPECTIVE / SASARAN PROGRAM	NPS	KRITERIA
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	108,80	Baik
7. Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	111,79	Sangat Baik
8. Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	104,40	Baik
C. Learning and Growth Perspective	73,08	Cukup
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	93,19	Baik
10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	99,19	Baik
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	13,25	Sangat Kurang
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	86,68	Cukup

NPS tahun 2020 sebesar 94,26 (Baik). Nilai ini terbentuk dari agregasi realisasi kinerja indikator-indikator turunannya atau pembentuknya dibandingkan terhadap angka target dalam satu tahun.

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Sekretariat Utama Tahun 2020 seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2020

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian dibanding Target Tahunan (%)	Capaian Penyesuaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	41	40,35*	98,41	98,41
		2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	73,25	69,88*	95,40	95,40
		3	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	-	WTP	WTP	100,00	100,00
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	-	93	95,37	102,54	102,54
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	-	79,5	85,3	107,30	107,30
		6	Indeks Kepuasan Media	-	73	74,02	101,40	101,40
		7	Indeks Opini Publik BPOM	-	66	79,6	120,61	120,00
		8	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	3,70	3,80	102,70	102,70
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	%	100	100	100,00	100,00
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	10	Nilai Pengelolaan BMN	-	80	79,00	98,75	98,75
		11	Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	%	78	92,90	119,10	119,10
		12	Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	%	81	96,34	118,94	118,94
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	13	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	%	100	100	100,00	100,00
		14	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	%	79	79	100,00	100,00
6	Tersedianya peraturan Perundang-	15	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	%	100	100	100,00	100,00

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian dibanding Target Tahunan (%)	Capaian Penyesuaian (%)
	Undangan dan Advokasi hukum	16	Persentase advokasi hukum yang efektif	%	82	96,43	117,60	117,60
7	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	17	Persentase kerja sama yang efektif	%	82	91,67	111,79	111,79
8	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	18	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	%	99.59	99,84	100,25	100,25
		19	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	%	99	99,47	100,48	100,48
		20	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	-	96.32	91,00	102,27	102,27
		21	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	-	3.91	4,48	114,58	114,58
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang Optimal	22	Indeks RB Sekretariat Utama	-	85	73,75	86,76	86,76
		23	Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	81	80,69	99,62	99,62
10	Terwujudnya SDM dilingkup Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	-	78	77,37	99,19	99,19
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	25	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	-	1.51	0,2	13,25	13,25
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama secara Akuntabel	26	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	-	93	91,47	98,35	98,35
		27	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	%	100	100	75,00	75,00

*: merupakan capaian tahun 2019, karena hasil penilaian belum keluar dari KemenPAN-RB.

Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori sangat kurang, 2 (dua) indikator dengan kategori cukup, 18 (delapan belas) indikator dengan kategori baik, 5 (lima) indikator dengan kategori sangat baik, dan 1 (satu) indikator dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target tahun 2020 sudah dapat tercapai.

1.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM

IKU

1. ***Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama***
2. ***Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama***
3. ***Opini BPK atas laporan keuangan BPOM***
4. ***Nilai Kinerja Anggaran BPOM***

1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	47,86	41	40,35*	98,41	84,31

Realisasi Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama pada tahun 2020 adalah 40,35 dari target 41, sehingga capaian indikator adalah 98,41% (Baik). Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian 2020 sama jika dibandingkan pada tahun 2019 dengan capaian 40,35, karena hasil penilaian Nilai RB tahun 2020 belum keluar dari Kementerian PANRB. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, capaian indikator ini adalah 84,31%. Diperlukan upaya khusus dan strategi percepatan agar target akhir periode renstra dapat tercapai.

Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintahan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama berdasarkan Peraturan MenPAN-RB nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri PAN-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim MenPAN-RB untuk Komponen Pengungkit yang diwujudkan melalui 5 (area) area perubahan yaitu penataan peraturan perundang-undangan (5%); penataan dan penguatan organisasi (6%); penataan tata laksana (5%); penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%); dan penguatan akuntabilitas kinerja (6%). Serta

Komponen Hasil (Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Survei Internal Integritas Organisasi) berdasarkan hasil penilaian lembar kerja evaluasi Kementerian PANRB.

Cara perhitungan indikator Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama adalah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB untuk komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil.

Gambar 7. Kerangka Logis Evaluasi RB

Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama tahun 2020 diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	T	R*	%
A,	**Komponen Pengungkit**	**30,10**	**29,6**	**98.34**
1	Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-Undangan	3,4	3,2	94.12
2	Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	4,4	4,32	98.18
3	Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	4,2	4,12	98.10
4	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13,2	13,1	99.24
5	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,9	4,86	99.18
B	**Komponen Hasil**	**10,9**	**10,75**	**98.62**
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	10,9	10,75	98.62
Total		**41,00**	**40,35**	**98,41**

*merupakan capaian tahun 2019

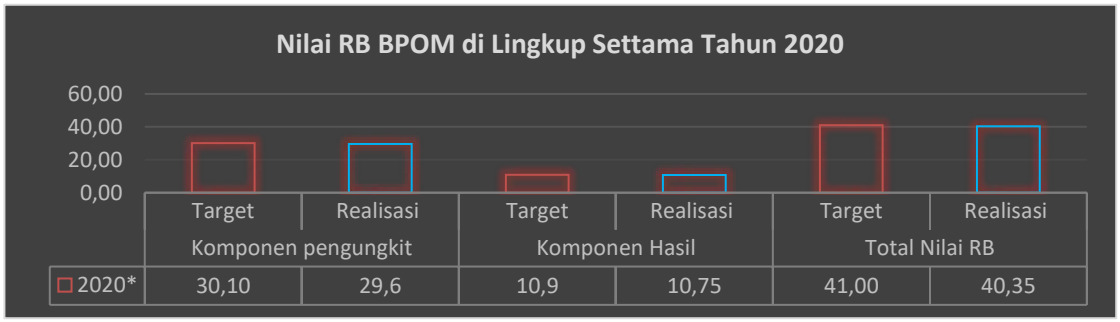

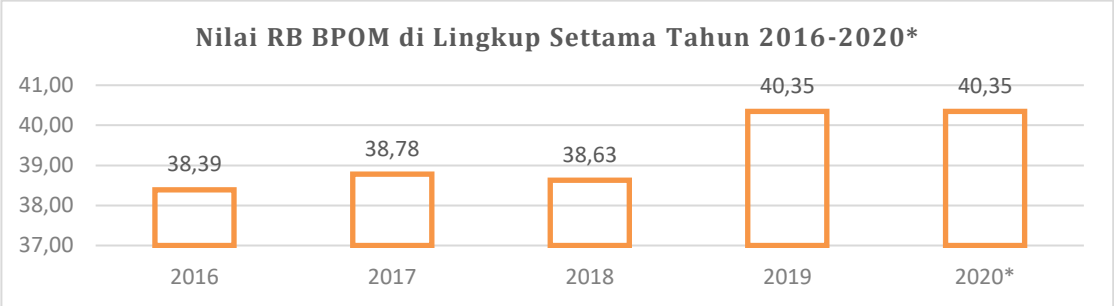

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	69,88	-	-
2020	73,25	69,88*	95,40	Baik

Indikator Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama tahun 2020 merupakan indikator lanjutan tahun 2019, akan tetapi terdapat perbedaan definisi operasionalnya, dimana pada tahun 2019 komponen pengungkit manajemen perubahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menjadi capaian indikator Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 dengan menggunakan definisi operasional tahun 2020, maka realisasi tahun 2019 sama dengan tahun 2020, karena hasil penilaian Nilai RB tahun 2020 belum keluar dari Kementerian PANRB.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator beserta Analisis penyebab kegagalan dan Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Penataan Peraturan Perundang-Undangan

a) Telah ditetapkan 32 (tiga puluh dua) Peraturan Badan POM, 145 (Seratus Empat Lima) Keputusan Kepala Badan POM, dan 91 (sembilan puluh satu) Rumusan Perjanjian.

b) Badan POM turut serta juga melakukan pembahasan terhadap beberapa rancangan peraturan perundang-undangan antara lain:

- RUU tentang Cipta Kerja

- RPP tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan untuk Sektor Obat dan Makanan
- RPP tentang Label dan Iklan Pangan Olahan
- RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan;
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas;
- Rancangan Peraturan Presiden terkait Perubahan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium
- Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang (PSEF); dan
- Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan, Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bersama dengan Kementerian Perdagangan.

Kegiatan yang telah dilakukan tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator area perubahan penataan peraturan perundang-undangan di lingkup Sekretariat Utama yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

a) melakukan identifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron setiap tahun secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan lingkup strategis terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
b) menyusun rencana tahunan merevisi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terkini dengan memperhatikan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan terutama pada aspek transparansi dengan pelaksanaan konsultasi publik dan/atau apabila diperlukan notifikasi ke WTO;
c) penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
d) sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Kendala: Proses penyusunan peraturan perundang-undangan oleh unit teknis belum dapat dipantau oleh Biro Hukum dan Organisasi secara optimal.
Rencana tindak lanjut:

a) Optimalisasi pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan sistem pengendalian.
b) Meningkatkan koordinasi antara Biro Hukum dan Organisasi dengan unit teknis terkait.

2) Penataan dan Penguatan Organisasi

a) Penataan Organisasi Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Presiden RI periode tahun 2019-2024. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut, BPOM telah menetapkan dan melakukan sosialisasi 3 (tiga) pada Rapat Evaluasi Nasional tanggal 23 November 2020 atas Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan BPOM terdiri dari:

1) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1002);
2) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1003);
3) Peraturan BPOM Nomor 23 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1004).

Selain itu telah ditetapkan Keputusan Kepala BPOM sebagai berikut:

1) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM;
2) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 tentang Uraian Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan BPOM;
3) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1151 tentang Uraian Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.

Berdasarkan hasil penyederhanaan birokrasi BPOM, terdapat 83,31% pejabat administrasi yang dilakukan penyetaraan dan pengalihan ke dalam jabatan fungsional terdiri atas 80,10% jabatan administrator (eselon III) yang dialihkan ke jabatan fungsional dan 84,77% jabatan pengawas (eselon IV) yang dialihkan ke jabatan fungsional. Rekapitulasi penyederhanaan birokrasi BPOM sebagai berikut:

No	Jabatan Struktural	Struktur Organisasi *Existing*	Struktur Organisasi Baru Yang Dipertahankan	Pejabat Administrasi Dialihkan ke Fungsional
1	Administrator (Eselon III)	201	40 (19,90%)	161 JF Ahli Madya (80,10%)
2	Pengawas (Eselon IV)	440	67 (15,23%)	373 JF Ahli Muda (84,77%)
Total		641	107 (16,69%)	534 (83,31%)

b) Peningkatan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, diperlukan peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis. Berkenaan dengan hal tersebut, BPOM telah melakukan evaluasi klasifikasi UPT di lingkungan BPOM berdasarkan kriteria unsur pokok dan unsur penunjang yang mencerminkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT. Berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi UPT di lingkungan BPOM sesuai Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM, direkomendasikan peningkatan klasifikasi UPT terdiri atas:

1) 4 (empat) Balai POM menjadi Balai Besar POM;
2) 15 (lima belas) Loka POM menjadi Balai POM; dan
3) Pembentukan 3 (tiga) Loka POM.

Kementerian PANRB telah menyampaikan Surat Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Nomor B/1393/KT.01/2020 tanggal 7 Oktober 2020 hal Tindak Lanjut Atas Permohonan Rekomendasi Peningkatan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Kendala: Untuk menindaklanjuti surat dari Deputi Kelembagaaan dan Tata Laksana Kemenpan- RB dibutuhkan koordinasi dengan 3 (tiga) Pemerintah Daerah untuk permintaan rekomendasi pembentukan Loka baru

Tindak Lanjut: Akan disampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Peningkatan Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM kepada Kementerian PANRB.

3) Penataan tatalaksana

a) Pelaksanaan reviu proses bisnis BPOM yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 02.02.1.2.03.20.96 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) ISO 9001:2015 BPOM.
b) Pelaksanaan audit surveilan dan sertifikasi QMS ISO 9001:2015 pada tanggal 6 Agustus 2020, berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-OT.02.2.22.08.20.431 tanggal 6 Agustus perihal Pelaksanaan Audit Surveilan dan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 dilaksanakan audit surveilan untuk 64 (enam puluh empat) Unit organisasi dan audit sertifikasi stage 2 untuk 19 (sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota.
c) Pelaksanaan evaluasi implementasi proses bisnis melalui Audit Internal ISO 9001:2015 yang diintegrasikan dengan ISO 17025:2017 di lingkup Sekretaris Utama
d) Pelaksanaan integrasi E-tukin dengan input data e-presensi dan tapping data (WFO)
e) Pelaksanaan proses alih media arsip vital dan arsip terjaga
f) Penomoran surat di lingkup Sekretaris Utama dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIPANDA
g) Implementasi SIKD telah dilakukan untuk seluruh Unit Kerja di lingkup Sekretaris Utama
h) Sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Badan POM telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan melakukan pelayanan permohonan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
i) Pada tahun 2020, Badan POM berpartisipasi dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan telah berhasil meraih peringkat ke-5 kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai Badan Publik "INFORMATIF" dengan nilai 94,09, meningkat hampir 10 poin dibandingkan tahun 2019 yang memperoleh nilai 84,99.

Sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Badan POM telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan melakukan pelayanan permohonan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pada tahun 2020, Badan POM berpartisipasi dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan telah berhasil meraih peringkat ke-5 kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai Badan Publik "INFORMATIF" dengan nilai 94,09, meningkat hampir 10 poin dibandingkan tahun 2019 yang memperoleh nilai 84,99.

Kendala:

a. Penerapan SPBE masih membutuhkan evaluasi dan melakukan langkah-langkah peningkatan penerapan SPBE
b. Pemahaman PPID Balai Besar/Balai POM terkait standar dan peraturan tentang keterbukaan informasi publik masih kurang.
c. Belum adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di internal Badan POM

Rencana tindak lanjut: Evaluasi penerapan SPBE dilakukan dengan langkah-langkah peningkatan dengan terbentuknya fungsi Perencanaan dan Keamanan TIK sebagai tindak lanjut penguatan SPBE.

4) Penataan Sistem Manajemen SDM

a) Telah dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisa beban kerja dan analisa jabatan dimasing-masing unit kerja serta diselaraskan dengan indikator kinerja
b) Mengadakan pertemuan sosialisasi dan sinkronisasi data kebutuhan SDM BPOM Pusat
c) Penyusunan rancangan kebutuhan pegawai Tahun 2020-2024 dan PFM dari seluruh unit kerja di lingkungan Settama,
d) Penyusunan draft Peta Jabatan Tahun 2020

e) Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan dan dilakukan secara kompetitif serta objektif
f) Penyusunan draft Peraturan Sistem Manajaemen Kinerja agar penilaian lebih objektif dan terukur,
g) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai triwulan I Tahun 2020
h) Telah dilakukan penilaian prestasi kerja pegawai triwulan IV Tahun 2019, I dan II Tahun 2020
i) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku,
j) Telah dilakukan pemantauan, pendampingan dan pemeriksaan dalam rangka penegakan kasus disiplin
k) Telah dilaksanakan survey opini pegawai di Lingkungan Badan POM Tahun 2020
l) Pemetaan dan mapping kompetensi pegawai di lingkup Settama berdasarkan identifikasi kebutuhan masing-masing pegawain, dan
m) Penggunaan sistem informasi kepegawaian yaitu aplikasi SIASN oleh seluruh pegawai di lingkup Settama.
n) Telah dilaksanakan tahapan SKB dan wawancara dalam pengadaan CPNS formasi Tahun 2019
o) Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan Badan POM sudah berdasarka penilaian presrtasi kerja triwulanan
p) Pemberian reward kepada pegawai berprestasi Tahun 2020
q) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kinerja pegawai triwulan IV Tahun 2020
r) Telah dilaksanakan penyetaraan jabatan sebagai komitmen instansi terkait debirokratisasi yaitu jabatan struktural disetarakan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan ruang lingkup jabatan masing-masing fungsional

Kendala/hambatan:

a) Dikarenakan pandemic Covid-19 terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan penyesuaian pelaksanaannya dan anggarannya dan dilakukan optimalisasi kepada kegiatan pendukung pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan Badan POM. Beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya seperti pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (SKB CPNS)

b) Pemahaman terkait norma, standar dan peraturan terkait manajemen kepegawaian yang masih kurang oleh pengelola kepegawaian dan kurangnya awareness dari Pimpinan unit kerja yaitu dalam hal penyusunan dan pengelolaan pemenuhan kebutuhan pegawai. Diperlukan pengembangan aplikasi kepegawaian (SIASN) dengan dilakukan penambahan fitur agar pengelolaan SDM lebih efektif.

Rencana tindak lanjut:

a) Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian kepada seluruh unit kerja menggunakan sistem daring
b) Melakukan pengembangan aplikasi kepegawaian (SIASN), E-Tukin, dan We Care
c) Penyusunan Perka Kelas Jabatan sesuai dengan SOTK Baru

5) Penguatan Akuntabilitas

a) Rakorpim penetapan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPOM 2020-2024
b) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait finalisasi rancangan Renstra BPOM 2020-2024
c) Mengesahkan Renstra BPOM 2020-2024, Penyusunan IKU BPOM 2020-2024, Penyusunan Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2020 dan Penyusunan Rencana Kinerja BPOM Tahun 2021
d) Bimtek SAKIP dan Monev Online Tahun 2020, yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan Balai Besar/Balai POM untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola data menginput aplikasi monev online dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
e) Penyusunan Lapkin BPOM tahun 2019 dan Laporan Kinerja interim BPOM Triwulan I s.d IV Tahun 2020
f) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
g) Evaluasi SAKIP : Self assessment evaluasi SAKIP melalui SIMOLEKDESI, desk evaluasi SAKIP satker dan unit kerja, serta Pemantauan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP
h) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT Triwulan I s.d IV Tahun 2020 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)

i) Pemantauan Kinerja Individu setiap triwulan
j) Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV tahun 2019 dan triwulan I s.d III tahun 2020
k) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2020 untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra (perencanaan jangka menengah).
l) Pembahasan Juklak dan Juknis Anggaran 2020 BPOM dan Kegiatan Terpadu Pusat dan Balai TA 2021
m) Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2021.
n) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker
o) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM
p) Penyusunan Dashboard Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
q) Pemutahiran data e-PNBP dilakukan setiap bulan melalui Rekonsiliasi data penerimaan.
r) Koordinasi Percepatan Proses pengadaan Barang dan Jasa
s) Pendampingan dan Pembinaan BMN untuk meningkatkan kualitas Pelaporan BMN Badan POM

Kendala:

a) Indikator pada unit kerja pada perpektif internal masih terdapat indikator yang belum spesifik. Seperti contoh indikator dari Deputi 4 yaitu "Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif" belum ada Indikator yang mengukur tingkat pencegahan.
b) Masih terdapat penetapan kinerja yang tidak optimal, yaitu persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar oleh UPT. Target kinerja indikator tersebut seharusnya 100%, karena setiap pengujian harus sesuai dengan standar.
c) Belum terintegrasi e-planning dan e-performance
d) Indikator belum dicascading sampai dengan level individu

Rencana tindak lanjut:

a) Terus meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dan pengukuran kinerja yang sudah ada.
b) Terus mengembangkan kualitas pengukuran kinerja sehingga semakin meningkatkan kualitas manajemen kinerja yang sudah ada.
c) Menetapkan target kinerja dengan optimis terutama untuk indikator yang sifatnya mandatory.

d) Melakukan integrasi e-planning dan e-performance
e) Melakukan cascading sampai dengan level individu dan diukur melalui aplikasi e-performance dan e-SKP

e. Rekomendasi hasil exit meeting evaluasi pelaksanaan RB oleh Kemenpan RB

Beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

1) Terus melanjutkan proses evaluasi kebijakan yang sudah berjalan secara berkala sehingga regulasi yang ada tetap harmonis
2) Terus melanjutkan proses penyelesaian RUU yang sedang dalam proses
3) Melakukan evaluasi dan analisa terhadap situasi terkini pandemi, apakah BPOM sudah memiliki produk hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi atau menangani kedaruratan seperti saat ini
4) Terus melanjutkan integrasi sistem yang sedang dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang sudah dibangun
5) Terus melakukan evaluasi terhadap penerapan SPBE yang sudah ada dan melakukan langkah-langkah peningkatan penerapan SPBE
6) Melakukan evaluasi atau analisa terhadap kebutuhan stakeholder akan *data sharing* sehingga bisa menjadi strategi pengembangan ke depan penerapan SPBE pada instansi stakeholder BPOM
7) Agar menyelesaikan Draft Pedoman Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional PFM
8) Melakukan evaluasi atas kebutuhan tenaga kerja kontrak administrasi dan penunjang teknis sehubungan dengan adanya penambahan CPNS setiap tahunnya
9) Terus meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dan pengukuran kinerja yang sudah ada
10) Terus mengembangkan kualitas pengukuran kinerja sehingga semakin meningkatkan kualitas manajemen kinerja yang sudah ada
11) Menetapkan target kinerja dengan optimis terutama untuk indikator yang sifatnya mandatory
12) Indikator pada unit kerja pada perpektif internal masih terdapat indikator yang belum spesifik. Seperti contoh indikator dari Deputi 4 yaitu “Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif” belum ada Indikator yang mengukur tingkat pencegahan
13) Masih terdapat penetapan kinerja yang tidak optimal, yaitu persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar oleh UPT. Target kinerja

indikator tersebut seharusnya 100%, karena setiap pengujian harus sesuai dengan standar

2. Nilai AKIP BPOM di Lingkup Sekretariat Utama

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	82,8	73,25	69,88*	95,40	84,40

Realisasi Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama pada tahun 2020 adalah 69,88 dari target 73,25, sehingga capaian indikator adalah 95,40% (kategori Baik). Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian 2020 sama jika dibandingkan pada tahun 2019 dengan capaian 69,88, karena hasil penilaian Nilai RB tahun 2020 belum keluar dari KemenPAN-RB. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, capaian indikator ini adalah 84,40%. Diperlukan upaya khusus dan strategi percepatan agar target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Cara perhitungan Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama berdasarkan penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dari KemenPANRB sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30% :
   a. Rencana Strategi (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), Impelemtasi Renstra (3%)
   b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%), Impelemtasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%, meliputi: Pemenuhan pengukuran (5%), Kualitas pengukuran (12,5%), Implementasi pengukuran (7,5%)

3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi: Pemenuhan pelaporan (3%), Kualitas pelaporan (7,5%), Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Capaian Kinerja dengan bobot 20%, meliputi: Kinerja yang dilaporkan (output) (5%), Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%), Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama tahun 2020 diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	T	R*	%
1	Perencanaan Kinerja	25.27	22.97	90.90
2	Pengukuran Kinerja	20.28	19.77	97.49
3	Pelaporan Kinerja	12.51	11.95	95.52
4	Capaian Kinerja	15.19	15.19	100.00
Total		**73.25**	**69.88**	**95.40**

*merupakan capaian tahun 2019

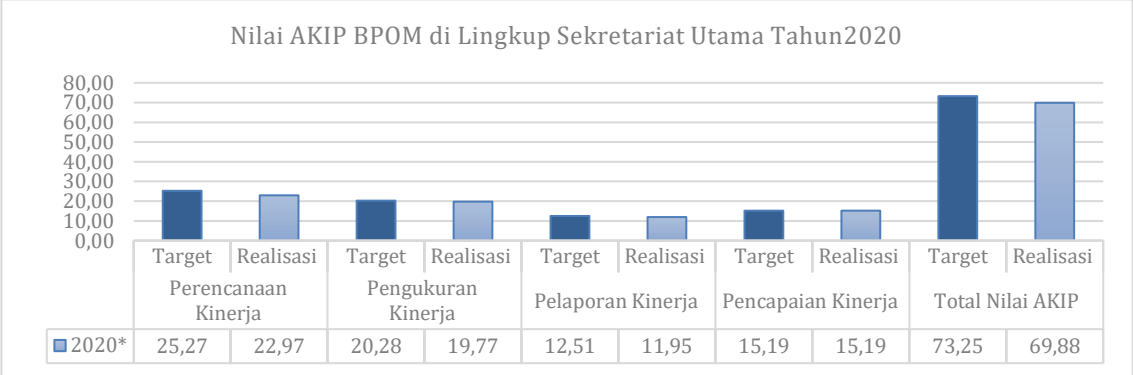

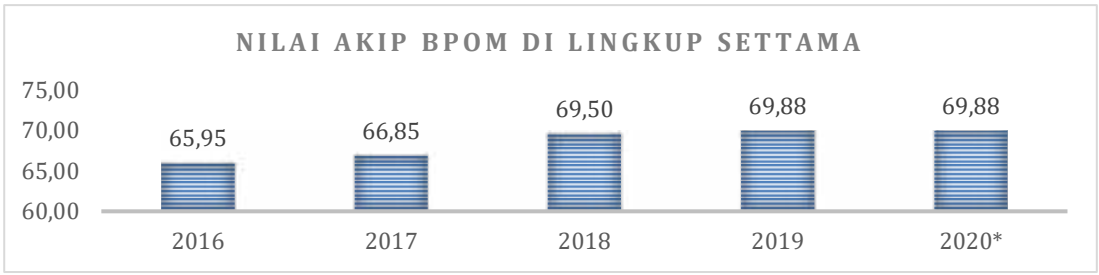

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	69,88	-	-
2020	73,25	69,88*	95,40	Baik

Indikator Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, maka

realisasi tahun 2019 sama dengan tahun 2020, karena hasil penilaian Nilai RB tahun 2020 belum keluar dari Kementerian PANRB.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Mengesahkan Renstra BPOM 2020-2024 berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020
2) Penyusunan IKU BPOM 2020-2024
3) Penyusunan Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2020
4) Penyusunan Rencana Kinerja BPOM Tahun 2021
5) Bimtek SAKIP dan Monev Online tahun 2020, untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola data menginput aplikasi monev online dan menyusun Laporan kinerja unitnya
6) Penyusunan Lapkin BPOM tahun 2019
7) Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka triwulan IV tahun 2019 dan triwulan I s.d III tahun 2020
8) Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM Triwulan I s.d III Tahun 2020
9) Mengesahkan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020
10) Mengesahkan Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.2.04.20.132 Tahun 2020
11) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT Triwulan I s.d IV Tahun 2020 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
12) Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2021.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

1) Indikator pada unit kerja pada perpektif internal masih terdapat indikator yang belum spesifik. Seperti contoh indikator dari Deputi 4 yaitu “Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif” belum ada Indikator yang mengukur tingkat pencegahan.

2) Masih terdapat penetapan kinerja yang tidak optimal, yaitu persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar oleh UPT. Target kinerja indikator tersebut seharusnya 100%, karena setiap pengujian harus sesuai dengan standar.
3) Belum terintegrasi e-planning dan e-performance
4) Indikator belum dicascading sampai dengan level individu

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Terus meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dan pengukuran kinerja yang sudah ada.
2) Terus mengembangkan kualitas pengukuran kinerja sehingga semakin meningkatkan kualitas manajemen kinerja yang sudah ada.
3) Menetapkan target kinerja dengan optimis terutama untuk indikator yang sifatnya mandatory.
4) Melakukan integrasi e-planning dan e-performance
5) Melakukan cascading sampai dengan level individu dan diukur melalui aplikasi e-performance dan e-SKP

3. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	100	100

Realisasi Opini BPK atas laporan keuangan BPOM pada tahun 2020 adalah WTP dari target WTP, sehingga capaian indikator adalah 100% (kategori Baik). Upaya ini membuahkan hasil dengan diakuinya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan BPOM oleh BPK berupa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPOM tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, indikator ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu WTP dengan kategori Baik, karena nilai tertinggi opini BPK atas laporan keuangan adalah opini wajar tanpa pengecualian/WTP (*unqualified opinion*).

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni: (i) opini wajar tanpa pengecualian/WTP (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian/WDP (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Cara penentuan Opini BPK atas laporan keuangan BPOM dilaksanakan oleh BPK dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh auditor independen (termasuk BPK), berpedoman pada ketentuan yg diatur oleh INTOSAI (Organisasi Internasional Lembaga Audit Tertinggi).

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	WTP	WTP	100	Baik
2020	WTP	WTP	100	Baik

Indikator Opini BPK atas laporan keuangan BPOM pada tahun 2020 merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019, maka capaian tahun 2019 sama dengan tahun 2020.

Opini WTP tahun 2020 merupakan yang keenam secara berturut-turut setelah sebelumnya juga meraih penghargaan WTP pada tahun 2019 atas Laporan Keuangan Tahun 2018.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	K/L	Indikator	T	R	%	Kategori
1	Settama BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	100	Baik
2	Settama BKKBN	Opini atas laporan keuangan dari BPK (2019)	WTP	WTP	100	Baik

Apabila dibandingkan dengan realisasi Opini atas laporan keuangan dari BPK tahun 2019 pada BKKBN yaitu WTP, maka realisasinya sama dengan Opini BPK atas laporan keuangan BPOM tahun 2020.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
2) Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Utama Unaudited dan Audited
3) Pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI
4) Mengikuti pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, penyusunan dan penelaahan Laporan Keuangan
5) Pertemuan (Konsolidasi) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Triwulan III BPOM Tahun 2020 secara daring

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya

1) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM sesuai dengan SAP.
2) Pelatihan/Workshop Penyusunan Laporan Keuangan yang di selenggarakan oleh Kementerian Keuangan atau pun Lembaga Pelatihan.
3) Bimbingan Teknis kepada Satuan Kerja di Pusat dan Daerah guna mendukung kemandirian balai melalui penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAP.

Dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2019, ketiga kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2020.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Pertemuan (Konsolidasi) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Tahun 2020 secara daring dan luring
2) Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
3) Review Pedoman Pengelolaan PNBP, perlu dilakukan pembahasan dengan BPK dan Kemenkeu
4) Pembahasan Juknis Akuntansi Persediaan dengan BPK dan Kemenkeu.

4. Nilai Kinerja Anggaran BPOM

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Nilai Kinerja Anggaran BPOM	97	93	95,37	102,54	98,32

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BPOM pada tahun 2020 adalah 95,37 dari target sebesar 93, sehingga capaian indikator adalah 102,54% (kategori Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 97, indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 98,32% dengan kategori Baik.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tiga belas indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian Output. Nilai EKA diukur dengan indikator capaian keluaran program, penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, serta capaian sasaran program.

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Pada tahun 2020, berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA dan OMSPAN per 24 Februari 2021, bahwa Nilai EKA/ SMART BPOM adalah 96,17 dan nilai IKPA BPOM adalah 94,16 *(nilai reaktivasi)*, maka nilai kinerja anggaran tahun 2020 diperoleh angka 95,37 (102,54%).

Sebagai langkah antisipatif terhadap penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran belanja K/L akibat kondisi kahar (***force majeure***) yang disebabkan oleh resiko penyebaran ***Corona Virus Disease 2019*** (COVID-19), IKPA Triwulan I dan II Tahun 2020 diberikan *relaksasi.* Guna menjaga akselerasi belanja pemerintah, berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor S-258/PB/2020 dilakukan Kembali penilaian IKPA Kementerian Negara/Lembaga mulai Triwulan III *(reaktivasi)* tanpa dilakukan penilaian terhadap Indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	96,62	-	-
2020	93	95,37	102,54	Baik

Indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu 96,62 (EKA 96,9 dan IKPA 96,19) , maka realisasi tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan kondisi pandemi covid menyebabkan serapan anggaran tidak terserap maksimal. Selain itu beberapa output kegiatan dan indikator Sasaran Strategis (SS) tidak tercapai 100%. Sebagai informasi, bobot pencapaian SS (aspek manfaat) adalah 50% terhadap NKA dan 50% lainnya disumbang oleh rata-rata NKA Eselon I.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Sosialisasi dan Bimtek Monev Online (termasuk monev SMART DJA)
2) Sosialisasi reformulasi Sosialisasi Reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
3) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT Triwulan I s.d IV tahun 2020 pada SMART DJA
4) Penyusunan buku evaluasi pelaksanaan anggaran 2019 dan Triwulan I s.d III Tahun 2020
5) Penerapan *reward* dan *punishment* terhadap satker yang memperoleh Nilai Kinerja Anggaran tertinggi

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Nilai Kinerja Anggaran BPOM telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 95,37 (102,54%), hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1) Pada aplikasi SMART DJA Kepatuhan Satker dalam pelaporan capaian kinerja meningkat.
2) Pada aplikasi OMSPAN Indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA. Walaupun sudah mencapai target, masih terdapat nilai yang belum mencapai 100% yaitu pada pengelolaan UP dan TUP, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, pagu minus dan capaian output.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan dengan realisasi anggaran.
2) Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya.
3) Entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.
4) Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap seluruh indikator pada IKPA.

Sasaran 2	**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Internal BPOM Terhadap Kinerja Layanan Publik dilingkup Sekretariat Utama**
IKU ***1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi*** ***2. Indeks Kepuasan Media*** ***3. Indeks Opini Publik BPOM*** ***4. Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen***	

5. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	92	79,5	85,3	107,30	92,72

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi pada tahun 2020 adalah 85,30 dari target tahun 2020 sebesar 79,5, sehingga capaian indikator adalah 107,30% (kategori Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 92, maka capaian indikator ini adalah 92,72%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu 83, maka capaian tahun 2020 sudah melampaui target 2021, sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat. Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku Petugas; (8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu:

Nilai interval	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
25,00 – 64,99	D	tidak baik
65,00 – 76,60	C	kurang baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	sangat baik

Pada tahun 2020, telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi dengan jumlah responden sebanyak 355 orang yang merupakan pengguna layanan pengaduan dan informasi di April-Juni 2020. Pengambilan data dilakukan secara telesurvei dan online menggunakan e-SKM.

Gambar 8. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi Tahun 2020

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	77,08	-	-
2020	79,5	85,3	107,30	Baik

Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi merupakan indikator baru pada Renstra Settama tahun 2020-2024 dan bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Akan tetapi, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi tahun 2020 sudah dilakukan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 diperoleh kinerja baik dengan nilai 85,30 (76,61-88,30) meningkat cukup signifikan 8,22 dari tahun 2019 sebesar 77,08.

Berikut perbandingan nilai per unsur layanan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi tahun 2019 dan 2020.

Unsur Pelayanan		2019	2020	Selisih
U1	Persyaratan Pelayanan	76,98	84,27	+ 7,29
U2	Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan	74,93	84,08	+ 9,15

Unsur Pelayanan		2019	2020	Selisih
U3	Waktu Pelayanan	71,11	85,09	+ 13,98
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	-	83,71	-
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan	75,81	85,45	+ 9,64
U6	Kompetensi Petugas	76,32	85,63	+9,31
U7	Perilaku Petugas	78,74	90,75	+12,01
U8	Penanganan Pengaduan	89,88	84,13	- 5,75
U9	Sarana dan Prasarana	72,87	84,60	+11,73
Total		**77,08**	**85,30**	**+8,22**

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

1) Secara umum, peningkatan nilai terjadi pada 8 dari 9 unsur pelayanan, yaitu: persyaratan pelayanan, sistem/mekanisme/prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, dan sarana prasarana.
2) Peningkatan nilai unsur pelayanan tertinggi ada pada unsur waktu pelayanan, perilaku petugas dan sarana-prasarana pelayanan dengan selisih di atas 10 poin dibandingkan hasil survei di tahun 2019. Sementara terdapat penurunan nilai pada unsur pelayanan penanganan pengaduan.
3) Penurunan nilai pada unsur penanganan pengaduan dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 dimana terdapat kendala dalam proses tindak lanjut pengaduan yang memerlukan penelurusan dan pemeriksaan sarana di lapangan. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana aktivitas usaha dan mobilitas dibatasi menjadi hambatan dalam melakukan tindak lanjut pengaduan.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Pelaksanaan pelayanan tetap dapat dilakukan di masa pandemi COVID-19 secara *full online.*
2) Pengembangan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan

dan informasi secara *online* (e-SKM) untuk mendukung pelaksanaan survei secara mandiri.

3) Perbaikan metode pengambilan data responden, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana survei dilaksanakan oleh pihak ke-3 terhadap pengguna layanan periode 1 (satu) tahun sebelumnya, untuk pelaksanaan tahun 2020 survei dilakukan sesaat setelah pengguna layanan menerima penyelesaian layanan.
4) Melakukan *continuous improvement* sebagai tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2019 diantaranya:
   i. Publikasi standar pelayanan terkait *service delivery* pada subsite ulpk.pom.go.id dan berbagai media
   ii. Perbaikan unsur pelayanan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
      - Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan tahun 2020 dan Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi Online Rakyat (SP4N-LAPOR) BPOM.
      - Peningkatan kompetensi SDM pelaksana pelayanan baik kompetensi teknis maupun budaya pelayanan
      - Pelaksanaan koordinasi intensif dengan Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan.
      - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian layanan oleh unit kerja dan UPT secara berkala
      - Publikasi media akses layanan pengaduan dan informasi di berbagai media, sehingga pengguna layanan dapat mengetahui dan memanfaatkan berbagai media layanan yang tersedia.
5) Melakukan *review* dan revisi standar pelayanan pengaduan dan informasi pada Peraturan Badan POM No.27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM.
6) Melakukan perubahan *Service Level Agreement* (SLA) penyelesaian layanan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan mempublikasikan melalui berbagai media.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Meningkatkan publikasi alur dan persyaratan pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui *Contact Center* HaloBPOM 1500533 melalui berbagai media

2) Mempersingkat *Interactive Voice Response* (IVR) *Contact Center,* mengintegrasikan layanan *Contact Center* dengan unit kerja terkait, dan mengurangi waktu antrian *Contact Center*
3) Meningkatkan kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan melalui email dan media sosial, dengan melakukan: (1) pembentukan dan pelaksanaan koordinasi intensif dengan Tim Koordinasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020; (2) peningkatan kompetensi petugas sehingga layanan dapat diselesaikan tanpa proses rujuk; dan (3) penerapan notifikasi *autoreply* sebagai respon terhadap layanan yang masuk di luar jam kerja melalui email, WA dan media sosial.
4) Pemutakhiran ***Knowledge Base*** *Contact Center (KBCC)*
5) Melaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui *knowledge sharing forum* dan keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja
6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan
7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan
8) Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan

6. Indeks Kepuasan Media

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Indeks Kepuasan Media	75	73	74,02	101,40	98,69

Realisasi Indeks kepuasan media pada tahun 2020 adalah sebesar 74,02 dari target sebesar 73, sehingga capaian indikator adalah 101,40% (kategori Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 75, capaian indikator ini adalah 98,69%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 (73,5) dan tahun 2022 (74) , maka capaian tahun 2020 telah melampaui target 2021 dan 2021, sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Indeks kepuasan media merupakan tingkat kepuasan yang dirasakan media/wartawan baik media elektronik (TV dan radio), cetak (koran, majalah, tabloid), serta online setelah mendapatkan pelayanan dari BPOM, baik pada saat meliput kegiatan BPOM, konferensi pers, maupun meminta narasumber wawancara/*talkshow*, dan persepsi media kepada BPOM.

Indeks dihitung berdasarkan hasil survei sesuai PerMenPANRB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 7 (tujuh) unsur penilaian: (1) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (2) Waktu penyelesaian; (3) Biaya/Tarif; (4) Produk spesifikasi jenis pelayanan; (5) Perilaku pelaksana; (6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan (7) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu:

Nilai interval	Interpretasi Indeks
0 – 25	Sangat buruk
25,1 – 50	Buruk
50,1 – 75	Perlu ditingkatkan
75,1 – 100	Perlu dipertahankan

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	73	-	-
2020	73	74,02	101,40	Baik

Indikator Indeks kepuasan media pada tahun 2020 merupakan indikator baru pada Renstra Settama tahun 2020-2024 dan bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Akan tetapi indikator ini sudah diukur pada tahun 2019 yaitu indeks kepuasan wartawan dengan realisasi 73, sehingga realisasi indiaktor tersebut meningkat dari 73 menajdi 74,02.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penyampaian informasi mengenai Obat dan Makanan dan kinerja pengawasan Badan POM kepada media. Meskipun tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan media secara langsung karena pandemi COVID-19, namun informasi ini tetap dapat disampaikan melalui pesan *WhatsApp* kepada media, sehingga media tetap mendapatkan informasi terkini tentang Obat dan Makanan serta kinerja pengawasan Badan POM.
2) Selama pandemi COVID-19 penyampaian informasi melalui konferensi pers secara virtual/zoom tetap dilaksanakan, dengan *live Youtube* maupun *live Instagram* bagi yang tidak sempat mengikuti melalui *zoom*.

3) Permintaan informasi melalui wawancara dan/atau *talkshow* tetap dipenuhi walau tidak secara langsung. Permohonan wawancara terutama dari media cetak dan *online,* dipenuhi dengan cara tertulis.

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Kegiatan pertemuan dengan media akan diarahkan pada upaya peningkatan *engagement* media, yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan media *briefing* secara berkala maupun melalui kegiatan media visit.
2) Menyusun *database* media yang akan di-*update* secara berkala untuk memungkinkan penyebaran informasi yang lebih masif kepada media seputar kegiatan strategis Badan POM.

7. Indeks Opini Publik BPOM

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Indeks Opini Publik BPOM	70	66	79,6	120,61	113,71

Realisasi Indeks Opini Publik BPOM pada tahun 2020 adalah sebesar 79,60 dari target sebesar 66, sehingga capaian indikator adalah 120,61 (kategori tidak dapat disimpulkan). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 70, capaian indikator ini adalah 113,71%, sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Indeks Opini Publik BPOM merupakan tingkat sejauh mana masyarakat memandang Badan POM sebagai institusi pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Cara pehitungan Indeks Opini publik BPOM yaitu dihitung berdasarkan nilai kepercayaan dari piramida reputasi yang didukung dengan tingkat *awareness, familiarity, favorability*, dan *advocacy* masyarakat kepada Badan POM. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu:

Nilai interval	Interpretasi Indeks
0 – 25	Sangat buruk
25,1 – 50	Buruk
50,1 – 75	Perlu ditingkatkan
75,1 – 100	Perlu dipertahankan

Survei Opini Publik dilakukan di 34 Provinsi dengan 1.500 responden. Hasil indeks BPOM pada 2020 sebesar 79,60. Artinya masyarakat di 34 provinsi telah percaya pada Badan POM. Jumlah skor ini hanya berbeda kurang lebih 6 poin dari dua survei terbatas sebelumnya 2018 (83,30) dan 2019 (85,20) yang hanya dilakukan pada 500 responden di 5 kota besar di Indonesia.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	65	85,20	131,08	Tidak dapat disimpulkan
2020	66	79,6	120,61	Tidak dapat disimpulkan

Indikator Indeks Opini Publik BPOM pada tahun 2020 merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Realisasi pada tahun 2018 (83,30) dan tahun 2019 (85,20) lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, karena pada tahun 2018 dan 2019 hanya dilakukan survei terbatas pada 500 responden di 5 kota besar di Indonesia. Sedangkan tahun 2020, survei dilakukan di 34 Provinsi dengan 1.500 responden.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penyampaian informasi tentang Obat dan Makanan terutama jika terdapat hoaks gencar dilakukan BPOM, terutama selama pandemi COVID-19, dimana banyak oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan suasana untuk mengeruk keuntungan semata.
2) Penyampaian informasi ini dilakukan melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, *online*, maupun media sosial *official* BPOM.
3) Penjelasan/klarifikasi berita oleh BPOM diamplifikasi oleh berbagai penggiat media sosial seperti influencer dan Blogger melalui dukungan Mafindo (Masyarakat Indonesia Antifitnah) dengan tim Cek Faktanya.

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Menyusun strategi komunikasi publik sebagai acuan dalam mengomunikasikan kinerja Badan POM kepada publik, khususnya di masa pandemi COVID-19.
2) Badan POM secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik

media cetak, elektronik, online, maupun media sosial dengan target menyeluruh di tiap lapisan masyarakat.

3) Meningkatkan sinergi/amplifikasi lebih aktif dan responsif terhadap isu obat dan makanan yang berkembang di media sosial.

8. Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen	3,81	3,70	3,80	102,65	99,69

Realisasi Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen pada tahun 2020 adalah sebesar 3,798 dari target sebesar 3,70, sehingga capaian indikator adalah 102,65% (kategori Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 3,81, capaian indikator ini adalah 99,69%. Apabila dibandingkan dengan target 2023 yaitu 3,78, maka indikator ini sudah mencapai target 2023 yang telah ditetapkan (100,48%), sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, II dan UPT BPOM) di luar Sekretariat Utama terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Utama. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal terhadap layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh di unit kerja dilingkup Sekretariat Utama. Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama.

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen dihitung berdasarkan rumus = $\frac{A+B+C+D+E}{5}$, dimana

A = Indeks kepuasan internal Biro Perencanaan dan Keuangan
B = Indeks kepuasan internal Biro Kerjasama
C = Indeks kepuasan internal Biro Hukum dan Organisasi
D = Indeks kepuasan internal Biro Humas dan DSP

E = Indeks kepuasan internal Biro Umum dan SDM

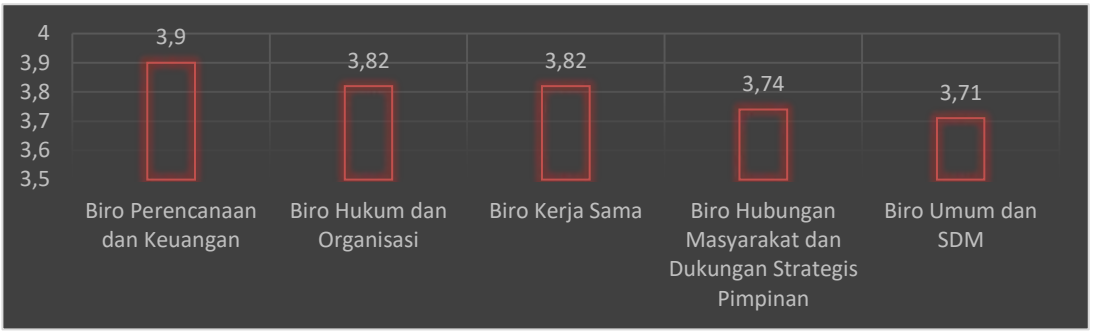

Berdasarkan rata-rata nilai indeks kepuasan internal masing-masing biro diperoleh Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen sebesar 3,80.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tidak ada.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

a) Biro Hukum dan Organisasi

1) Memberikan pelayanan diskusi dan konsultasi terkait Penyusunan peraturan perundang-undangan, Advokasi hukum, Penataan organisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasimelalui daring maupun luring dengan melihat Pengguna layanan publik Biro Hukum dan Organisasi meliputi Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPOM
2) Memberikan layanan dalam rangka audit melalui daring dan luring dalam rangka penerapan dan mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015
3) Melakukan pendampingan saksi/ahli dalam rangka penanganan perkara /kasus kol kesehatanhukum sesuai protocol Kesehatan
4) Mengembangkan sistem evortala.pom.go.id Dalam rangka penilaian unit pelayanan publik BPOM pusat maupun daerah

b) Biro Kerja Sama

1) Mempercepat waktu baku penyusunan naskah Kerja Sama Dalam Negeri pada SOP Makro POM-13.01/CFM.01/SOP.01;
2) Pemuktakhiran aplikasi sistem informasi *database* MoU/Perjanjian Kerja Sama BPOM berbasis website pada tautan kerjasama.pom.go.id dan aplikasi *Export Consultation Desk* (ECD);

3) Penyusunan pedoman delegasi Badan POM, Penyelenggaraan Pertemuan Internasional, dan Penyiapan Bahan Kunjungan Kerja Luar Negeri;
4) Percetakan kompilasi naskah kerja sama dalam negeri;
5) Peningkatan koordinasi yang dilakukan melalui rapat koordinasi internal, komunikasi melalui telepon*, e-mail*, *whatsapp group, zoom meeting*.
6) Peningkatan koordinasi dengan unit teknis terkait dalam rangka penyiapan bahan kunjungan kerja Kepala BPOM ke luar negeri.

c) Biro Perencanaan dan Keuangan
1) penyusunan pedoman/petunjuk teknis dan sosialisasi/bimtek terkait mekanisme perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di unit kerja pusat dan UPT
2) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
3) Layanan diskusi dan konsultasi terkait perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan melalui whatsapp.

d) Biro Humas dan DSP
1) Koordinasi dalam dukungan substansi kegiatan Kepala BPOM dan monitoring serta evaluasi program strategis pimpinan yang melibatkan seluruh unit kerja Pusat.
2) Layanan dalam penyusunan bahan substansi tetap dioptimalkan meskipun terjadi pandemi COVID-19. Hingga triwulan IV Tahun 2020, telah terdapat 888 kumulatif bahan subtansi untuk kegiatan Kepala BPOM.
3) Pelaksanaan layanan monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan berupa penyusunan laporan pemantauan tindak lanjut arahan bulanan dan laporan monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan triwulanan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, telah menyusun 12 laporan pemantauan tindak lanjut arahan bulanan dan 4 laporan monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan triwulanan.
4) Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis Badan POM yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM, terutama yang melibatkan Kepala Badan POM dan Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian dibuat berita aktual dan diunggah ke website BPOM www.pom.go.id, media sosial oficial official Badan POM (Instagram, Funpage-Facebook, Twitter, Youtube), media luar ruang (videotron, videowall, e-kios), serta jika perlu disebarkan ke media.

5) Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang Obat dan Makanan di media cetak, elektronik dan online secara rutin setiap hari kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis Badan POM di daerah. Dua kali setiap hari kerja, dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat menjadi *early warning system* mengenai isu/permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus dari Badan POM.
6) Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di Badan POM melalui berbagai akun official media social Badan POM, baik Instagram, Twitter, Funpage-facebook, maupun youtube.
7) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan UPT BPOM terkait penyiapan dan penyediaan materi KIE Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan IV, telah ditayangkan lebih dari 90 materi infografis dan video melalui media sosial yang berkaitan dengan percepatan penanggulangan COVID-19, 4 materi SMS Blast, penayangan di videotron, buku transformasi herbal Indonesia, penyediaan leaflet dan gimmick serta kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat baik secara langsung maupun daring/virtual
8) Penyampaian kebijakan pelaksanaan KIE di masa pandemi COVID-19 di lingkungan BPOM melalui Surat Edaran Sekretaris Utama serta pemanfaatan *sharing folder* berisikan materi KIE dalam bentuk video dan infografis yang dapat digunakan oleh seluruh unit kerja dan UPT.
9) Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan POM yang merupakan perwakilan dari setiap unit kerja dan UPT melalui Surat Keputusan Sekretaris Utama dan pembuatan media komunikasi melalui WhatsApp Group untuk koordinasi pelaksanaan pengelolaan keterbukaan informasi publik di unit kerja dan UPT.
10) Pemanfaatan *sharing folder* sebagai media bagi unit kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen informasi publik yang dikuasai unit kerja dan UPT untuk dipublikasikan pada subsite PPID.
11) Penguatan koordinasi pengelolaan pengaduan melalui:
    i. Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan yang merupakan perwakilan dari setiap unit kerja dan UPT melalui Keputusan Sekretaris Utama BPOM RI Nomor HK.02.02.22.03.20.07. Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Pengaduan Dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020.

ii. Pembentukan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.81 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasioanal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) BPOM.

iii. Pembuatan media komunikasi melalui WhatsApp Group untuk koordinasi pelaksanaan pengelolaan layanan pengaduan dan informasi.

12) Pengembangan Aplikasi Sistem Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen (Aplikasi Simpel LPK) yang mempermudah tindak lanjut rujukan ke- dan dari unit kerja dan UPT, dokumentasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan layanan pengaduan dan informasi serta elektronisasi formulir permohonan informasi publik melalui PPID.

13) Pemutakhiran informasi pada aplikasi *Knowledge Base Contact Center* (KBCC) secara berkala yang dimanfaatkan sebagai acuan standar jawaban bagi petugas layanan pengaduan dan informasi di UPT.

e) Biro Umum dan SDM

1) Melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan mengadakan *rapid test* dan peningkatan imunitas bagi pegawai di lingkungan Badan POM dengan memberikan berbagai macam multivitamin dan suplemen peningkat imunitas tubuh

2) Melakukan perawatan dan pemeliharaan gedung, kendaraan serta alat pengolah data untuk menunjang tugas dan fungsi, ditambah dengan perawatan tambahan untuk menghindari dan menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan Badan POM

3) Melakukan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan

4) Melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja dan karir pegawai di lingkungan Badan POM

5) Melakukan swab test masal untuk pegawai Badan POM dalam rangka pencegahan Covid-19

6) Pengadaan sarana dan prasarana dalam ranka pencegahan dan penyebaran covid-19 di lingkungan Badan POM seperti pengadaan *faceshield,* APD, penggantian kran cuci tangan menjadi otomatis, access control, thermo scanner, nerbulizer, handsanitizer otomatis, pencucian tangan di halaman kantor Badan POM, penyediaan bahan hand soap dan handsanitizer dan penyemprotan desinfektan setiap minggunya

7) Pembayaran tunjangan kinerja dan penggajian pegawai di lingkup Sekretariat Utama dan Kedeputian sesuai perencanaan
8) Sarana dan prasarana pendukung kinerja SDM yang mampu memfasilitasi kebutuhan pegawai dan fasilitas pelayanan publik serta pengolahan limbah terpadu yang ada di lingkungan Badan POM memiliki konsep ramah lingkungan
9) Pengelolaan BMN terkait ketertiban pencatatan asset serta penggunaan dan pemanfaatannya secara optimal memerlukan komitmen dari seluruh pegawai

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Meningkatkan layanan diskusi dan konsultasi
2) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor
3) Pengembangan aplikasi untuk penyusunan naskah kerja sama dalam negeri, pantauan progres kerja sama dan monitoring evaluasi implementasi kerja sama secara *online*;
4) Pengembangan aplikasi untuk penyiapan informasi kerja sama luar negeri;
5) Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS);
6) Pembuatan panduan penyusunan naskah kerja sama dalam negeri, pantauan progres kerja sama dan monitoring evaluasi implementasi kerja sama secara *online*.
7) Kegiatan terpadu pusat dan balai untuk workshop keprotokolan dan kehumasan serta workshop komunikasi, negosiasi dan diplomasi.
8) Merencanakan pemeliharaan terkait sarana dan prasarana penunjang kinerja pada setiap unit kerja di lingkungan kesektamaan
9) Merumuskan rincian kebutuhan BMN dengan menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedan berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang
10) Melakukan pembinaan unit kerja di lingkungan kesektamaan dalam menyusun perencanaan terkait layanan kepegawaian e-SKP versi
11) Melakukan pengembangan terhadap aplikasi layanan kepegawaian sebagai wadah informasi, pengaduan, konseling, dan pengelolaan kinerja serta karir pegawai

Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, Laporan Kinerja, dan Laporan Keuangan
IKU ***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Memenuhi Standar***	

9. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu dan Memenuhi Standar

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Persentase Dokumen Perencanaan, Pengangaran, Monitoring, Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Memenuhi Standar	100	100	100	100,00	100,00

Capaian Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar pada tahun 2020 adalah sebesar 100 dari target sebesar 100, sehingga capaian indikator adalah 100,00% (kategori Baik). Target indikator ini tetap sama sampai akhir periode Renstra karena seluruh dokumen wajib diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.

Dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan meliputi (1) Renstra/Review Renstra BPOM / Grand Design POM / Kajian Kebijakan dan SK IKU BPOM; (2) Renstra/Review Renstra Settama dan SK IKU Settama; (3) Renja BPOM (tahun n+1); (4) RKT BPOM dan Settama (tahun n+1); (5) Perjanjian Kinerja: BPOM, Settama (tahun n+1); (6) DIPA BPOM tahun n+1/ POK tahun n+1; (7) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1; (8) Laporan Kinerja Sekretariat Utama n-1 / Laporan Kinerja Rorenkeu tahun n-1 (hanya 2020); (9) Laporan Interim BPOM (Triwulanan); (10) Laporan Interim/ Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama (Triwulanan); (11) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1 (unaudited dan audited); (12) Laporan Keuangan

Sekretariat Utama tahun n-1 (unaudited dan audited); (13) Laporan Keuangan BPOM Semester I tahun n; dan (14) Laporan Keuangan Sekretariat Utama Semester I Tahun n.

Cara perhitungan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar yaitu jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen yang diselesaikan/dihasilkan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	100	100	100,00	Baik
2020	100	100	100,00	Baik

Indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar pada tahun 2020 merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Walaupun terdapat perbedaan definisi operasional indikator tahun 2019 dan tahun 2020, realisasi indikator pada tahun 2019 dan tahun 2020 sama.

Pada tahun 2019 dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu meliputi: 1) Renstra BPOM/ Review Renstra/ Kajian Lingkungan Strategis, 2) Renja BPOM tahun n+1, 3) Perjanjian Kinerja BPOM tahun n, 4) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1, 5) Laptah BPOM n-1, 6) Perjanjian kinerja Sektama Tahun n, 7) Lapkin sektama tahun n -1, 8) DIPA BPOM tahun n+1/ POK tahun n+1, 9) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1, 10) Laporan keuangan BPOM semester 1 tahun n, 11) Laporan Keuangan Sektama tahun n-1 dan 12) Laporan keuangan Sektama semester 1 tahun n yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan oleh *deadline* yang diberikan oleh suprasistem terkait.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya

1) Mengembangkan dan mengimplementasikan *e-planning*, Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran (SIPP) dan *e*-performance.

2) Finalisasi Rencana Strategis 2020-2024
3) Mengintegrasikan aplikasi penatausahaan dan pelaporan PNBP dengan aplikasi *web form*, *e-payment* dan layanan publik (yanblik).

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Bimtek SAKIP dan Monev Online
2) Penyusunan Lapkin BPOM, Settama dan Biro Perencanaan dan Keuangan 2019
3) Pertemuan Penyusunan Perencanaan Tahunan
4) Penyusunan Renstra BPOM dan Settama 2020-2024
5) Penyusunan SK IKU BPOM dan Settama 2020
6) Penyusunan RKT BPOM dan Settama Tahun 2021
7) Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Settama Triwulan I, II dan III Tahun 2020
8) Penyusunan Laporan Kinerja Interim BPOM dan Settama Triwulan I dan II Tahun 2020
9) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama (*unaudited dan audited*) tahun 2019
10) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama (*unaudited dan audited*) semester I tahun 2020
11) Koordinasi Penganggaran dengan Lintas Sektor
12) Workshop penganggaran Terpadu Pusat dan UPT BPOM
13) Penyusunan Juklak dan Juknis penganggaran
14) Pengembangan SIPP
15) Integrasi Aplikasi Perencanaan, Penganggaran, keuangan, monitoring dan Evaluasi.
16) Penyusunan Renja BPOM, Perjanjian Kinerja BPOM, Settama dan Rorenkeu tahun 2021
17) Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran secara daring
18) Pelaksanaan Rapat Evaluasi Nasional

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan secara tepat waktu
2) Menyusun dokumen tepat waktu dan sesuai standar
3) Mengintegrasikan aplikasi e-planning dan e-performance dalam satu website

Sasaran 4	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM
IKU ***1. Nilai Pengelolaan BMN*** ***2. Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal*** ***3. Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal***	

10. Nilai Pengelolaan BMN

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Nilai Pengelolaan BMN	88	80	79.00	98.75	89.77

Realisasi Nilai Pengelolaan BMN pada tahun 2020 adalah sebesar 79,00 dari target sebesar 80, sehingga capaian indikator adalah 98,75% (kategori Baik). Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 88, capaian indikator ini adalah 89,77%. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya percepatan agar target tahun 2021-2024 dapat tercapai secara optimal.

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Satker di lingkungan BPOM dinilai mampu mengelola BMN dengan baik apabila dapat melaksanakan hal-hal berikut sesuai ketentuan, yaitu (1) Aspek pengelolaan BMN; (2) Kepatuhan pelaporan BMN; dan (3) Sertifikasi BMN. Sehingga perhitungan Nilai Pengelolaan BMN terdiri dari beberapa indikator pembentuk, yaitu:

1. Nilai aspek pengelolaan BMN sesuai ketentuan terdiri dari (a) Ketepatan waktu dan kelengkapan dalam penyampaian dokumen RKBMN, dengan bobot 25 %; (b) Penggunaan BMN, dengan bobot 25 %; (c) Penghapusan BMN, dengan bobot 25 %; (d) Pemusnahan BMN. dengan bobot 25 %.
2. Nilai Kepatuhan Pelaporan BMN, dihitung terhadap (a) Ketepatan waktu dan kelengkapan dalam penyampaian laporan, dengan bobot 25 %; dan (b) Kualitas

penyajian laporan, dengan bobot 75 %. Kualitas penyajian laporan BMN tingkat K/L dinilai berdasar kelengkapan unsur laporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan Catatan Atas Laporan BMN yang sesuai dengan Laporan Barang serta ketepatan waktu dan kelengkapan dalam penyampaian laporan BMN tingkat K/L. Untuk cara perhitungan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar yaitu jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen yang diselesaikan/dihasilkan

3. Sertifikasi BMN dengan kriteria meliputi Jumlah BMN yang telah bersertifikat hak pakai dan atas nama BPOM, atau *progress* sertifikasi BMN pada BPOM yang bermasalah. Adanya *progress* yang dilakukan dan dilaporkan kepada Pengguna Barang dinilai memenuhi target sertifikasi. Nilai sertifikasi dihitung dengan rumus jumlah luasan bidang tanah yang bersertifikat atau progres sertifikat dibagi dengan total luasan bidang tanah yang dikelola berdasarkan data SIMAK BMN.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	72	77,46	107,58	Baik
2020	80	79.00	98.75	Baik

Indikator Nilai Pengelolaan BMN pada tahun 2020 merupakan indikator lanjutan tahun 2019, tetapi terdapat perbedaan definisi indikator. Capaian tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019.

Pada tahun 2019 terdapat perbedaan definisi Nilai Pengelolaan BMN BPOM yang dihitung berdasarkan nilai aspek pengelolaan BMN sesuai ketentuan yaitu rata-rata Nilai Pemusnahan, Penghapusan Barang Usang/Rusak, dan Penetapan Status Penggunaan BPOM, nilai kepatuhan pelaporan BPOM dan nilai Sertifikasi BMN BPOM.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya

Penyusunan kebijakan terkait pengelolaan BMN di lingkungan Badan POM, update basis data hasil inventarisasi (sensus) BMN dan monitoring tindak lanjut terkait pengelolaan BMN, dan penyusunan kajian terkait manajemen asset.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

Telah dilaksanakan kegiatan pemutakhiran data dalam rangka pengusunan laporan Barang Milik Negara, penalaahan rencana kebutuhan BMN dari masing-masing satuan kerja yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, review pelaksanaan kegiatan inventarisasi BMN yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja dan langkah-langkah tindak lanjutnya serta pendampingan audit interim dan pencegahan covid-19 oleh BPK.

f. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

1) Terdapat tanah yang belum bisa dilakukan sertifikasi karena berhubungan dengan pihak eksternal
2) Pemusnahan yg diajukan oleh satker merupakan barang-barang yang telah lama belum dilakukan pemusnahan
3) Penghapusan dalam keadaan pandemi covid menyebabkan KPKNL kesulitan dalam melakukan penelitian fisik ke lapangan untuk melakukan penilaian.

g. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Mengoptimalkan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara terkait dengan asset yang terdapat di lingkungan Kesektamaan dan laporan sensus Satker Sekretarita Utama
2) Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara secara digital tidak hanya merubah layanan dan pengolahan menjadi online namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan “nilai”
3) Mengganti DO pemusnahan dan sertifikasi
4) Melakukan intervensi pengelolaan BMN terhadap satker

11. Persentase Pengelolaan Sarana Prasarana BPOM yang Optimal

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Persentase Pengelolaan Sarana Prasarana BPOM yang Optimal	86	78	92,9	119,10	108,02

Realisasi Persentase Pengelolaan Sarana Prasarana BPOM yang Optimal adalah 92,90% dari target 78, sehingga capaian indikator adalah 119,10% (Sangat Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 86, capaian indikator ini adalah 108,02%, sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Persentase Pengelolaan Sarana Prasarana BPOM yang Optimal diperoleh dari rata-rata 2 (dua) indikator pembentuk yaitu:

1. Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik

   Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Aspek yang dipergunakan adalah penatausahaan, penggunaan, penghapusan dan pemusnahan.

   - Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah:
     (Total Nilai PSP yang diajukan/Total Aset) x 100%.
   - Persentase penghapusan adalah:
     nilai total penghapusan yang disetujui / total barang rusak berat x 100 %.
   - Persentase Pemusnahan adalah:
     Nilai total pemusnahan / total barang usang atau rusak x 100 %.
   - Pelaporan yang baik adalah kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 (75%) dan tepat waktu (25%).

2. Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar

   merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi karena akan berdampak pada peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal-hal yang terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana meliputi: Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. Standar Sarana dan Prasarana Kantor adalah ukuran baku bangunan kantor, ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. Ruang Kantor adalah ruang yang dapat digunakan untuk beraktifitas pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ruang Penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung. Perlengkapan Kantor

adalah seperangkat alat penunjang kerja bagi pimpinan/pegawai sesuai dengan kebutuhan. Rumah Dinas adalah bangunan gedung beserta kelengkapannya untuk tempat tinggal bagi pejabat tertentu dalam masa tertentu. Kendaraan Dinas operasional jabatan adalah sarana kerja berupa alat transportasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.

Cara perhitungan Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal yaitu:

$$\frac{(A+B)}{2}\ x\ 100\%$$

dimana

A = Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik yaitu Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%) + Persentase penghapusan (20%) + Persentase Pemusnahan (20%) + pelaporan yang baik (40%).

B = Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar = (jumlah sarana dan prasarana yang tersedia/jumlah sarana dan prasarana yang harus dipenuhi sesuai standar) x 100 %

Berdasarkan cara perhitungan tersebut, maka capaian tahun 2020 adalah Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik (88,4%) dan Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar (97,4%), sehingga Persentase Pengelolaan Sarana Prasarana BPOM yang Optimal sebesar 92,9% (119,10% dari target yang ditetapkan).

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tidak ada

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Telah dilakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN pada Satker Sekretariat Utama terkait pemanfaat BMN, penghapusan dan pengadaan BMN
2) Merenovasi ruang kerja dan staf sebagai pemenuhan sarana dan prasaran penunjang kinerja pada lingkungan Satker sektama

3) pengadaan sarana dan prasarana untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 berupa pengadaan tempat cuci tangan, pengadaan kran dengan sesor otomatis pada setia toilet, thermo gun, pergantian tombol panel lift, pengadaan pemeliharaan gedung dan bangunan, alat pengolahan data dan pengelolaan ruang rapat.
4) Telah dilakukan *Coaching clinic* BMN
5) Telah dilaksanakan FGD pengelolaan BMN

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di lingkungan Kesektariatan Utama
2) Melakukan pemutakhiran Daftar Barang Ruangan (DBR) pada Satker Sektama
3) Intensifikasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa
4) Melakukan pendampingan unit kerja dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara
5) Melakukan FGD Pengelolaan BMN, Coaching Clinic dan Pembinaan BMN

12. Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Persentase Pengelolaan ASN yang optimal	87	81	96,34	118,93	110,73

Realisasi persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal adalah sebesar 96,34 dari target 81, sehingga capaian indikator adalah 118,93% (Sangat Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 87, capaian indikator ini adalah 108,02%, sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Indikator persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal diperoleh dari rata-rata 2 (dua) indikator pembentuk yaitu:

1. Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik

   Pengelolaan SDM Badan POM terutama PNS merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang terdiri dari Penyusunan dan penetapan kebutuhan; Pengadaan; Pangkat dan Jabatan; Pengembangan karier; Pola Karier; Promosi; Mutasi; Penilaian Kinerja; Penggajian dan tunjangan; Penghargaan; Disiplin; Pemberhentian; Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; serta

Perlindungan. SDM BPOM adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Badan POM.

Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian Kinerja adalah penilaian prestasi kerja individu yang dihitung dari capaian sasaran kinerja pegawai (60%) dan penilaian perilaku (40%). Kinerja berkriteria minimal baik adalah nilai prestasi kerja PNS Badan POM yang memiliki nilai > 76.

2. Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir

   Pengelolaan SDM Badan POM terutama PNS merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang terdiri dari Penyusunan dan penetapan kebutuhan; Pengadaan; Pangkat dan Jabatan; Pengembangan karier; Pola Karier; Promosi; Mutasi; Penilaian Kinerja; Penggajian dan tunjangan; Penghargaan; Disiplin; Pemberhentian; Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; serta Perlindungan. SDM Badan POM yang ditingkatkan kariernya adalah SDM Badan POM yang diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi baik dalam jabatan struktural maupun dalam jabatan fungsional sepanjang tersedia formasi jabatan. Untuk merencanakan dan mengetahui jumlah SDM Badan POM yang ditingkatkan kariernya, maka Biro Umum dan SDM perlu mengidentifikasi formasi jabatan yang tersedia per tahunnya dengan cara mengidentifikasi jumlah dan jabatan yang lowong dan atau akan lowong. Dengan memperhatikan:

   a. Identifikasi jabatan struktural yang lowong dan atau akan lowong.
   b. Identifikasi pejabat fungsional yang memenuhi angka kredit untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi.
   c. Evaluasi data ABK dan *Bezzeting* SDM BPOM untuk mengetahui jumlah dan formasi jabatan yang tersedia. Prasyarat untuk pemenuhan perencanaan: Lulus uji kompetensi setelah memenuhi angka kredit minimal 70% dari angka kredit kumulatif pada jenjang jabatan yang akan dituju.
   d. Evaluasi data poin 1, 2 dan 3 merupakan rencana SDM BPOM yang ditingkatkan kariernya.
   e. Rekapitulasi jumlah usulan kenaikan jabatan struktural dan atau fungsional.

f. Evaluasi, verifikasi dan hitung jumlah usulan yang dapat diproses kenaikan jabatan struktural dan atau fungsional. SDM BPOM yang dapat diproses kenaikan jabatan struktural dan atau fungsional adalah SDM BPOM yang ditingkatkan kariernya.

Cara perhitungan persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal yaitu:

$$\frac{(A+B)}{2}\ x\ 100\%$$

dimana

A = Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik = (Jumlah SDM yang memiliki nilai prestasi kinerja >76 / Jumlah seluruh SDM Badan POM) x 100%

B = Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir = (Jumlah SDM BPOM yang ditingkatkan kariernya/Jumlah SDM BPOM yang direncanakan untuk ditingkatkan kariernya) x 100%

Berdasarkan cara perhitungan tersebut, maka capaian tahun 2020 adalah Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik (99,94%) dan Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir (92,73%), sehingga persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal sebesar 96,34% (118,93% dari target yang ditetapkan).

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tidak ada

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penyusunan penilaian kualitas prestasi kerja kepala Balai Besar/Balai POM
2) Pengisian jabatan struktural
3) Pembinaan jabatan fungsional
4) Pengangkatan dalam jabatan fungsional
5) Penilaian angka kredit jabatan fungsional
6) Pengelolaan kenaikan pangkat/pensiun pegawai di lingkungan Badan POM
7) Pendampingan, Monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kinerja individu beserta gap kinerja untuk unit Pusat, Balai/Balai Besar POM dan Loka POM

8) Pengangkatan pertama jabatan fungsional yaitu Analis Kebijakan, Perancang undang-undang, PPBJ, Analis Anggaran, Perencana dan Auditor Kepegawaian
9) Penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional melalui inpasing dan pengangkatan kembali

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Sosialisasi penggunaan aplikasi e-SKP versi baru dan pendampingan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2021
2) Monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kinerja individu setiap triwulannya
3) Pengimplementasikan pengelolaan manajemen talenta dalam rangka pengisian jabatan structural
4) Pembinaan jabatan fungsional bagi yang diangkat melalui mekanisme penyesuaian/inpassing dan penyetaraan jabatan
5) Melakukan penyesuaian dan review kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Beban Kerja da Peta Jabatan
6) Melakukan reviu tools dan mekanisme penilaian angka kredit jabatan fungsional Analis SDM Aparatur dan Pranata SDM Aparatur
7) Melakukan integrasi data pegawai secara dua arah (duplex), diharapkan dapat lebih memudahkan dalam proses pengelolaan SDM BPOM terutama pada proses kenaikan pangkat
8) Monitoring progress tindak lanjut usulan peningkatan status CPNS TA 2018 dan 2019

Sasaran 5	**Organisasi Yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran**
IKU ***1. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan*** ***2. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015***	

13. Persentase Unit Organisasi yang Dilakukan Penataan

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Persentase Unit Organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100,00	100,00

Realisasi persentase unit organisasi yang dilakukan penataan pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dari target 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00% (Baik).

Target pada indikator ini tetap sama sampai dengan tahun 2024. Walaupun target 2020-2024 sama, tetapi untuk perhitungan unit organisasi yang dilakukan penataan berbeda untuk setiap tahunnya.

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Unit kerja BPOM terdiri atas 31 unit kerja pusat meliputi 28 unit eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN serta 3 UPT BPOM meliputi 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM. Penataan organisasi dilakukan melalui evaluasi dan analisis untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan proses (tata laksana), dan ketepatan ukuran organisasi, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri PANRB. Penataan organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang mengacu pada kerangka kelembagaan BPOM tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Tahun 2020: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT
- Tahun 2021: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2022: Penataan organisasi UPT
- Tahun 2023: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2024: Penataan organisasi UPT

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang dilakukan penataan yaitu dengan membandingkan Unit Kerja Pusat dan atau UPT yang dilakukan penataan organisasi dengan total Unit Kerja Pusat dan atau UPT. Dari 104 total Unit Kerja Pusat (28 unit eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN) dan atau UPT (33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM), yang sudah dilakukan penataan organisasi sebanyak 104 Unit Kerja Pusat dan atau UPT, sehingga persentase unit organisasi yang dilakukan penataan sebesar 100%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	97,12	-	-
2020	100	100	100,00	Baik

Indikator persentase unit organisasi yang dilakukan penataan pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Akan tetapi berdasarkan baseline data capaian tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penetapan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1002);
2) Penetapan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1003);
3) Penetapan Peraturan BPOM Nomor 23 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1004).
4) Penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM;
5) Penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 tentang Uraian Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan BPOM;
6) Pentapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1151 tentang Uraian Fungsi UPT dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM
2) Evaluasi Kelembagaan berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
3) Pembentukan 3 (tiga) Loka POM baru

14. Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Proses Bisnis sesuai ISO 9001:2015”

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Proses Bisnis Sesuai ISO 9001:2015	100	79	79	100,00	79,00

Realisasi persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 pada tahun 2020 adalah sebesar 79% dari target 79%, sehingga capaian indikator adalah 100,00% (Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 100%, capaian indikator ini adalah 79%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020, belum seluruh unit organisasi menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015. Namun demikan, telah disusun *roadmap* untuk unit organisasi yang belum menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 sehingga pada tahun 2024 dapat terpenuhi 100%.

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Proses bisnis adalah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penerapan proses bisnis BPOM dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) berdasarkan perolehan sertifikat ISO 9001:2015. Penambahan total unit kerja pusat dan UPT berdasarkan pembentukan unit kerja pusat dan UPT baru (dikecualikan untuk perubahan nomenklatur unit kerja), dihitung pada tahun n+2.

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 yaitu dengan membandingkan unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 dengan total unit organisasi. Dari 105 total unit organisasi, yang sudah yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 sebanyak 83 unit organisasi, sehingga persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 sebesar 79%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	60,95	-	-
2020	79	79	100,00	Baik

Indikator Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Proses Bisnis Sesuai ISO 9001:2015 pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Akan tetapi berdasarkan baseline data capaian tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Pelaksanaan surveilan/sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 83 (delapan puluh tiga) Unit Kerja dilingkungan BPOM yang terdiri dari 1 (satu) Manajemen Puncak, 28 (dua puluh delapan), 32 (tiga puluh dua) Balai Besar/Balai POM dan 21 (dua puluh satu) Loka POM.
2) Penerapan Manual Organisasi yang terintegrasi antara ISO 9001:2015 dengan ISO 17025:2017

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Resertifikasi/Surveilan/Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 105 (serratus lima) Unit Kerja di lingkungan BPOM.
2) Pendampingan sertifikasi 19 (sembilan belas) Loka POM dan 3 (tiga) UPT di lingkungan PPPOMN.

Sasaran 6	**Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum**
IKU ***1. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan*** ***2. Persentase Advokasi Hukum yang efektif***	

15. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100,00	100,00

Realiasasi Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 100 dari 100 sehingga capaian indikator adalah 100,00% (Baik). Target indikator ini tetap sama sampai dengan tahun 2024 yaitu 100% karena diharapkan seluruh peraturan perundangan yang disusun dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Walaupun target 2020-2024 sama, tetapi jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun berbeda setiap tahunnya.

Definisi indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh rancangan Peraturan Perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur) dan Rumusan Perjanjian Kerja Sama.
2. Yang dimaksud dengan yang diselesaikan adalah seluruh produk peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dalam tahap:
   a. RUU: Pemberian masukan naskah akademik/RUU/DIM RUU kepada DPR/Pemerintah
   b. RPP/RPerpres/RPermen: Paraf/tandatangan persetujuan Kepala BPOM
   c. Rancangan Peraturan BPOM: Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM
   d. Rancangan Keputusan Kepala BPOM: Penetapan oleh Kepala BPOM
   e. Rumusan Perjanjian Kerja Sama: Penandatanganan Mou/PKS oleh Kepala BPOM dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Cara perhitungan Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah (Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan)/(Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun) x100. Pada tahun 2020, peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sebanyak 268 perUU dari 268 perUU yang disusun, sehingga persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan telah tercapai 100%. Hal ini disebabkan meningkatnya penyusunan kebijakan strategis Kepala Badan POM dengan ditetapkannya Keputusan KBPOM dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama dengan K/L dan *stakeholder* terkait dalam rangka penanggulangan wabah *Corona Virus Disease*-19 (Covid-19).

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	100	100	100,00	Baik
2020	100	100	100,00	Baik

Indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019, walaupun capaiannya 100% di tahun 2019 dan 2020, karena berbeda nomenklatur dan definisi operasional. Pada tahun 2019, indikatornya adalah Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun

dengan membandingkan perundangan-undangan yang selesai disusun terhadap rancangan perundang-undangan yang diterima.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Meningkatkan koordinasi kegiatan tersebut baik internal maupun eksternal. Upaya tersebut telah dilakukan pada tahun 2020.

e. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Proses penyusunan rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan rumusan perjanjian kerja sama yang dilakukan bersama dengan unit teknis pemrakarsa dan unit teknis terkait.
2) Review SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, SOP Penyusunan Keputusan Kepala BPOM, dan SOP Penyusunan Rumusan Perjanjian Kerja Sama di lingkungan BPOM.
3) Monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Optimalisasi pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan.
2) Meningkatkan koordinasi antara Biro Hukum dan Organisasi dengan unit teknis terkait.

16. Persentase Advokasi Hukum yang efektif

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Persentase Advokasi Hukum yang Efektif	86	82	96,43	117,60	112,13

Realisasi Persentase Advokasi Hukum yang efektif pada tahun 2020 adalah sebesar 96,43 dari target 82, sehingga capaian indikator adalah 117,60% (Sangat Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 86, capaian indikator ini adalah 112,13%, sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Advokasi Hukum meliputi:

1. Pemberian Pertimbangan Hukum:

   Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji tuntas dari aspek hukum (*legal due diligence*) dalam rangka pengambilan kebijakan/keputusan di lingkungan BPOM.

   Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris Utama, Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM.

2. Penanganan Perkara Hukum

   Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian sengketa/permasalahan hukum terkait pelaksanaan kebijakan di lingkungan BPOM, baik yang ditangani di dalam maupun di luar pengadilan.

   Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:

   a. Tingkat Pertama
   b. Tingkat Banding
   c. Tingkat Kasasi

   Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari:

   a. Tingkat Pertama
   b. Tingkat Kasasi

   Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama

3. Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli

   Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli merupakan pemberian layanan advokasi hukum bagi saksi/ahli merupakan BPOM dan memfasilitasi *stakeholder* atau unit kerja/UPT BPOM dalam permintaan keterangan saksi/ahli

4. Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum

   Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Cara perhitungan Persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah layanan advokasi yang diselesaikan dibagi permintaan advokasi yang diterima dikali 100%. Pada tahun 2020, layanan advokasi yang diselesaikan sebesar 243 layanan dari 252 permintaan advokasi yang diterima, sehingga persentase Advokasi Hukum yang efektif telah melebihi target tahun 2020 (117,60%) karena penyelesaian perkara padatahun 2020 dapat diselesaikan lebih cepat dari tenggat waktu yang telah dipersiapkan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Indikator Persentase Advokasi Hukum yang efektif pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019, karena berbeda nomenklatur dan definisi operasional. Pada tahun 2019, indikatornya adalah Persentase advokasi hukum yang diselesaikan dengan membandingkan jumlah layanan advokasi yang ditindaklanjuti terhadap jumlah permintaan advokasi yang diterima.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Pertimbangan Hukum
2) Penanganan Perkara Hukum
3) Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli
4) Konsultasi dan Penyuluhan Hukum

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Melakukan mediasi terhadap *stakeholder.* Upaya tersebut telah dilakukan pada tahun 2020.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Meningkatkan Koordinasi Penanganan Kasus/Perkara/Tuntutan Hukum di Lingkungan BPOM
2) Meningkatkan Koordinasi Penanganan Kasus/Perkara/Tuntutan Hukum dengan *Stakeholder* eksternal

Sasaran 7	**Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif**
IKU ***Persentase kerja sama yang efektif***	

17. Persentase kerjasama yang efektif

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Persentase kerjasama yang efektif	90	82	91,67	111,79	101,85

Realisasi Persentase kerjasama yang efektif pada tahun 2020 adalah sebesar 91,66 dari target 82, sehingga capaian indikator adalah 111,78% (Sangat Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 90, capaian indikator ini adalah 101,85%, sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Definisi indikator Persentase kerjasama yang efektif adalah sebagai berikut:

a) Presentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
b) Presentase institusi penerima bantuan yang mengimplementasikan rekomendasi program KSS Badan POM.

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif dilingkup Sekretariat Utama adalah

$$\text{Persentase kerja sama yang efektif} = (A + B)/2$$

Keterangan:

A. Presentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
B. Presentase institusi penerima bantuan yang mengimplementasikan rekomendasi program KSS Badan POM.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah institusi penerima bantuan yang mengimplementasikan rekomendasi Badan POM dibandingkan dengan jumlah institusi yang menerima bantuan kerja sama Teknik dalam skema kerja sama Selatan-selatan (B).

Pada tahun 2020, Persentase kerjasama yang efektif telah melebihi target tahun 2020 karena pencapaian kerja sama dalam dan luar negeri sebesar 65 kerja sama yang telah diimplementasikan dari capaian 78 kerja sama (83,33%) dan telah terdapat 1 (satu) institusi yang telah menerapkan rekomendasi Badan POM yaitu Kementerian Kesehatan

Palestina dari 1 institusi penerima bantuan teknis peningkatan kapasitas Badan POM (100%). Sehingga persentase kerja sama yang efektif sebesar 91,67%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	81	-	-
2020	82	91,67	111,79	Sangat Baik

Indikator Persentase kerjasama yang efektif pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019, karena berbeda nomenklatur dan definisi operasional. Pada tahun 2019, indikatornya adalah Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM dengan membandingkan Jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM. Berdasarkan baseline data pada tahun 2019, indikator tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

a) Melakukan penjajakan kerja sama dengan luar negeri baik secara langsung maupun melalui jalur diplomatik;
b) Memfasilitasi kerja sama terutama dalam mendukung percepatan penanganan COVID-19 seperti kegiatan:
    1) pemasukan bahan baku obat dan obat ;
    2) Inspeksi sarana produksi vaksin ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan evaluasi data uji klinik;
    3) Kunjungan kerja Kepala Badan POM ke Uni Emirate Arab (UEA) dalam rangka percepatan ketersediaan vaksin COVID-19 melalui kerja sama Kimia Farma dengan G-42/Sinopharm;
    4) Pemeriksaan uji COVID-19;
    5) Pelatihan di bidang pengujian PCR COVID-19 melalui kerja sama dengan WHO;
    6) Pelatihan di bidang pengujian obat untuk penanganan COVID-19 melalui kerja sama dengan TGA Australia;

7) Pertemuan Badan POM dengan regulator di negara Turki, Brazil, Chile terkait dengan persiapan pemberian EUA pada vaksin Sinovac;
8) Pertemuan Badan POM dengan lintas sektor dan WHO-GAVI dalam rangka ketersediaan vaksin multilateral COVAX;
9) Pembahasan penjajakan dalam rangka ketersedian vaksin COVID-19 dari beberapa negara seperti Inggris, Turki, Rusia, dan Amerika Serikat.

c) Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional di lingkungan Badan POM;
d) Memfasilitasi Dukungan Badan POM dalam Mendorong Daya Saing UMKM *Go Global*;
e) Pelaksanaan *Virtual* Workshop Kolaborasi Badan Otoritas Obat Negara-negara OKI dalam rangka ketersediaan dan kemandirian Obat dan Vaksin di negara-negara OKI.
f) Pembahasan *Plan of Action* (PoA) kerja sama Badan POM dengan *National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment* (NCEMMDME) Republik Kazakhstan;
g) Pembahasan rancangan MoU antara Badan POM dan Kementerian Kesehatan Palestina serta penyusunan roadmap pembentukan Badan Otoritas Obat dan Makanan Palestina yang *independent*.
h) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui sinergi dengan Tokoh Masyarakat (Anggota DPR).
i) Sosialisasi isu perdagangan obat dan makanan di tingkat internasional.
j) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama dalam negeri.
k) Pelaksanaan Monitoring Kerja Sama Dalam Negeri.
l) Penyelenggaraan Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi terkait isu percepatan obat dan vaksin COVID-19.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

1. Pengembangan aplikasi *database* internal untuk memonitor progres layanan Biro Kerja Sama.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama serta Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama.
3. Peningkatan kompetensi SDM Biro Kerja Sama.
4. Sosialisasi pedoman dan *roadmap* kerja sama kepada unit kerja dan lintas sektor terkait.
5. Peningkatan koordinasi penyiapan bahan kunjungan kerja luar negeri dan dokumen posisi BPOM/Indonesia dalam forum bilateral, regional dan multilateral.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Meningkatkan koordinasi kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri;
2) Memfasilitasi kerja sama dalam rangka peningkatan daya saing dan mendorong ekspor produk UMKM;
3) Sosialisasi aplikasi *Export Consultation Desk* (ECD) kepada pelaku usaha obat dan makanan;
4) Melakukan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama (SIKES) untuk penyusunan naskah dan bahan kerja sama, pantauan progres kerja sama dan monitoring evaluasi implementasi kerja sama secara *online*;
5) Kegiatan terpadu pusat dan balai untuk workshop keprotokolan dan kehumasan serta workshop komunikasi, negosiasi dan diplomasi.

Sasaran 8	**Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama**
IKU ***1. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media*** ***2. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti*** ***3. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama*** ***4. Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama***	

18. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,63	99,59	99,84	100,25	100,21

Realisasi persentase kualitas pemberitaan BPOM di media pada tahun 2020 adalah sebesar 99,84 dari target 99,59, sehingga capaian indikator adalah 100,25% (Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 99,63, capaian indikator ini adalah 100,21%, sehingga perlu direviu kembali target tahun 2021-2024.

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah pemberitaan positif terkait BPOM. Pemberitaan positif yang dimaksud adalah pemberitaan mengenai BPOM di berbagai media cetak, elektronik, dan media online dengan tone netral dan positif. Adapun kategori berita dengan tone positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan kepada BPOM dari pihak lain. Sedangkan kategori berita dengan tone netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan nama BPOM.

Cara perhitungan adalah Persentase yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral terhadap jumlah total berita tentang BPOM dikalikan 100%. persentase kualitas pemberitaan BPOM di media

Pada tahun 2020, jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral sebesar 34.011 berita dari 34.067 jumlah total berita tentang BPOM, sehingga persentase kualitas pemberitaan BPOM di media telah melebihi target tahun 2020 (100,25%) karena BPOM secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, *online*, maupun media sosial.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	87	99,58	114,46	Sangat Baik
2020	99,59	99,84	100,25	Baik

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM di media pada tahun 2020 merupakan indikator lanjutan tahun 2019, dengan perubahan nomenklatur. Pada tahun 2019, indikatornya adalah Rasio Pemberitaan Positif di Media Terhadap Total Pemberitaan Tentang BPOM. Berdasarkan capaian tahun 2019 dan 2020, mengalami peningkatan kualitas berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) BPOM telah menyampaikan informasi mengenai kinerja dan pengawasan yang dilakukan, terutama selama periode triwulan IV pemberitaan dukungan Badan POM

meningkat signifikan karena uji klinik vaksin COVID-19 menyita perhatian masyarakat dan banyak media sedang menunggu kepastian pemberian izin penggunaan darurat vaksin COVID-19.

2) Masa pandemi COVID-19 dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk mengeruk keuntungan dengan peredaran produk ilegal maupun persaingan usaha yang tidak sehat dan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan, BPOM aktif menerbitkan penjelasan/klarifikasi berita yang cepat dikutip berbagai media, antara lain penjelasan mengenai produk metformin, dan status penelitian 14 obat herbal sebagai adjuvant pengobatan COVID-19.
3) Kontribusi aktif BPOM dalam percepatan penanganan COVID-19 dengan intensifikasi berbagai kegiatan baik digitalisasi pelayanan publik, pendampingan/pembinaan UMKM, pengawasan produk di peredaran, maupun edukasi terkait Obat dan Makanan selalu dipublikasikan melalui *website* BPOM dan berbagai akun *official* media sosial BPOM (*Instagram, Twitter, Fanpage-Facebook,* dan *Youtube*) yang saat ini menjadi acuan berbagai media dalam mencari berita.
4) Meski pertemuan fisik dengan media sangat dibatasi, namun BPOM tetap gencar melakukan pertemuan dengan media secara *virtual* untuk menyampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan, yang disertai dengan penerbitan siaran pers.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

1) Penyebaran informasi mengenai kinerja pengawasan BPOM secara rutin kepada media, selain melalui pelaksanaan pertemuan dengan media, juga melalui penyampaian materi-materi kegiatan BPOM yang dilaksanakan tanpa mengundang media.
2) Semakin banyaknya kegiatan BPOM yang melibatkan peran aktif media untuk meliput kegiatan maupun jumpa pers dengan Pimpinan BPOM.
3) Pemberian dokumentasi hasil peliputan kepada media tidak hanya berupa foto, video, dan rekam suara, namun juga materi paparan, siaran pers, sambutan, pointers, maupun data-data yang *up to date*.

Upaya tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun 2020.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Menyusun strategi komunikasi publik sebagai acuan dalam mengomunikasikan kinerja Badan POM kepada publik, khususnya di masa pandemi CVOVID-19.

2) Badan POM secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, *online*, maupun media sosial.
3) Melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media dan analisis berita secara lebih intensif, sebagai *early warning* potensi isu untuk menjaga bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

19. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,8	99	99,47	100,48	99,67

Realisasi Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2020 adalah sebesar 99,47% dari target 99%, sehingga capaian indikator adalah 100,48% (Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 99,8%, capaian indikator ini adalah 99,67%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar capaian tahun 2024 tidak melebihi target yang ditetapkan.

Definisi indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah Layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah layanan pengaduan dan informasi yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan *feedback* kepada masyarakat.

Cara perhitungan Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan pengaduan dan informasi dikali 100%.

Pada tahun 2020, Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 19.587 layanan dari 19.691 layanan pengaduan dan informasi yang diterima, sehingga persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti telah melebihi target tahun 2020 (100,48%). Hal ini dapat tercapai karena dukungan dari SDM yang berkompeten dan meningkatnya kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Indikator Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019, karena berbeda nomenklatur dan definisi operasional.

Pada tahun 2019, indikatornya adalah Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung dengan membandingkan jumlah laporan layanan pengaduan dan informasi Masyarakat yang dijawab langsung terhadap data jumlah seluruh layanan.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Peningkatan kompetensi pelaksana layanan melalui seminar, bimtek, *knowledge sharing forum* terkait regulasi/kebijakan terbaru yang ada di Badan POM, pengetahuan terkait isu obat dan makanan, informasi pelayanan publik selama pandemi COVID-19 sehingga mampu menyelesaikan layanan tanpa proses rujuk.
2) Penguatan koordinasi penyelesaian layanan melalui:
    i. Pembentukan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.81 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasioanal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) BPOM.
    ii. Keputusan Sekretaris Utama BPOM No. HK.02.02.2.22.03.20.07 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020.
    iii. Keputusan Sekretaris Utama BPOM No. HM.06.2.25.04.20.10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan POM.
3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian layanan oleh unit kerja dan UPT secara berkala
4) Pembaruan informasi pada Aplikasi *Knowledge Based Contact Center* (KBCC) secara berkala sebagai sumber informasi yang lengkap dan terkini bagi petugas layanan.

5) Pengembangan aplikasi penunjang layanan yang dapat mendukung monitoring dan evaluasi penyelesaian layanan.
6) Melakukan pemutakhiran informasi publik pada subsite https://ppid.pom.go.id/ dan melakukan pengumpulan informasi publik yang dimiliki oleh unit kerja pusat dan UPT.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

1) Melakukan *review* terhadap penetapan *Service Level Agreement* (SLA) tindak lanjut penyelesaian pengaduan di BPOM dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2) Membangun *enggagement* Tim Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan.
3) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelesaian layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan setiap triwulan ke pimpinan termasuk rapor unit kerja sebagai penindak lanjut rujukan.
4) Pengembangan aplikasi penunjang layanan yang dapat mendukung *monitoring* dan evaluasi penyelesaian layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan.

Walaupun indikator tahun 2020 bukan merupakan lanjutan tahun 2019, rekomendasi tahun 2019 telah dilakukan sebagai upaya untuk mencapai indikator tahun 2020.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Meningkatkan kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan dengan melakukan pembentukan dan pelaksanaan koordinasi intensif dengan Tim Koordinasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2021 dan Tim PPID Pelaksana di Lingkungan Badan POM Tahun 2021.
2) Pemutakhiran *Knowledge Base Contact Center (KBCC)* sebagai pedoman bagi petugas layanan dalam memberikan jawaban
3) Melaksanaan peningkatan kompetensi petugas melalui *knowledge sharing forum* dan keikutsertaan pada berbagai pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh unit kerja sehingga layanan dapat diselesaikan lebih cepat tanpa proses rujuk.
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan
5) Pengembangan aplikasi penunjang layanan yang dapat mendukung *monitoring* dan evaluasi penyelesaian layanan.

6) Melakukan pemutakhiran informasi publik pada subsite https://ppid.pom.go.id/ dan melakukan pengumpulan informasi publik yang dimiliki oleh unit kerja pusat dan UPT

20. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama	96,32	88,98	91,00	102,27	94,48

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama pada tahun 2020 adalah sebesar 91 dari target tahun 2020 sebesar 88,98, sehingga capaian indikator adalah 102,27% (Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 96,32 capaian indikator ini adalah 94,48%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar capaian tahun 2024 tidak melebihi target yang ditetapkan.

Definisi indikator Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama adalah Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, atau media lainnya. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan melalui kegiatan KIE yang dilaksanakan.

Cara perhitungan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama adalah Indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama yang diperoleh berdasarkan hasil survei kepada penerima KIE yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama.

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif
85,01 - 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

Pada tahun 2020, capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama adalah 91 sehingga masuk dalam kategori **Sangat Efektif**.

Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

a. Pengambilan data survei pada triwulan II, III, dan IV tahun 2020 dilakukan pada kurun waktu yang tidak terlalu lama dari pelaksanaan kegiatan KIE sehingga masyarakat masih mampu mengingat dengan baik materi KIE maupun penjelasan yang disampaikan/diperoleh dari pelaksana KIE. Sampai dengan triwulan IV ini, Selain kegiatan KIE yang dilaksanakan secara daring dan memaksimalkan pemberian edukasi melalui media sosial *official* serta UPT, hal sesuai dengan Surat Edaran Plt. Sestama Nomor HM. 11.02.2.25.03.20.22 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Sebagai Dukungan Dan Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), BPOM dan UPT juga meaksanakan kegiata KIE tatap muka dan pemberian produk informasi kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sejak dimulainya masa *new normal*. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat di daerah, pembatasan jumlah peserta dan dengan pelaksanaan kegiatan yang tetap memperhatikan penerapan protocol Kesehatan secara ketat.
b. Sampai dengan triwulan IV, Kontribusi terbesar pencapaian target indeks efektivitas berasal dari indikator "**Manfaat**" dengan indeks sebesar **92,18**. Indikator "Manfaat" ini adalah penilaian masyarakat terhadap manfaat yang mereka peroleh setelah mengikuti kegiatan KIE dari unit di Sekretariat Utama BPOM yaitu Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan. Kemudian diikuti kontribusi dari indikator "**Pemahaman**" dengan indeks sebesar **91,69.** Indikator pemahaman ini menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima setelah mengikuti kegiatan KIE.

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama	TW	Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	Indeks 2020
	TW 2	89.3	96.28	93.92	89.86	93.43
	TW 3	85.3	83.1	88.19	86.81	86.24
	TW 4	89.95	95.68	94.42	88.57	93.33
	s/d TW 4	88.18	**91.69**	**92.18**	88.41	**91.00**

c. Hampir semua media yang digunakan dalam pelaksanaan KIE oleh Sekretariat Utama BPOM dinilai **efektif** (range 75,01 - 85,00) dan **sangat efektif** (range 85,01 - 95,00) oleh responden seperti terlihat pada grafik berikut. Hanya KIE melalui transportasi

umum yang dinilai cukup efektif namun KIE melalui **bioskop** yang dinilai **kurang efektif**. Sampai dengan triwulan 4 ini, masyarakat menilai bahwa KIE melalui CFD, Televisi, Virtual/Webinar, brosur, majalah, koran, dan penyuluhan merupakan media paling efektif diikuti KIE melalui pameran dan media *online*. Penilaian masyarakat terhadap KIE tatap muka baik melalui secara luring seperti KIE di area CFD, penyuluhan, pameran maupun daring seperti webinar mendapatkan nilai tinggi. Pada KIE ini terdapat interaksi lebih personal dengan peserta/pengunjung berupa layanan konsultasi Obat dan Makanan melalui *booth* BPOM baik pada Mobil HaloBPOM yang dihadirkan di area CFD maupun pada *booth* pameran. Peserta/pengunjung pun tidak dibatasi waktu konsultasi/layanan sehingga kebutuhannya akan informasi Obat dan Makanan dapat terpenuhi. Pada KIE secara virtual seperti webinar juga disediakan sarana untuk bertanya kepada narasumber melalui kolom chat, pemberian kuis untuk menggali pemahaman peserta pada materi serta akses materi berupa paparan atau video edukasi yang baik, mudah diakses, dan dapat disebarluaskan secara mandiri oleh masyarakat.

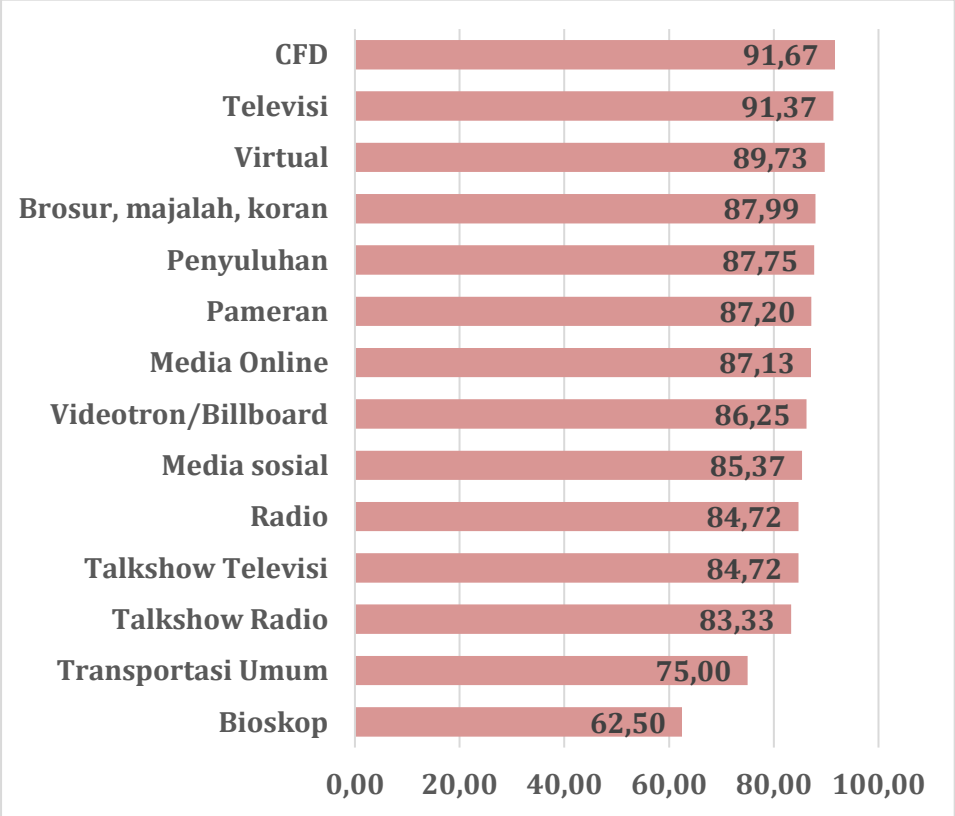

Gambar 9. Grafik Tingkat Efektivitas Obat dan Makanan Berdasarkan Media KIE sampai dengan Periode Triwulan IV tahun 2020

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	69,09	-	-
2020	99,59	99,84	100,25	Baik

Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Akan tetapi berdasarkan baseline data pada tahun 2019, realisasi indikator ini telah mencapai 69,09, sehingga dapat terlihat peningkatan kinerja yang signifikan.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penyebaran informasi melalui media sosial *official* Badan POM terkait informasi Obat dan Makanan aman serta informasi pencegahan penularan, pengobatan, dan program vaksinasi COVID-19.
2) KIE kepada generasi milenial yaitu pada kegiatan kunjungan mahasiswa pada 10 Januari 2020 dalam rangka kegiatan Joint International Outing (JIO). JIO merupakan kegiatan Mini *Students Exchange Programme* yang dilaksanakan oleh ISMAFARSI (Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia) dan bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Farmasi Universitas Indonesia. Peserta kegiatan ini adalah mahasiswa farmasi dari Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia dengan jumlah ± 60 orang mahasiswa beserta dosen pendamping.
3) KIE kepada generasi milenial (90 orang siswa SMP dan SMA) dan pengajar di Sekolah Alam Cikeas Gunung Putri, Bogor pada 29 Januari 2020 mengenai hoaks Obat dan Makanan, penggunaan aplikasi BPOM *Mobile*, dan pemanfaatan media sosial *official* BPOM sebagai peningkatan literasi generasi muda. Pada KIE ini juga dihadirkan mobil HaloBPOM yang dikunjungi oleh +/- 100 orang dari siswa kelas 1-6 SD.
4) Pelaksanaan pameran mini pada acara *Open House* dalam rangka HUT Badan POM pada tanggal 18 Februari 2020 yang dilaksanakan di aula gedung C. Pada kegiatan yang dihadiri lintas sektor, masyarakat umum, perwakilan asosiasi dan organisasi profesi serta *blogger* dan media ini menyediakan sarana konsultasi dan panduan pengecekan legalitas Obat dan Makanan melalui berbagai aplikasi yang disediakan BPOM.

5) Pelaksanaan pameran virtual pada Pekan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia (PIT IAI) dan Hari Konsumen Nasional yang dilaksanakan pada November 2020. Pada pameran ini booth virtual menyediakan file dan video informasi dan edukasi Obat dan Makanan serta menyediakan *live chat* bagi pengunjung pameran virtual.
6) KIE melalui Lomba Vlog dengan tema: "Aku #BanggaBuatanIndonesia" yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2020. Lomba ini bertujuan menggali kreativitas dan menggaungkan "Bangga Buatan Indonesia" terutama terkait dengan Obat dan Makanan sebagai bentuk nasionalisme dan dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Selain itu sebelumnya telah dilaksanakan lomba vlog "Yuk Jadi Generasi Cerdas Tangkal Hoaks Obat dan Makanan" yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020. Pada lomba ini peserta sebelumnya diberikan stimulus berupa tema dan sumber bahan yang dapat dijadikan sebagai konten materi vlog. Lomba ini meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan "Satu langkah mudah untuk saling menjaga, teliti informasi sebelum membagikannya".
7) KIE kepada generasi milenial yaitu pada kegiatan kunjungan siswa SMP Yayasan Guang Ming pada 28 Februari 2020. Pada kegiatan ini siswa mendapatkan materi tentang Bahan Berbahaya Pada Pangan dan Kenali Obat Cegah Penyalahgunaannya.
8) Penyebaran Leaflet Cek Klik (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa), leaflet HaloBPOM dan Booklet Transformasi Herbal pada Pameran Herbal yang diselenggarakan di JIEXPO pada Januari 2020 yang dikunjungi oleh stakeholder Badan POM serta masyarakat umum.
9) Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan secara daring dengan tema "Hidup Sehat dengan Obat dan Makanan Aman di Tengah Pandemi Covid-19" yang dilaksanakan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan penularan COVID-19. KIE ini dilaksanakan kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan maupun masyarakat agar tetap menjalankan perannya masing-masing dalam memastikan obat dan makanan aman, berkhasiat dan bermutu. Selain kegiatan ini, Badan POM juga diminta sebagai narasumber pada kegiatan yang terkait dengan edukasi dalam upaya percepatan penanganan COVID-19.
10) Pelaksanaan KIE talkshow "Infodemik: Bahaya Isu Obat dan Makanan di Tengah Pandemi" pada 18 Desember 2020 secara luring dan daring. Talkshow ini ditayangkan secara live di akun Youtube Badan POM dan diikuti generasi muda kalangan pelajar, mahasiswa, pemuda pemudi Indonesia, perwakilan organisasi

masyarakat/profesi, perwakilan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta jajaran pegawai Badan POM baik pusat, Balai Besar/Balai POM dan Loka POM di seluruh Indonesia.

11) BPOM juga meluncurkan beberapa buku yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, tenaga kesehatan serta masyarakat, yaitu Buku Tips Keamanan Pangan Edisi Ramadan + Tips Khusus Mencegah COVID19, Buku Serba COVID, Cegah COVID-19 Sehat Untuk Semua, Komik Kaka dan Kiki "Hidup Sehat, Lawan COVID-19" Buku Pedoman Rekomendasi tentang Pengawasan Penggunaan Plasma Konvalesen dan Imunoglobulin Konsentrat dalam terapi COVID-19; serta Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu Pengolahan Plasma Konvalesen COVID-19. Buku dalam bentuk digital/*e-book* ini juga disebarkan kepada peserta KIE daring dan ditayangkan di media sosial serta diviralkan melalui whatsapp, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pada buku tersebut.
12) Pembuatan video motiongrafis "Hidup Sehat, Cegah COVID-19" yang berisi tentang tips menjaga daya tahan tubuh dan menggunakan Obat dan Makanan aman untuk mencegah penularan COVID-19, an video ""Badan POM, Bakti Untuk Negeri" sebagai bentuk kehadiran Badan POM di tengah masyarakat, dan Video Animasi Kaka dan Kiki "Hidup Sehat, Lawan COVID-19" dengan sasaran penyebaran untuk komunitas sekolah.
13) Penyampaian pesan singkat melalui SMS *Blast* kepada peserta KIE BPOM. Isi pesan singkat terkait dengan penggunaan Obat, Pangan, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan pada masa pandemi COVID-19.
14) Pencetakan Materi Cek Klik Sebelum Belanja, Ayo Buang Sampah Obat, dan materi penerapan protokol kesehatan Menggunakan Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan (3M) pada body mobil antar jemput pegawai BPOM. Kendaraan ini akan melintasi beberapa jalan utama di Jabodetabek sehingga menjadi media edukasi bergerak.
15) Pelaksanaan kegiatan KIE langsung dibatasi di masa pandemi COVID-19 sehingga dilakukan pengalihan pelaksanaan kegiatan KIE melalui media sosial (Instagram, Twitter, Fan Page, Youtube) - BPOM *Official*, dan subsite ulpk.pom.go.id untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi tentang Obat dan Makanan aman serta meningkatkan daya tahan tubuh dalam mencegah penularan COVID-19.
16) Setelah memasuki era new normal dan dengan pelaksanaan yang selektif dengan penerapan protocol kesehatan secara ketat, dilaksanakan KIE tatap muka bekerjasama dengan tokoh masyarakat di Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan

dalam bentuk tatap muka dengan pembatasan peserta di 10 lokasi serta pembagian goody bag berisi produk informasi Obat dan Makanan di 14 lokasi yang melibatkan 14.000 peserta penerima goodybag.

17) Penyebaran informasi publik melalui subsite ppid.pom.go.id, ulpk.pom.go.id, dan media sosial twitter PPID.

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Melakukan intensifikasi kegiatan KIE Obat dan Makanan dalam mendukung percepatan penanganan COVID-19 dalam berbagai bentuk dan media
2) Menyusun pedoman pelaksanaan KIE Obat dan Makanan
3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksaan KIE yang dilaksanakan

21. Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,51	3,91	4,48	114,58	99,33

Realisasi Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama pada tahun 2020 adalah 4,48 dari target 3,91, sehingga capaian indikator adalah 114,58% (Sangat Baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 4,51, capaian indikator ini adalah 99,33%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar capaian tahun 2024 tidak melebihi target yang ditetapkan.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat. Definisi indikator Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama adalah:

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan unit organisasi berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
   a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
   b. Profesionalitas SDM (18%);
   c. Sarana Prasarana (15%);

d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
f. Inovasi (7%).

2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
3. IPP dilingkup Sektama diperoleh dari IPP Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dibawahnya dengan mengukur 6 aspek yang disebut pada poin 1.
   a. Cara perhitungan Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama dilingkup Sekretariat Utama adalah Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
   b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian kinerja internal UPP di lingkungan BPOM dilakukan secara daring menggunakan aplikasi evortala.pom.go.id. Kegiatan ini dimulai dengan entry meeting tanggal 17 Juli 2020 dengan narasumber perwakilan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB dan diakhiri dengan exit meeting tanggal 3 Agustus 2020. Kedua meeting ini dihadiri oleh seluruh UPP BPOM secara virtual.

Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.20.111 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2020. UPP yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) terbaik dengan kategori Pelayanan Prima atau >4,50 dari skala 5,00 berdasarkan penilaian internal akan ditunjuk sebagai perwakilan BPOM untuk diusulkan sebagai lokus evaluasi pelayanan publik K/L yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai kinerja UPP, bahwa Indeks Pelayanan Publik dilingkup Settama telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian **4,48 (114,58%)** dengan kategori **sangat baik,** akan tetapi settama belum dapat diusulkan sebagai lokus evaluasi pelayanan publik K/L.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	3,80	-	-
2020	3,91	4,48	114,58	Sangat Baik

Indikator Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Akan tetapi berdasarkan baseline data, capaian tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:
   a) Aspek kebijakan pelayanan
      i. Melakukan penyusunan standar pelayanan pengaduan dan informasi yang terdiri dari 14 komponen pelayanan.
      ii. Melakukan review dan perbaikan standar pelayanan pengaduan dan informasi pada Peraturan Kepala Badan POM No.27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM.
      iii. Pelaksanaan dan publikasi Survei Kepuasan Masyarakat
      iv. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
      v. Publikasi maklumat pelayanan Sekretariat Utama melalui berbagai media.
      vi. Penyusunan Rancang Bangun Penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Badan POM 2020-2024
   b) Aspek Profesionalisme SDM
      i. Peningkatan kompetensi *softskill* maupun *hardskill* petugas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Peningkatan kompetensi dilakukan

melalui pelaksanaan knowledge sharing forum secara berkala, partisipasi dalam sosialisasi peraturan/kebijakan/isu terkini di BPOM, pendampingan *coaching* dan *mentoring* dalam pelaksanaan pelayanan.

ii. Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! pada 28 September 2020.

iii. Penyusunan dan implementasi Keputusan tentang Pemberian Penghargaan (Reward), Sanksi (Punishment), dan Kompensasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.

c) Aspek Sarana Prasarana

Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik bersama di lingkungan BPOM.

d) Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

i. Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional website https://sipp.menpan.go.id/.

ii. Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Sekretariat Utama pada subsite https://ulpk.pom.go.id.

e) Aspek Konsultasi dan pengaduan

Penyediaan dan publikasi berbagai media layanan konsultasi dan informasi, baik secara offline maunpun online melalui media sosial dan website.

f) Aspek Inovasi

Pengembangan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik

2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala.

e. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Melaksanakan rencana tindak lanjut terhadap pemenuhan aspek penilaian yang masih kurang
2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut

Sasaran 9	**Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sektama yang Optimal**
IKU ***1. Indeks RB Sekretariat Utama*** ***2. Nilai AKIP Sekretariat Utama***	

22. Indeks RB Sekretariat Utama

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Indeks RB Sekretariat Utama	95	85	73,75	86,76	77,63

Realisasi Indeks RB Sekretariat Utama pada tahun 2020 adalah sebesar 73,75 dari target 85, sehingga capaian indikator adalah 86,76% (Cukup). Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 95, capaian indikator adalah 77,63%. Dengan demikian, diperlukan upaya khusus dan strategi percepatan agar target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Cara perhitungan Nilai RB Sekretariat Utama adalah dengan penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil. Nilai RB Sekretariat Utama tahun 2020 diperoleh dari rata-rata nilai per komponen hasil evaluasi PMPZI Biro-Biro di Sekretariat Utama sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Capaian Tahun 2020
A	**Komponen Pengungkit**	**60%**	33.34
1	Manajemen Perubahan	5%	4.31
2	Penataan Tatalaksana	5%	3.64
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%	5.25
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	7.76
5	Penguatan Pengawasan	15%	6.89
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	5.49
B	**Komponen Hasil**	**40%**	38.22
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%	19.55
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%	18.67
	Nilai RB Sekretariat Utama	**100%**	**71.56**

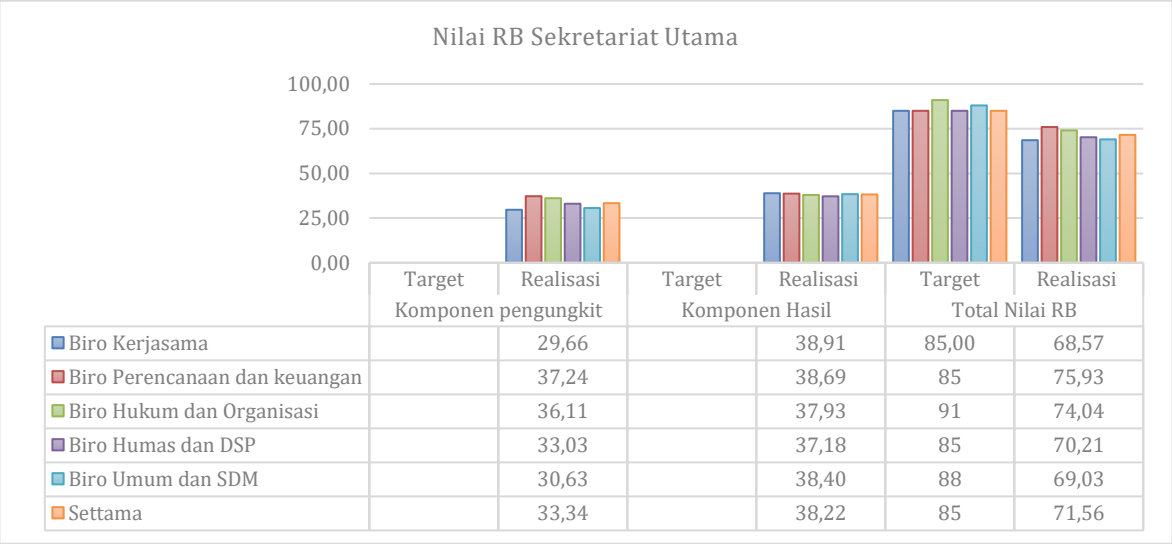

	Komponen pengungkit		Komponen Hasil		Total Nilai RB	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Biro Kerjasama		29,66		38,91	85,00	68,57
Biro Perencanaan dan keuangan		37,24		38,69	85	75,93
Biro Hukum dan Organisasi		36,11		37,93	91	74,04
Biro Humas dan DSP		33,03		37,18	85	70,21
Biro Umum dan SDM		30,63		38,40	88	69,03
Settama		33,34		38,22	85	71,56

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Indikator Indeks RB Sekretariat Utama pada tahun 2020 pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	Satker	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Kedeputian III	88	**84,02**	95,48	Baik
2	Ittama	91	**83,57**	91,83	Baik
3	Kedeputian II	85	**80,58**	94,80	Baik
4	Kedeputian I	83	**79,40**	95,66	Baik
5	Settama	85	**73,75**	86,76	Cukup
6	Kedeputian IV	85	**71,16**	83,72	Cukup

Apabila dibandingan dengan realisasi Indeks RB di Eselon I di lingkungan BPOM, maka capaian indikator Indeks RB Settama berada pada peringkat kelima.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

a) Manajemen Perubahan

1) Mengembangkan dan penguatan nilai-nilai untuk peningkatan komitmen dan implementasi perubahan melalui survey opini pegawai dan pembentukan tim reformasi birokrasi kesektamaan
2) Penguatan nilai integritas melalui penyusunan roadmap dan rencana aksi RB ditingkat kesektamaan yang terintegrasi dan selaras dengan rencana strategis sektama

3) Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan di lingkungan kesektamaan melalui pengawalan rencana aksi dan pengembangan kompetensi agen perubahan
4) Sosialisasi dan internalisasi dalam rangka perubahan mindset pegawai dalam rangka peningkatan *anggement* di lingkungan kesektamaan
5) Menggerakkan seluruh pegawai sebagai *agent of change*;

b) Penataan tatalaksana
1) Pelaksanaan reviu proses bisnis di lingkup Sekretariat Utama yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 02.02.1.2.03.20.96 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) ISO 9001:2015 BPOM.
2) Pelaksanaan audit surveilan dan sertifikasi QMS ISO 9001:2015 pada tanggal 6 Agustus 2020, berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-OT.02.2.22.08.20.431 tanggal 6 Agustus perihal Pelaksanaan Audit Surveilan QMS ISO 9001:2015 dilaksanakan audit surveilan untuk Unit Kerja di lingkup Sekretariat Utama
3) Pelaksanaan evaluasi implementasi proses bisnis melalui Audit Internal ISO 9001:2015 yang diintegrasikan dengan ISO 17025:2017 di lingkup Sekretaris Utama
4) Pelaksanaan integrasi E-tukin dengan input data e-presensi dan tapping data (WFO) di lingkup Sekretraiat Utama
5) Pelaksanaan proses alih media arsip vital dan arsip terjaga
6) Penomoran surat di lingkup Sekretaris Utama dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIPANDA
7) Implementasi SIKD telah dilakukan untuk seluruh Unit Kerja di lingkup Sekretaris Utama
8) Telah dibentuk Tim Koordinasi PPID melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HM.06.2.25.04.20.10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PPID di Lingkungan BPOM tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020
9) Telah dilakukan perluasan media publikasi informasi publik selain website, juga dilakukan melalui media sosial, media informasi digital (ekiosk, videowall,videotron), media cetak, dan majalah POM.
10) Berdasarkan rekomendasi hasil monev keterbukaan informasi badan Publik tahun 2019 yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat, maka diterbitkan 7 (tujuh) SOP layanan PPID secara terpisah.

11) Pengembangan Subsite Biro Kerja Sama dan Aplikasi Export Consultation Desk (ECD)

c) Penataan Sistem Manajemen SDM

1) Rencana redistribusi pegawai telah dilakukan untuk mengisi formasi pada UPT baru dan redistribusi pada fungsi pengujian, TU, pemeriksaan, infokom dan penindakan.
2) Proyeksi Kebutuhan pegawai 2020-2024 dalam tahap penyusunan melalui tahapan Sosialisasi dan Sinkronisasi data penyusunan kebutuhan PNS serta Desk mengenai data ABK unit kerja Pusat dan UPT
3) Penyusunan peta jabatan Tahun 2020 dan data perhitungan kebutuhan PFM seluruh unit kerja teknis
4) Proses penerimaan pegawai CPNS Tahun 2019 dengan transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN
5) Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilakukan secara terbuka yaitu seleksi terbuka JPT Pratama Kepala PRKOM dan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
6) Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu, pemberian reward pegawai berprestasi dan punishment kepada pegawai yang melanggar disiplin
7) Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdaarkan penilaian prestasi kerja triwulanan, pemberian tukin triwulan I Tahun 2021 didasarkan pada penilaian triwulan IV Tahun 2020, dst
8) Monitoring dan evaluasi terhadap penilaian triwulanan yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya.
9) Pembahasan penegakan disiplin melalui rapat Komite Pertimbangan Kode Etik dan Kode Perilaku untuk membahas tindak lanjut terhadap kasus-kasus disiplin yang terjadi.
10) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi.
11) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan seperti e-skp, e-tukin, SISFO dan pelaporan SIAP.

d) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait finalisasi rancangan Renstra BPOM 2020-2024 termasuk terkait kesettamaan

2) Rakorpim penetapan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPOM 2020-2024 termasuk didalamnya terkait Sekretariat Utama
3) Mengesahkan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024
4) Penyusunan IKU Sekretariat Utama 2020-2024
5) Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020
6) Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021
7) Bimtek SAKIP dan Monev Online Tahun 2020, yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan Balai Besar/Balai POM untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola data menginput aplikasi monev online dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
8) Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2019
9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja di lingkup Sekretariat Utama Triwulan I s.d IV Tahun 2020 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
10) Penyusunan Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama dan Biro-Biro Triwulan I s.d IV Tahun 2020
11) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan I s.d III Tahun 2020
12) Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2020
13) Integrasi Aplikasi Perencanaan, Penganggaran, keuangan, monitoring dan Evaluasi.
14) Pembahasan Juknis Anggaran 2020 ruang lingkup Kegiatan Sekretariat Utama
15) Penyusunan RKA-K/L Sekretariat Utama tahun 2021
1) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan
2) Pemutahiran data e-PNBP dilakukan setiap bulan melalui Rekonsiliasi data penerimaan
3) Penyusunan Dashboard Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
4) Pemantauan Kinerja Individu (Monev SKP setiap TW) di lingkungan Sekretariat Utama

e) Penguatan Pengawasan
1) Sosialisasi oleh masing masing unit kerja di lingkup Settama melalui banner larangan menerima/pemberian gratifikasi
2) Laporan Pengendalian Gratifikasi dari masing masing Unit Kerja lingkup Settama Triwulan I 2020

3) Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM EPITE) dari Unit Unit Kerja di lingkup Settama.
4) Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko dengan penerapan sistem three line of defense. Proses penilaian risiko dilaksanakan bersamaan dengan audit internal sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi SPIP - Manajemen Risko dan SNI ISO/IEC 17025:2017
5) RTM masing-masing unit di lingkungan Settama
6) Monitoring dan evaluasi Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara berkala
7) Laporan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020
8) Sosialisasi Whistle blowing system (WBS) melalui banner WBS unit unit di lingkungan sektama
9) Laporan Potensi Benturan Kepentingan di unit unit kerja lingkup Settama
10) Dokumen penandatanganan pakta integritas.

f) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup sektama tahun 2020
2) Penyusunan Rancang Bangun Penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020-2024.
3) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup sektama tahun 2020 secara berkala periode triwulan
4) Pelaksanaan review dan revisi standar pelayanan publik di lingkungan sektama yaitu:
   i. Peraturan Badan POM Peraturan BPOM No. 27 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, yang terkait layanan publik di lingkup Sekretariat Utama
   ii. Keputusan Kepala BPOM nomor HK.04.01.23.04.16.1769 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Pengaduan Konsumen di Lingkungan Badan POM
5) Penetapan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Utama yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Unit Kerja.
6) Penetapan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna

layanan serta kompensasi bagi pengguna pelayanan dalam bentuk keputusan kepala unit kerja.

7) Keterhubungan pelayanan publik di lingkungan sektama dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPPN)
8) Integrasi seluruh pelayanan publik di lingkup sektama pada SP4N-LAPOR! dimana pejabat penghubung di setiap unit kerja telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.02.20.81 tahun 2020 tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9) Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama
10) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan sektama secara elektronik setiap triwulan dan hasil survei dipublikasikan pada berbagai media.
11) Penyusuan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020.
12) Pelaksanaan evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
13) Partisipasi unit kerja di lingkungan sektama dalam Kompetisi Inovasi pelayanan Publik baik yang dilaksanakan diinternal BPOM ataupun oleh KemenPANRB
14) Partisipasi dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kategori *Outstanding Achievement* Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB dan berhasil meraih TOP 46 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2020 Kategori Outstanding Achievement.
15) Partisipasi dalam Kompetisi *The Best Contact Center* Indonesia 2020 yang diselenggarakan oleh Indonesia *Contact Center Association* (ICCA) dan berhasil meraih:
    a. Platinum medal kategori Best of the Best Agent Inbound
    b. Gold medal kategori The Best Agent Digital
    c. Bronze medal kategori The Best Agent Inbound Publik
    d. Bronze medal kategori The Best Back Office
    e. Silver medal kategori Smart Teamwork
16) Partisipasi dalam Pemeringkatan Raksa Nugraha – *Indonesian Consumer Protection Award* 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen

Nasional (BPKN) dan berhasil meraih Anugerah Raksa Nugraha – Indonesian Consumer Protection Award (ICPA) 2020 Kategori Platinum.

Raksa Nugraha merupakan kegiatan pemberian pemeringkatan dan anugerah kepada pihak-pihak yang peduli akan perlindungan konsumen.

17) Telah dilakukan inovasi dan pengembangan terhadap aplikasi penunjang layanan publik di lingkungan Sekretariat Utama untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik secara online, diantaranya pengembangan aplikasi e-SKM layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan, aplikasi Sistem Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen (Simpel LPK), pengembangan Aplikasi Website BPOM, penyempurnaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT), pengembangan Subsite Reformasi Birokrasi (RB), pengembangan Aplikasi Dashboard Ruang Kendali Terintegrasi, pembangunan sistem aplikasi pengelolaan informasi pimpinan (Srikandi.pom.go.id), pengembangan Aplikasi SIASN, subsite Sistem Manajemen Mutu (QMS), pengembangan aplikasi JDIH, pengembangan aplikasi e-Performance, pengembangan subsite Sistem Pelayanan Pengujian (digunakan untuk ekternal dan Internal BPOM), update content subsite ECD, pengembangan Aplikasi e-PNBP yang terintegrasi dengan e-payment, penyempurnaan Aplikasi Sistem Antrian Online BPOM, pengembangan sistem aplikasi pengembangan kompetensi BPOM, pengembangan Pembelajaran e-learning melalui SI-PANDAI dan Aplikasi Uji Kompetensi online, pembangunan Knowledge Management System (KMS) di BPOM, pengembangan subsite sistem informasi riset, pengembangan Aplikasi e-Monik (Monitoring Keuangan), pengembangan aplikasi aplikasi e-Planning (Perencanaan), pengembangan Aplikasi SIKD, pengembangan Aplikasi SmartPOM, pengembangan aplikasi SIPANDA (Aplikasi penomoran naskah dinas), pembangunan Sistem Pelayanan PPPOMN Online (SIPOPON sipopon.pom.go.id), pengembangan aplikasi sistem pembelajaran daring SI PANDAI (https://ppsdm.pom.go.id/sipandai), pengembangan Aplikasi kelembagaan, pengembangan aplikasi e-SIPP.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

1) Belum menetapkan Pola Mutasi Internal.
2) Belum terdapat penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan, kebijakan reward dan punishment bagi pelaksana layanan dan kompensasi bagi penerima layanan, dan pelayanan belum dilakukan secara terpadu.

3) Penerapan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pemberi layanan dan pemberian kompensasi bagi penerima layanan belum optimal.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Menetapkan kebijakan pola mutasi internal.
2) Menetapkan kebijakan mengenai mekanisme pemberian sistem *punishment* (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan serta menerapkannya dengan baik.

2. Nilai AKIP Sektama

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Nilai AKIP Sektama	92	81	80,69	99,62	87,71

Realisasi Nilai AKIP Sektama pada tahun 2020 adalah sebesar 80,69 (kategori A) dari target 81, sehingga capaian indikator adalah 99,62% (Baik). Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 92, capaian indikator ini adalah 87,71%. Dengan demikian, diperlukan upaya khusus dan strategi percepatan agar target akhir periode Renstra dapat tercapai.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
   a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
   b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)

2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek: Pemenuhan pengukuran (5%), Kualitas pengukuran (12,5%), Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek: Pemenuhan pelaporan (3%), Kualitas pelaporan (7,5%), Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek: Pemenuhan evaluasi (2%), Kualitas evaluasi (5%), Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek: Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%), Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%), Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

Cara perhitungan Nilai AKIP Sektama berdasarkan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP. **Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:**

1. AA (**Sangat Memuaskan**) dengan nilai >90-100
2. A (**Memuaskan**, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
3. BB (**Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
4. B (**Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
5. CC (**Cukup Memadai**, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
6. C (**Kurang**, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
7. D (**Sangat Kurang**, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

Nilai AKIP Sekretariat Utama tahun 2020 diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	%
1	Perencanaan Kinerja	30	23.80	26.24	110.26
2	Pengukuran Kinerja	25	20.35	19.06	93.67
3	Pelaporan Kinerja	15	12.28	13.21	107.56
4	Evaluasi Internal	10	8.40	8.13	96.84
5	Capaian Kinerja	20	16.21	14.06	86.74
Total		**100.00**	**81.00**	**80.69**	**99.62**

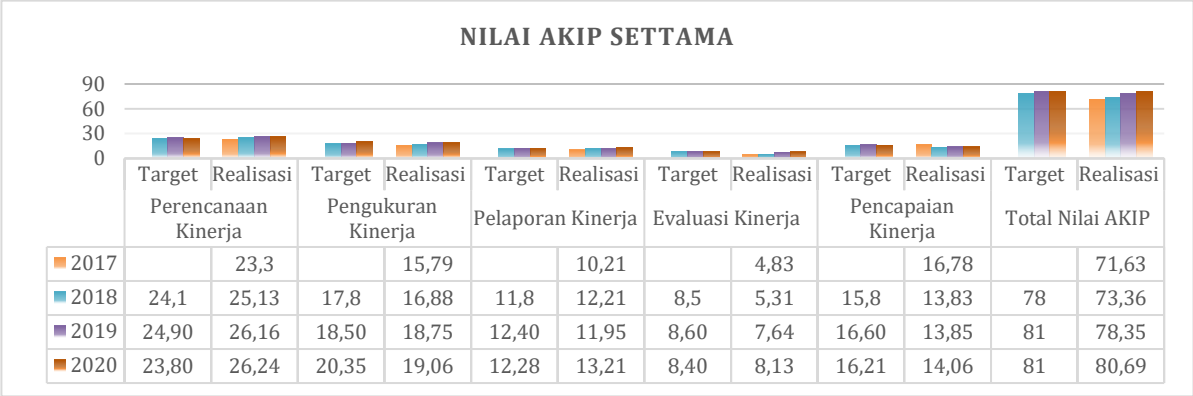

	Perencanaan Kinerja		Pengukuran Kinerja		Pelaporan Kinerja		Evaluasi Kinerja		Pencapaian Kinerja		Total Nilai AKIP	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017		23,3		15,79		10,21		4,83		16,78		71,63
2018	24,1	25,13	17,8	16,88	11,8	12,21	8,5	5,31	15,8	13,83	78	73,36
2019	24,90	26,16	18,50	18,75	12,40	11,95	8,60	7,64	16,60	13,85	81	78,35
2020	23,80	26,24	20,35	19,06	12,28	13,21	8,40	8,13	16,21	14,06	81	80,69

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	81	78,35	96,73	Baik
2020	81	80,69	99,62	Baik

Indikator Nilai AKIP Sektama pada tahun 2020 merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 78,35. Namun demikian, masih diperlukan upaya agar ke depan target kinerja tahunan dapat tercapai.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	Satker	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Settama	81	**80,69**	99,62	Baik
2	Ittama	81	**79,75**	98.46	Baik
3	Kedeputian IV	81	**78, 21**	96.56	Baik
4	Kedeputian II	81	**77.79**	96.04	Baik
5	Kedeputian I	81	**77.18**	95.28	Baik
6	Kedeputian III	81	**76.26**	94.15	Baik

Apabila dibandingan dengan reakisasi nilai AKIP di Eselon I di lingkungan BPOM, maka capaian indikator nilai AKIP Settama mencapai nilai tertinggi.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Mengesahkan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024
2) Penyusunan IKU Sekretariat Utama 2020-2024
3) Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020
4) Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021

5) Bimtek SAKIP dan Monev Online tahun 2020, untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola data menginput aplikasi monev online dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
6) Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2019
7) Mengesahkan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020
8) Mengesahkan Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.2.04.20.132 Tahun 2020.
9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja di lingkup Sekretariat Utama Triwulan I s.d IV Tahun 2020 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
10) Penyusunan Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama dan Biro-Biro Triwulan I s.d IV Tahun 2020
11) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan I s.d III Tahun 2020
12) Pemutahiran data e-PNBP dilakukan setiap bulan melalui Rekonsiliasi data penerimaan
13) Penyusunan RKA-K/L Sekretariat Utama tahun 2021
14) Integrasi Aplikasi Perencanaan, Penganggaran, keuangan, monitoring dan Evaluasi.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

1) Perencanaan: Rencana aksi belum mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K/L) sedangkan penetapan dan pengesahan Renstra 2020 - 2024 baru dilakukan di tahun 2020, selain itu terdapat ketidakselarasan antara indikator pada Renstra dengan Renja K/L sehingga menyebabkan adanya ketidakselarasan antara Renstra dengan RKA;
2) Pengukuran: Hasil pengukuran capaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment. Pengukuran Kinerja juga belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi. Sekretariat Utama belum mengatur tentang mekanisme pengumpulan data yang up to date di internal Satker Sekretariat Utama.

3) Pelaporan: Laporan kinerja belum membandingkan data kinerja yang memadai antara realisasi atau capaian organisasi dibanding realisasi atau capaian organisasi sejenis yang setara atau sekelas. Pemanfaatan atas informasi kinerja belum maksimal digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik.
4) Evaluasi Internal: evaluasi belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja serta rekomendasi terhadap peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
5) Capaian kinerja: Beberapa target kinerja tidak tercapai sehingga capaian kinerja mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Penyusunan dokumen perencanaan agar dilakukan dengan selaras dan Rencana Aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode
2) Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP yang up to date di lingkungan Sekretariat Utama
3) Melakukan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi eperformance Badan POM dan menjabarkan serta menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai
4) Memanfaatkan informasi kinerja dalam perbaikan perencanaan dan melakukan pembandingan data kinerja yang memadai dengan organisasi sejenis yang setara atau sekelas.
5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) untuk mengatasi kendala/hambatan

Sasaran 10	**Terwujudnya SDM Sektama yang berkinerja optimal**
IKU ***Indeks Profesionalitas ASN di Sektama***	

3. Indeks Profesionalitas ASN di Sektama

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Indeks Profesionalitas ASN di Sektama	82	78	77,37	99,19	94,35

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN di Sektama pada tahun 2020 adalah sebesar 77,37 dari target 78, sehingga capaiannya sebesar 99,19% (Baik). Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 82, capaian indikator ini adalah 94,35%.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Sektama. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah)

Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja/Satker	2019			2020		
		Total IP	Jumlah Orang	IP	Total IP	Jumlah Orang	IP
1	Biro Kerjasama	1665.36	24	69.39	1832.5	23	79.67
2	Biro Perencanaan dan keuangan	2987.64	43	69.48	3380	42	80.48
3	Biro Hukum dan Organisasi	2128.6	29	73.40	2417.5	29	83.36
4	Biro Humas dan DSP	1514.92	22	68.86	4641	59	78.66
5	Biro Umum dan SDM	7228.48	98	73.76	6298.5	87	72.40
	Settama	15,525.00	216	71.88	18,569.50	240	77.37

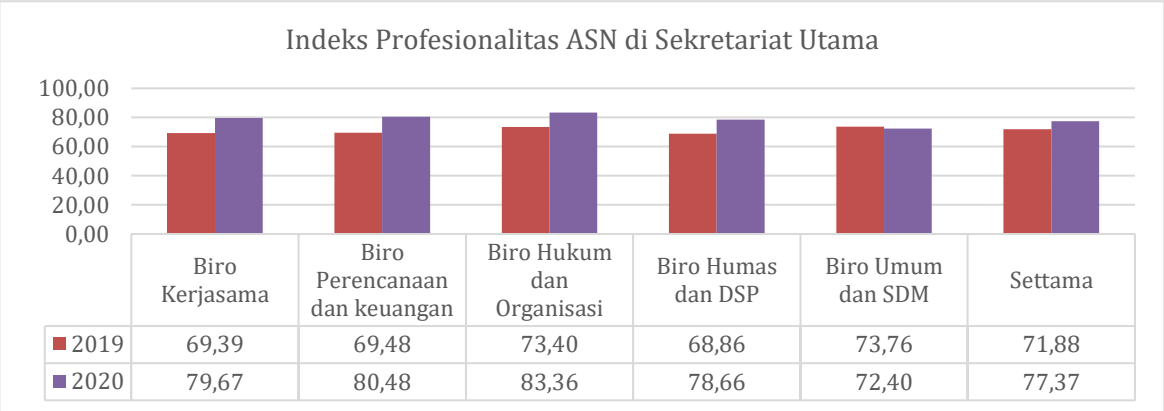

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	71,88	-	-
2020	78	77,37	99,19	Baik

Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Sektama pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Namun apabila dibandingkan dengan baseline data, capaian tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 71,88.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	K/L/Satker	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Kedeputian II	75	85.11	113.48	Sangat Baik
2	Ittama	85	85.3	100.35	Baik
3	Kedeputian IV	75	83.71	111.61	Sangat Baik
4	Kedeputian III	75	83.51	111.35	Sangat Baik
5	Kedeputian I	77	83.4	108.31	Baik
6	Settama	78	77.37	99.19	Baik
7	BPOM	75	82.88	110.51	Sangat Baik

Apabila dibandingan dengan realisasi Indeks Profesionalitas ASN Eselon I lainnya di lingkungan BPOM, maka Settama berada pada peringkat keenam. Sedangkan dibandingkan dengan BPOM, realisasi settama dibawah realisasi BPOM.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

a) Biro Hukum dan Organisasi
   1) Menyelenggarakan Sosialisasi/Bimtek/Penyuluhan bagi pegawai Biro Hukum dan Organisasi baik secara luring maupun daring guna pencapaian peningkatan kompetensi baik ASN maupun Non ASN
   2) Mengikuti Pelatihan/Seminar/Diklat Online dan Offline baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, Instansi lain maupun lembaga pelatihan
   3) Melakukan Riviu Sasaran Kinerja Pegawai setiap triwulannya
   4) Melakukan Riviu Peta Jabatan
   5) Monitoring dan Evaluasi Disiplin pegawai

b) Biro Kerja Sama
   1) Peningkatan kompetensi ASN melalui kegiatan antara lain:
      a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pimpinan untuk Kepala Biro Kerja Sama;
      b. Kursus Bahasa Inggris bagi pegawai;
      c. Diklat Fungsional bagi Analis Kebijakan Biro Kerja Sama;
      d. *Capacity Building* tentang "*Positive Attitude and Communication*" bagi pegawai Biro Kerja Sama;
   2) Pelaksanaan diseminasi hasil pelatihan secara *realtime* melalui *Whatsapp Group* (WAG) Biro Kerja Sama.
   3) *Sharing knowledge* pemberitaan di WAG Biro Kerja Sama.
   4) *English Thursday*.
   5) Workshop kegiatan terpadu "Komunikasi, Negosiasi, dan Diplomasi dalam Percepatan Penanganan COVID-19".
   6) Telah dilakukan penilaian prestasi kerja pegawai periode triwulan I s/d IV.
   7) Telah dilakukan pelaporan disiplin pegawai.

c) Biro Perencanaan dan Keuangan
   1) Menyelenggarakan Sosialisasi untuk Petugas Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pengelola Keuangan
   2) Mengikuti Pelatihan/Seminar/Diklat Online dan Offline baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, Instansi lain maupun lembaga pelatihan
   3) Membuat Laporan Disiplin Pegawai

4) Melakukan Penilaian SKP Per Triwulan

d) Biro Humas dan DSP

1) Peningkatan kompetensi ASN melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan internal maupun eksternal BPOM.
2) Pelaksanaan diseminasi hasil pelatihan yang dikemas dalam kegiatan Sharing Santai secara virtual. Hingga triwulan IV, telah dilaksanakan 3 kali Sharing Santai, yaitu Sharing Santai Volume 1: Pengelolaan Akun Media Sosial Official dengan pemateri dari Bagian Komunikasi dan Publikasi, Volume 2: Mengenal Pengaduan Masyarakat Lebih Dekat dari Bagian Pengaduan Masyarakat, Volume 3: Berbagi Inspirasi Bersama DSP.
3) Hingga Triwulan IV Tahun 2020 telah dilaksanakan 27 kegiatan peningkatan kapasitas dukungan strategis pimpinan yang bersifat manajerial maupun teknis seperti Awareness Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
4) Telah dilakukan penilaian prestasi kerja pegawai periode triwulan III dan IV
5) Telah dilakukan pelaporan disiplin pegawai

e) Biro Umum

1) Kualifikasi (bobot 25%): dilakukan monitoring dan perubahan data kepada pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan formal.
2) Kompetensi (bobot 40%): melakukan keikutsertaan pegawai di lingkungan Biro Umum dan SDM pada kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh PPSDM melalui *virtual meeting*, dan melakukan peningkatan komptensi SDM pengelola SDM/BMN/Sarana Prasarana.
3) Kinerja (bobot 30%): telah dilakukan penilaian prestasi kinerja pegawai triwulan I dan sedang dalam monitoring serta evaluasi penilaian triwulan IV pada bulan Januari 2021.
4) Disiplin (bobot 5%): Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku serta pemeriksaan dan penegakan kasus disiplin pegawai di lingkungan Badan POM.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

1) Dimensi Kualifikasi yang mempengaruhi IP ASN adalah kualifikasi Pendidikan formal ASN di Sektama. Bobot nilai untuk dimensi kualifikasi mulai dari 1 s.d 25. Dari hasil analisis, terdapat beberapa ASN di Sektama yang memiliki Pendidikan SLTA/D-I/D-II, sehingga hal ini dapat memperkecil pencapaian Indeks

Profesionalitas ASN secara keseluruhan di Sektama. Dimensi Kualifikasi ASN di Sektama memperoleh bobot penilaian 15,40 (maksimal bobot penilaian dimensi kualifikasi adalah 25).

2) Dimensi Kompetensi yang mempengaruhi IP ASN adalah riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN di Sektama yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Bobot nilai untuk dimensi kompetensi mulai dari 0 s.d 40. Pelaksanaan diklat pada masing-masing jenis jabatan seperti diklat kepemimpinan utk pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional dan diklat teknis 20 JP bagi seluruh ASN belum sepenuhnya diikuti oleh ASN di Sektama, sehingga memberikan dampak pada pencapaian IPA ASN di Sektama. Dimensi Kompetensi ASN di Sektama memperoleh bobot penilaian 31,85. (maksimal bobot penilaian dimensi kompetensi adalah 40).

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawai
2) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat kepemimpinan/ diklat fungsional/ diklat teknis/seminar/workshop/sejenis secara daring atau luring.
3) Melakukan *coaching and mentoring* berjenjang SDM di lingkungan Sekretariat Utama;
4) Menerapkan *reward and punishment* bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Utama.

Sasaran 11	**Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**
IKU ***Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal***	

4. Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Sektama yang Optimal	3	1,51	0,2	13,25	6,67

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal pada tahun 2020 adalah sebesar 0,2 dari target 1,51, sehingga capaian indikator adalah 13,25% (Sangat Kurang). Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 3, capaian indikator ini adalah 6,67%. Dengan demikian, diperlukan upaya khusus dan strategi percepatan untuk pencapaian target akhir periode Renstra.

Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC
   a) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
   b) Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
   c) BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
   d) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
   e) Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: UPT (SIPT, SPIMKer Data Keracuanan) dan Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal berdasarkan perolehan dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria

yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25 (Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal).

Tabel 6. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama Tahun 2020

Unit Kerja	Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi		Nilai Indeks Data dan Informasi mutakhir	Total Indeks
	email	pemutakhiran BOC	pemutakhiran BOC	
Biro Kerjasama	0	0	0	0
Biro Perencanaan Dan Keuangan	1	0	1	0,75
Biro Hukum Dan Organisasi	0	0	0	0
Biro Umum Dan SDM	0	0	0	0
Biro Humas Dan Dukungan Strategis Pimpinan	1	0	0	0,25
Settama (rata2 indeks)				0,2 (kurang optimal)

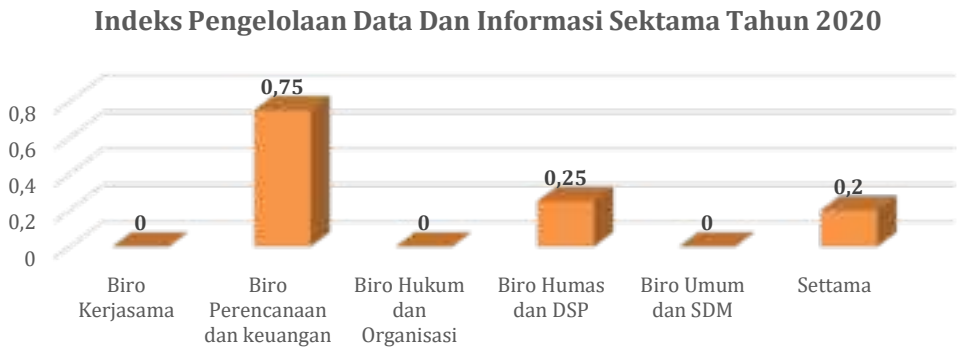

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	Satker	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Kedeputian III	1,51	0,75	49,67	Sangat Kurang
2	Kedeputian IV	1,51	0,33	22,08	Sangat Kurang
3	Kedeputian II	1,50	0,25	16,67	Sangat Kurang
4	Settama	1,51	0,2	13,25	Sangat Kurang
5	Kedeputian I	1,51	0,13	8,28	Sangat Kurang
6	Ittama	1,50	0	0	Sangat Kurang

Apabila dibandingan dengan realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal pada Eselon I lainnya di lingkungan BPOM, maka realisasi Settama berada pada peringkat keempat.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2) Mengotimalkan pemanfaatan email corporate BPOM (email individu dan unit) oleh Pegawai diseluruh unit kerja dilingkungan sektama
3) Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM Operational Center (BOC)
4) Pemutakhiran BPOM Operational Center (BOC), untuk menyajikan data dan informasi berupa:
    a) Dashboard Biro Kerjasama (menampilkan informasi kerja sama, dalam negeri, kerjasama bilateral dan triangular, serta kerja sama regional dan multilateral)
    b) Dashboard distribusi anggaran BPOM (informasi target dan realisasi anggaran badan POM tahun 2020)
    c) Dashboard peta anggaran BPOM (informasi sebaran anggaran BPOM dalam bentuk peta)
    d) Dashboard pengelolaan kepegawaian (Data Pegawai Badan POM di Pusat dan Balai dalam bentuk peta)
    e) Dashboard Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan Nasional
    f) Dashboard Layanan Pengaduan melalui Lapor!SP4N
    g) Dashboard Analisis Sentimen Pemberitaan Obat dan Makanan

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal belum mencapai target tahun 2020 karena masih rendahnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai, email unit dan pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC serta verifikasi/pemutakhiran BOC.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Sosialisasi pengawai untuk menggunakan email pom.go.id.
2) Mendorong semua pegawai untuk menggunakan email corporate BPOM lebih intensif

3) Informasi ke unit pusat, Balai Besar, Balai dan Loka POM serta pihak eksternal terkait email korespodensi menggunakan pom.go.id.
4) Lebih sering login dan mengakses dashboard BCC melalui akun eselon 2 dengan target 20 kali dalam sebulan.
5) Melakukan pemutakhiran data Biro-Biro di Kesettamaan pada aplikasi BCC, dengan melakukan verifikasi data unit yang tayang di BCC, minimal sebulan sekali.

Sasaran 12	Terkelolanya Keuangan Sektama secara Akuntabel
IKU ***1. Nilai Kinerja Anggaran Sektama*** ***2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama***	

5. Nilai Kinerja Anggaran Sektama

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Nilai Kinerja Anggaran Sektama	97	93	91,47	98,35	94,30

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Sektama pada tahun 2020 adalah sebesar 91,47 dari target 93, sehingga capaian indikator adalah 98,35% (Baik). Indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 97, maka capaian indikator ini adalah 94,30%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar target tahun 2021-2024 dapat tercapai.

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran Sektama adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran Sektama = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Pada tahun 2020, Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA dan OM-SPAN per 24 Februari 2021, bahwa Nilai EKA/ SMART Sekretariat Utama adalah 93,94 dan nilai IKPA BPOM adalah 87,76, maka nilai kinerja anggaran sampai dengan triwulan IV

diperoleh angka 91,47 (98,35%). Untuk mendukung akselerasi belanja Tahun 2020, Indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA.

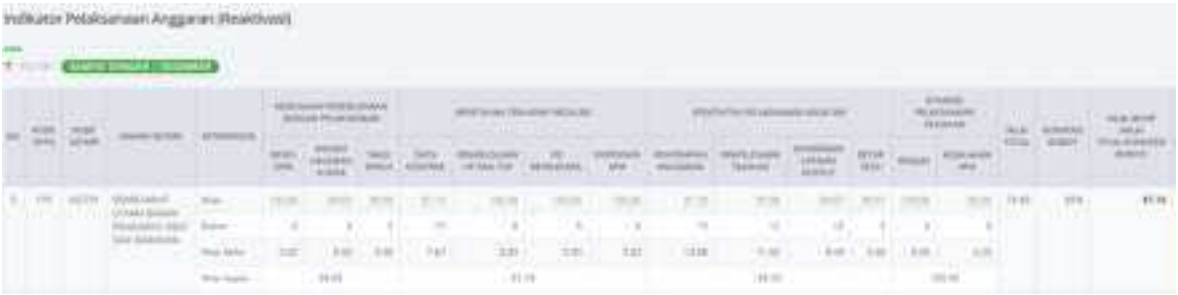

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	88,14	-	-
2020	93	91,47	98,35	Baik

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Sektama pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, maka realisasi tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 88,44.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

No	Satker	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Ittama	93	97.33	104.65	Baik
2	Kedeputian IV	93	96.57	103.84	Baik
3	Kedeputian III	93	96.67	103.94	Baik
4	Kedeputian I	93.20	96.27	103.29	Baik
5	Kedeputian II	93.45	95.68	102.39	Baik
6	Settama	93	91,47	98,35	Baik

Apabila dibandingan dengan realisasi Nilai Kinerja Anggaran Satker Eselon I lainnya di lingkungan BPOM, maka realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Sektama berada pada peringkat keenam.

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Sosialisasi dan Bimtek Monev Online (termasuk monev SMART DJA)
2) Sosialisasi reformulasi Sosialisasi Reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
3) Sosialisasi dan Bimtek Pengisian Capaian Output pada Aplikasi SAS dan SMART DJA
4) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro di Sekretariat Utama triwulan I s.d IV tahun 2020 pada SMART DJA
5) Penyusunan buku evaluasi pelaksanaan anggaran 2019, Triwulan I s.d III Tahun 2020, termasuk didalamnya Satker Sekretariat Utama.
6) Penerapan *reward* dan *punishment* terhadap satker yang memperoleh Nilai Kinerja Anggaran tertinggi.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

1) Pada aplikasi monev DJA, kepatuhan pelaporan capaian kinerja dari Biro-Biro masih rendah, Biro-biro tidak merevisi RPD halaman 3 DIPA. Selain itu serapan anggaran rendah karena salah satunya 11,09% belanja pegawai seluruh satker di Settama dan Kedeputian, sehingga menyebabkan nilai kinerja/SMART belum maksimal.
2) Pada aplikasi OMSPAN masih terdapat nilai yang belum mencapai 100% yaitu pada data kontrak, kesalahan SPM, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, dan capaian output.

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan dengan realisasi anggaran.
2) Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya.
3) Entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.
4) Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap seluruh indikator pada IKPA.

6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama

a. Perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target 2020 dan target 2024

Indikator	Target 2024	Target 2020	Realisasi 2020	% C thd 2020	% C thd 2024
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	100	100	75	75	75

Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama pada tahun 2020 adalah sebesar 75% dari target 100%, sehingga capaian indikator adalah 75% (Cukup). Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena terdapat sasaran program yang persentase capaian inputnya lebih besar dibandingkan persentase capaian output. Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 100, capaian indikator ini adalah 75%. Target indikator ini sampai dengan akhir periode Renstra adalah 100%, dengan harapan agar tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran adalah 100%.

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

1. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input

$$IE = \frac{\%\ capaian\ output}{\%\ capaian\ input}$$

2. Standar efisiensi (SE) adalah 1
3. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien dengan kriteria **Efisien** apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 dan **Tidak efisien** apabila TE<0 atau TE>1.

Cara perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama adalah berdasarkan range, yaitu **0 - 0,2: 100% (Efisien)**; **0,21 - 0,4: 95% (Efisien)**; **0,41 - 0,6: 92% (Efisien)**; **0,61 - 0,8: 90% (Efisien)**; **0,81 - 1,0: 88% (Efisien)**; 1,01 - 1,2: 86%

(Tidak Efisien); 1,21 - 1,4: 84% (Tidak Efisien); 1,41 - 1,6: 80% (Tidak Efisien); 1,61 - 1,8: 78% (Tidak Efisien); > 1,81dan <0: 75% (Tidak Efisien)

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2019	-	100	-	-
2020	100	75	75	Cukup

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama pada tahun 2020 bukan merupakan indikator lanjutan tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2019 diperoleh TE 0,08 dengan kategori efisien (100%). Dengan demikian, terjadi penurunan tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

c. Perbandingan realisasi kinerja BPOM tahun 2020 dengan target kinerja K/L lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tidak ada

d. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 yang menunjang pencapaian indikator

1) Melakukan refocusing/realokasi anggaran yang diperkirakan tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun menjadi kegiatan lain yang berdaya ungkit, antara lain untuk penanganan pandemik Covid-19, peningkatan kompetensi pegawai, KIE melalui media (TV, radio, sarana transportasi), pengembangan aplikasi/system penunjang kinerja, seminar/workshop secara daring, belanja modal (untuk percepatan pengadaan tahun 2021), layanan TIK (langganan *zoom meeting*, biaya penggantian pulsa telepon dan paket internet untuk WFH) dll.
2) Percepatan pelaksanaan kegiatan KIE dengan pola baru dan melakukan realokasi anggaran untuk tambahan KIE dengan pola lama.
3) Mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.
4) Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan oleh pegawai di masa pandemi sehingga target kinerja tetap tercapai.
5) Mengoptimalkan realisasi belanja jasa profesi untuk pertemuan-pertemuan virtual.
6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian kinerja

1) Rendahnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai, email unit dan pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC serta verifikasi/pemutakhiran BOC sehingga

mempengaruhi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik

2) Rendahnya nilai RB di masing-masing Biro menyebabkan Indeks RB Sekretariat Utama tidak tercapai maksimal

f. Upaya/ rencana tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2021

1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja secara berkala.
2) Percepatan pencairan anggaran

II. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI INSPEKTORAT UTAMA ATAS HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2019

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang up to date, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Berdasarkan surat Plt. Settama Nomor B-PI.04.2.21.09.20.567 tanggal 21 September 2020 perihal Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Lingkup Sekretariat Utama telah dijelaskan bahwa : a. pengumpulan data kinerja lingkup Sekretariat Utama mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.04.20.132 Tahun 2020 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Badan POM (selanjutnya disebut Pedoman Monev) dan dilakukan secara berkala (bulanan dan triwulanan) dengan batas waktu yang telah ditetapkan. b. Penanggung Jawab Data pada masing-masing Biro yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Progran dan Kegiatan Badan POM, bertanggung jawab menjamin validitas dan kesahihan sumber data kinerja dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan Pedoman Monev. c. Apabila terjadi kesalahan data, Penanggung Jawab Data menyampaikan perbaikan data kepada Biro Perencanaan dan Keuangan u.p. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja melalui surat yang ditandatangani Kepala Biro dan disertai dengan justifikasi/alasan perubahan data tersebut dan Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi terhadap

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		usulan perubahan data kinerja unit kerja dan memberikan tanggapan terhadap usulan perubahan tersebut. Tanggapan dapat diberikan baik secara langsung maupun tertulis.
2	Rencana Aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.	a. Telah dilakukan mapping anggaran per sub komponen yang mendukung per indikator dan per sasaran strategis baik versi renja dan versi renstra pada awal tahun. b. Mapping anggaran per sub komponen pada pagu APBNP yang mendukung per indikator dan per sasaran strategis telah dientri pada aplikasi e-performance BPOM serta diupdate realiasasi anggaran setiap triwulan.
3	Menyempurnakan penyajian informasi perihal pengukuran kinerja, utamanya dengan memberi penekanan pada mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur.	mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja melalui: a. surat Plt. Settama Nomor B-PI.04.2.21.09.20.567 tanggal 21 September 2020 perihal Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Lingkup Sekretariat Utama b. Surat reminder Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran triwulanan disampaikan setiap triwulan ke unit kerja yang ada di sekretariat utama c. Pertemuan rapat evaluasi internal settama yang membahas pengukuran capaian kinerja dan anggaran serta hambatan dan rencana tindak lanjut dilakukan rutin setiap triwulan. d. Capaian kinerja dan anggaran settama dan Biro-biro dituangkan dalam laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim serta dientri pada aplikasi e-performance BPOM e. saat ini sedang dilakukan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja melalui BOC sehingga lebih sistematis dan dapat telusur
4	Menguatkan komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan	a. Berdasarkan keputusan Settama Nomor HK.02.02.2.21.08.20.29 tahun 2020 telah ditetapkan pembentukan tim evaluasi internal dalam rangka implementasi SAKIP di Lingkungan Settama BPOM. b. Telah dilakukan pertemuan rapat evaluasi internal settama yang membahas pengukuran capaian kinerja dan anggaran serta hambatan dan rencana tindak lanjut setiap triwulan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi	**c.** Capaian kinerja dan anggaran settama dan Biro-biro dituangkan dalam laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim serta dientri pada aplikasi e-performance BPOM
5	Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward dan punishment.	a. Telah dilakukan penyusunan draft keputusan Kepala BPOM tentang mekanisme pemberian reward dan punishment b. Telah ditetapkan Keputusan kepala unit kerja di Sekretariat Utama tentang kebijakan pemberian reward and punishment kepada pegawai di lingkungan unit kerjanya.

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2020 Pemerintah akan melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui penguatan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan social.

Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2020, pada Peraturan Presiden tersebut BPOM mendapatkan pemotongan pagu anggaran sebesar Rp372.318.586.000.-(19,42%). sedangkan pada Satker Sekretariat Utama terdapat pemotongan pagu anggaran sebesar Rp60.871.370.000.-(15,57%) sehingga Pagu anggaran Satker Sekretariat Utama semula Rp391.009.078.000,- berkurang menjadi **Rp330.137.708.000,-.** Pada Bulan Oktober 2020, terdapat pemotongan pagu anggaran pada Satker Sekretariat Utama sebesar Rp1.589.330.000,- dalam rangka KIE dengan tokoh masyarakat, sehingga pagu Satker Sekretariat Utama menjadi Rp328.548.378.000,-. Realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp**284.410.751.968,- (86,57%).** Rincian realisasi per program dan per sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 7. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2020

Program/Sasaran Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	**328.548.378.000**	**284.410.751.968**	**86,57%**
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	10.040.367.970	9.817.310.222	97,78%
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	247.333.180.000	205.670.176.790	83,16%
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	4.317.644.740	4.248.551.710	98,40%
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	38.973.739.000	37.389.788.298	95,94%
5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	1.085.954.000	1.082.402.733	99,67%
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	3.404.360.000	3.374.290.547	99,12%
7. Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	3.818.143.000	3.795.594.511	99,41%
8. Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama	7.297.044.000	7.130.466.125	97,72%
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	5.752.772.350	5.693.996.261	98,98%
10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	1.777.571.000	1.575.033.156	88,61%
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	790.801.200	785.416.004	99,32%
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	3.956.800.740	3.847.725.612	97,24%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program "**Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama**" yaitu sebesar 75,28%, hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang mejalankan fungsi dukungan

manajemen, karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal (*overhead*) dan pemeliharaan).

Terdapat beberapa arahan Kepala Badan POM yang harus menjadi perhatian terkait penyerapan anggaran selama tahun 2020, antara lain:

a. Proyeksi realisasi anggaran harus *over estimate*, minimal 97%.
b. Perlu langkah-langkah strategis/ *breakthrough activities* sehingga target kinerja dan anggaran dapat tercapai.
c. Kendala yang telah diidentifikasi, agar segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi yang tepat.

Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2020 agar realisasi anggaran optimal antara lain:

a. Mereviu kembali *Plan of Action* (PoA) yang telah disusun pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya;
b. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya;
c. Menyusun perencanaan tidak hanya *bussiness as usual*, namun perlu *breakthrough* untuk percepatan realisasi anggaran sehingga *output* dan *outcome* dapat tercapai dengan keterbatasan sumber daya.
d. segera menindaklanjuti *Pending issue* yang ada
e. Melakukan refocusing/realokasi anggaran yang diperkirakan tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun menjadi kegiatan lain yang berdaya ungkit, antara lain untuk penanganan pandemik Covid-19, peningkatan kompetensi pegawai, KIE melalui media (TV, radio, sarana transportasi), pengembangan aplikasi/system penunjang kinerja, seminar/workshop secara daring, belanja modal (untuk percepatan pengadaan tahun 2021), layanan TIK (langganan zoom meeting, biaya penggantian pulsa telepon dan paket internet untuk WFH) dll.
f. Melakukan monitoring berkala secara lebih ketat atas pencapaian kinerja dan realisasi anggaran kegiatan sesuai sasaran dalam Perjanjian Kinerja;
g. Percepatan pelaksanaan kegiatan KIE dengan pola baru dan melakukan realokasi anggaran untuk tambahan KIE dengan pola lama.
h. Mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.

i. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan oleh pegawai di masa pandemi sehingga target kinerja tetap tercapai.
j. Mengoptimalkan realisasi belanja jasa profesi untuk pertemuan-pertemuan virtual.
k. Proyeksi realisasi anggaran sampai akhir tahun beserta rencana aksi.

Langkah-langkah strategis untuk perbaikan pelaksanaan anggaran tahun 2021 antara lain:

a. Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2021 pada awal tahun anggaran dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
b. Meningkatkan kualitas belanja (*value for money*) berupa pembatasan belanja operasional yang urgensinya rendah.
c. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ).
d. Melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan cara:
    i. Memastikan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia. Apabila terjadi pagu minus maupun terdapat potensi terjadinya pagu minus pada saat akan dilakukan pembayaran, segera melakukan revisi anggaran.
    ii. Mengisi capaian output guna memastikan kesesuaian output yang direncanakan dengan realisasi belanjanya.
e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
    i. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
    ii. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
f. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi:
    i. Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional dengan mengoptimalkan pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat revolving UP. Tambahan Uang Persediaan (TUP) hanya dapat digunakan untuk kegiatan mendesak dan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan
    ii. Memastikan bahwa penyampaian laporan keuangan telah lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan.

    Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

IV. ANALISIS EFISENSI DAN EFEKTIFITAS

A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input.* Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input,* sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian } \textit{Output}}{\%\ \text{Capaian } \textit{Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

$$SE = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian } \textit{Output}}{\%\ \text{Rencana Capaian } \textit{Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efisiensi per sasaran program dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2020

No	SASARAN	OUTPUT	INPUT	IE	TE	Capaian TE	KATEGORI
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	99,09	98,33	1,01	0,008	100 %	Efisien
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	108,00	93,61	1,15	0,15	100 %	Efisien
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	100,00	98,40	1,02	0,02	100 %	Efisien
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	112,26	94,57	1,19	0,19	100 %	Efisien
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	100,00	99,55	1,00	0,00	100 %	Efisien
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	108,80	99,11	1,10	0,10	100 %	Efisien
7	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	111,79	99,41	1,12	0,12	100 %	Efisien
8	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	104,39	97,27	1,07	0,07	100 %	Efisien
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	93,19	98,97	0,94	-0,06	75 %	Tidak Efisien
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	99,19	88,61	1,12	0,12	100 %	Efisien
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	13,25	99,32	0,13	-0,87	75 %	Tidak Efisien
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	98,35	97,59	1,01	0,01	100 %	Efisien
	Jumlah	**95,69**	**97,06**	**0.99**	**-0,01**	**75 %**	**Tidak Efisien**

Berdasarkan perhitungan efisiensi, pada tahun 2020 dari 12 sasaran program di Sekretariat Utama, terdapat 2 sasaran program yang diukur efisiensinya dengan kategori tidak efisien karena sasaran 9 (capaian indikator Indeks RB Sekretariat

sebesar 86,76%), sasaran 11 (Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik sebesar 13,25%).

Capaian output (realisasi kinerja) 95,69% dibandingkan dengan capaian input (realisasi anggaran) 97,06% menunjukkan tidak efisiennya penggunaan anggaran dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0,99 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0,01.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input,* yang hanya berupa dana dan indikator kinerja. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

B. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcomes.* Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.

BAB IV PENUTUP

I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran program Sekretariat Utama tahun 2020 dan perkembangan tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dari 12 (dua belas) sasaran program, terdapat 2 (dua) sasaran program masuk kategori sangat baik, 9 (sembilan) sasaran program masuk kategori baik, dan 1 (satu) sasaran program masuk kategori sangat kurang yaitu Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama.
2. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori sangat kurang, 2 (dua) indikator dengan kategori cukup, 18 (delapan belas) indikator dengan kategori baik, 5 (lima) indikator dengan kategori sangat baik, 1 (satu) indikator dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target tahun 2020 sudah dapat tercapai.
3. 1 (satu) indikator dengan kategori sangat kurang yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik karena masih rendahnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai, email unit dan pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC serta verifikasi/pemutakhiran BOC.
4. 2 (dua) indikator dengan kategori cukup, yaitu :
   a. Indeks RB Sekretariat Utama karena belum menetapkan Pola Mutasi Internal dan Penerapan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pemberi layanan dan pemberian kompensasi bagi penerima layanan belum optimal.
   b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama karena rendahnya capaian Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik dan rendahnya Indeks RB Sekretariat Utama.
5. Dari 18 (delapan belas) indikator dengan kategori baik, terdapat 6 (enam) indikator yang belum mencapai target tahun 2020 yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

a. Capaian Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama dan Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama Capaian 2020 sama dengan capaian pada tahun 2019, karena hasil penilaian Nilai RB tahun 2020 belum keluar dari Kementerian PANRB.
b. Nilai Pengelolaan BMN karena Terdapat tanah yang belum bisa dilakukan sertifikasi, dan barang-barang yang telah lama belum dilakukan pemusnahan.
c. Nilai AKIP Sekretariat Utama karena Rencana aksi belum mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode, Hasil pengukuran capaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment, Laporan kinerja belum membandingkan dengan organisasi sejenis yang setara atau sekelas.
d. Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama karena masih terdapatnya pendidikan formal terakhir yaitu SLTA dan beberapa pegawai belum memenuhi minimal pengembangan kompetensi.
e. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama karena kepatuhan pelaporan capaian kinerja dan dan serapan anggaran masih rendah, tidak merevisi RPD halaman 3 DIPA, sehingga menyebabkan nilai EKA menjadi rendah, serta masih terdapat nilai beberapa indikator yang belum mencapai 100%.

6. Indikator dengan capaian lebih dari 110%, perlu dilakukan review kembali dalam penetapan target ke depan.
7. Dari 12 (dua belas) sasaran program, terdapat 2 (dua) sasaran yang tidak efisien yaitu:
   a. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal karena capaian indikator Indeks RB Sekretariat sebesar 86,76%
   b. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama yaitu Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik sebesar 13,25%

II. SARAN

Dari penjelasan di atas, secara umum sasaran program Sekretariat Utama telah tercapai. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator tersebut tidak tercapai 100% akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Diharapkan semua indikator kinerja Sekretariat Utama dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi RB dan AKIP BPOM dan Sekretariat Utama.

2. Menetapkan Pola Mutasi Internal dan Penerapan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pemberi layanan dan pemberian kompensasi bagi penerima layanan.
3. Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai
4. Melakukan intervensi pengelolaan BMN dan meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara secara digital
5. Agar dapat melakukan pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit secara intensif; pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC sebanyak 20 kali dalam sebulan; dan verifikasi/pemutakhiran BOC minimal 1 kali dalam sebulan.
6. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan dengan realisasi anggaran dan entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.
7. Melakukan pendampingan terhadap satker yang capaian indikator pada IKPA masih rendah.
8. Mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran 1

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	41	43,25	46,39	47,21	47,86
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25	76,73	81,08	81,93	82,8
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	94	95	96	97
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5	83	86	89	92
	Indeks Kepuasan Media	73	73,5	74	74,5	75
	Indeks Opini Publik BPOM	66	67	68	69	70
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,70	3,73	3,75	3,78	3,81
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	80	82	84	86	88
	Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	78	80	82	84	86
	Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	81	83	84	85	87
Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82	83	84	85	86
Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektof	Persentase kerjasama yang efektif	82	84	86	88	90
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	99,6	99,61	99,62	99,63
	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99	99,2	99,4	99,6	99,8
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	88,98	90,76	92,58	94,43	96,32
	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	3,91	4,06	4,21	4,36	4,51
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	85	89	93	94	95
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81	85	90	91	92
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	78	79	80	81	82
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	1,51	2	2,26	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)

Lampiran 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2020

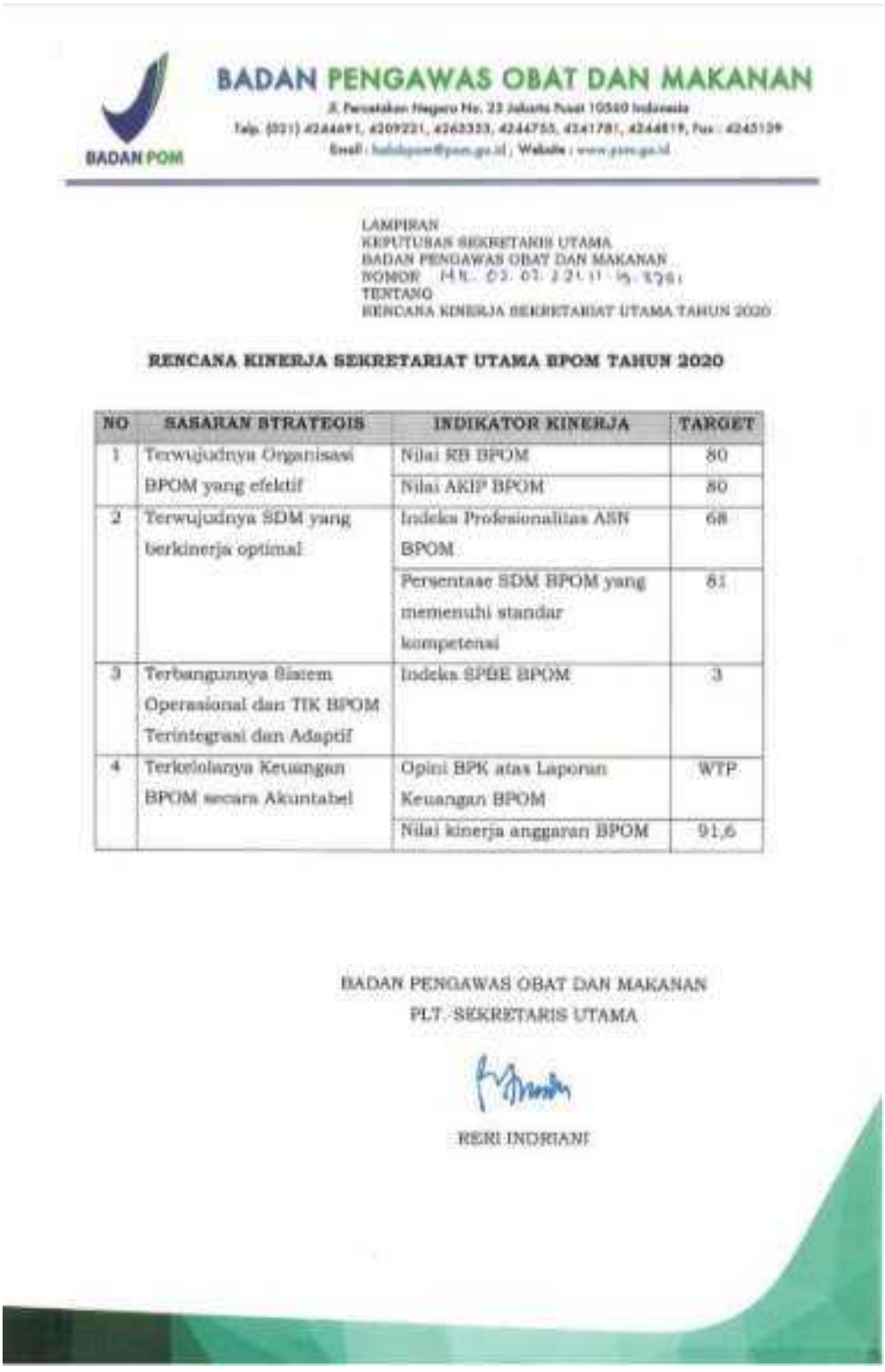

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : [illegible] ; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. 03. 01. 2.21.11-19.5761
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang efektif	Nilai RB BPOM	80
		Nilai AKIP BPOM	80
2	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	68
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	61
3	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK BPOM Terintegrasi dan Adaptif	Indeks SPBE BPOM	3
4	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	91,6

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PLT. SEKRETARIS UTAMA

RERI INDRIANI

Lampiran 3.

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2020

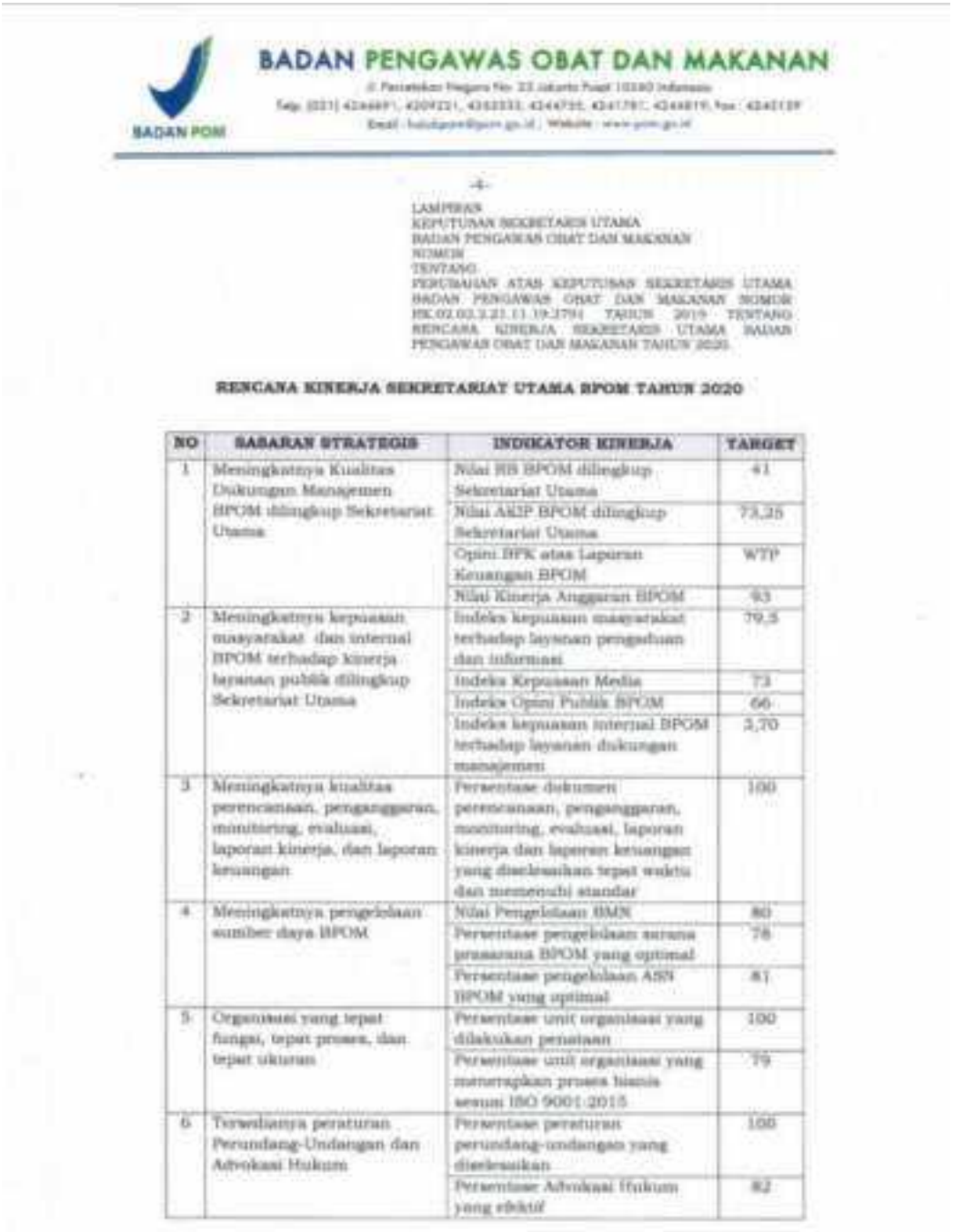

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BADAN POM

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.3.23.11.19.2791 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dilingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	61
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5
		Indeks Kepuasan Media	73
		Indeks Opini Publik BPOM	66
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,70
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	80
		Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	78
		Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	81
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79
6	Terwujudnya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241791, 4244818, Fax : 4243129
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	82
8	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99
		Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	73
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	3,91
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	85
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	81
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	78
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	1,51
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PLT. SEKRETARIS UTAMA

ELIN HERLINA

Lampiran 4

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209231, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : ... / Website : ...

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Reri Indriani Apt. M.Si
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 November 2019

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Reri Indriani Apt. M.Si

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : ... ; Website : ...

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang efektif	Nilai RB BPOM	80
		Nilai AKIP BPOM	80
2	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	68
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	61
3	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK BPOM Terintegrasi dan Adaptif	Indeks SPBE BPOM	3
4	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	91.6

Alokasi Anggaran Tahun 2020 Rp391.009.078.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Program
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

Anggaran
Rp 391.009.078.000,00

Jakarta, 14 November 2019
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Plt. Sekretaris Utama

Dra. Reri Indriani Apt, M.Si

Lampiran 5

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2020

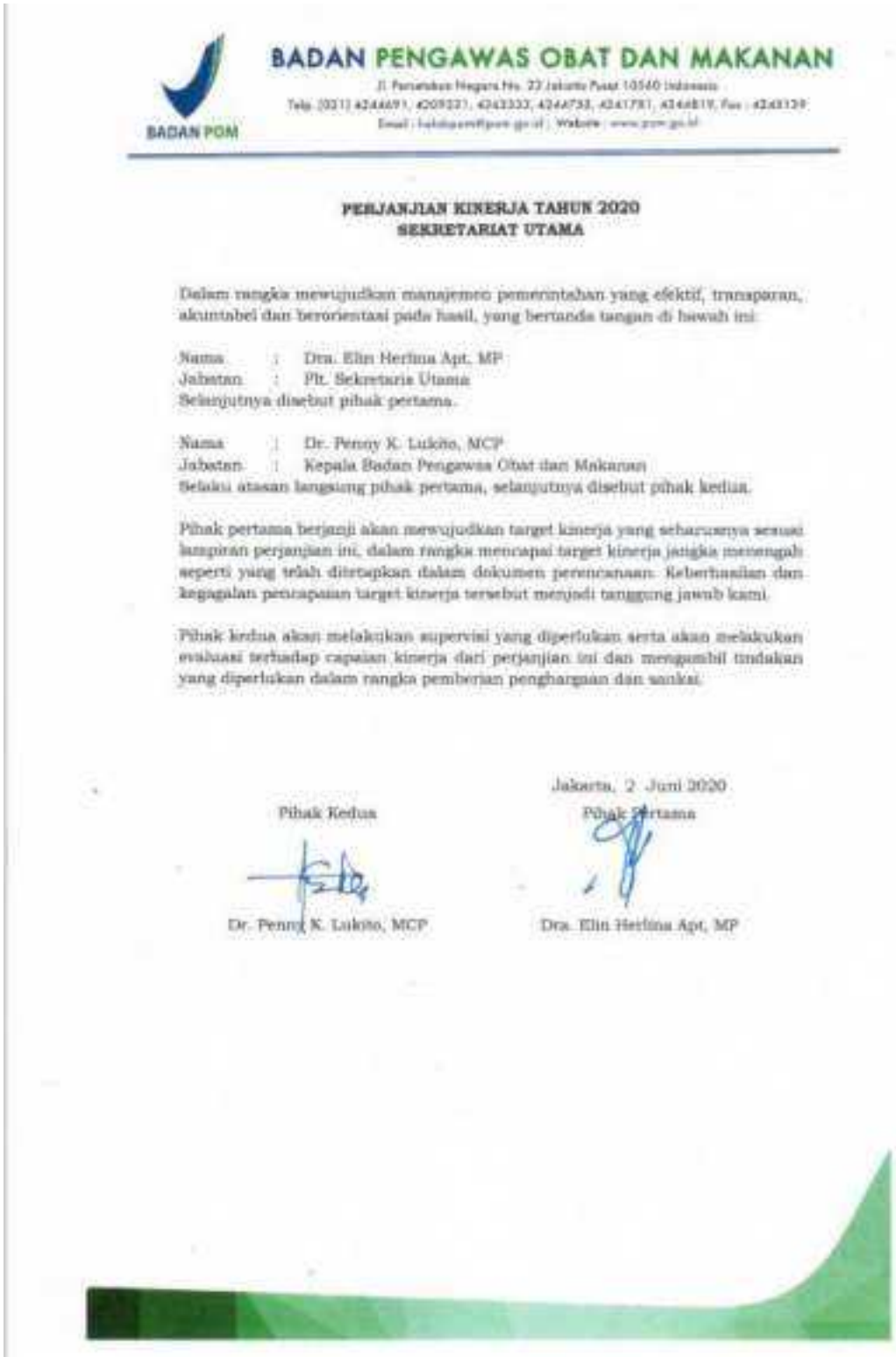

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BADAN POM

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4243333, 4244733, 4241781, 4244819, Fax : 4243139
Email : [illegible] ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Elin Herlina Apt, MP
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Elin Herlina Apt, MP

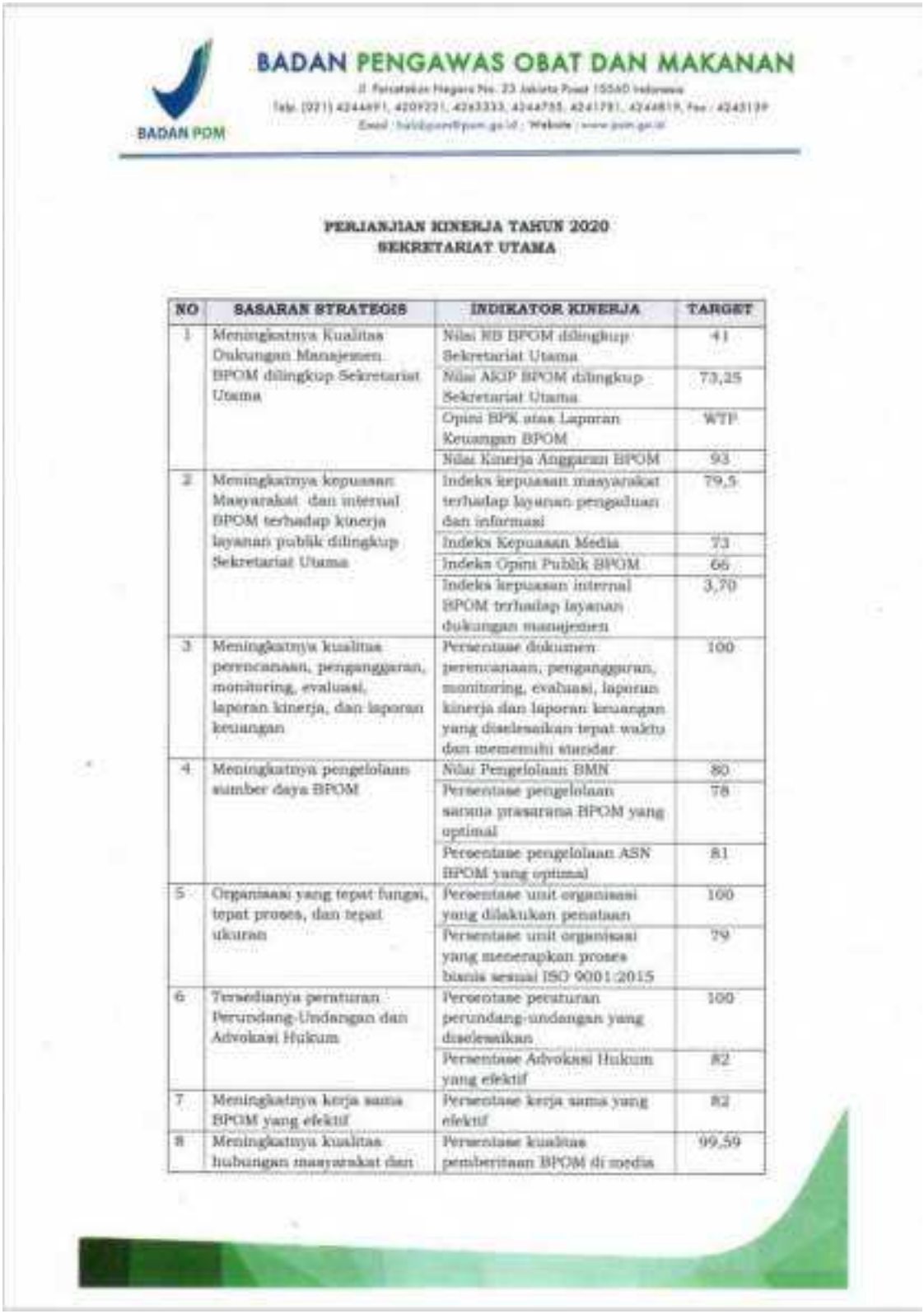

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4243139
Email : hal@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dilingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	41
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5
		Indeks Kepuasan Media	73
		Indeks Opini Publik BPOM	66
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,70
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	80
		Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	78
		Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	81
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82
7	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	82
8	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax. 4245139
Email : ... / Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99
		Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	88,98
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	3,91
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	85
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	81
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	78
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	1,51
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)

Alokasi Anggaran Tahun 2020 Rp330.137.708.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah).

Program
Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp. 330.137.708.000,00

Jakarta, 2 Juni 2020
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Plt. Sekretaris Utama

Dra. Elin Herlina Apt, MP

BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax. 4263139
Email : tatausaha@pom.go.id , Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dilingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	-	-	41	3.929.777.750
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	-	-	-	73,25	2.201.163.310
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	-	WTP	WTP	WTP	819.031.300
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	48	62	55	93	1.217.313.750
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	-	-	-	79,5	64.486.000
		Indeks Kepuasan Media	-	-	-	73	690.145.000
		Indeks Opini Publik BPOM	-	-	-	66	1.335.050.000
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	3,70	3,70	3,70	270.252.811.900
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan	27	59	77	100	5.873.365.700

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244733, 4241781, 4244819, Fax. 4243139

Email : kabalog@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		tepat waktu dan memenuhi standar					
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	-	-	-	80	2.711.660.000
		Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	-	40	40	78	6.315.626.000
		Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	44	63	63	81	6.588.332.000
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	-	-	-	100	625.330.000
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	-	-	-	79	909.080.000
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	28	50	75	100	2.396.485.000
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82	82	82	82	1.279.605.000
7	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	20	40	60	82	4.162.458.000
8	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	99,59	99,59	99,59	2.889.650.000

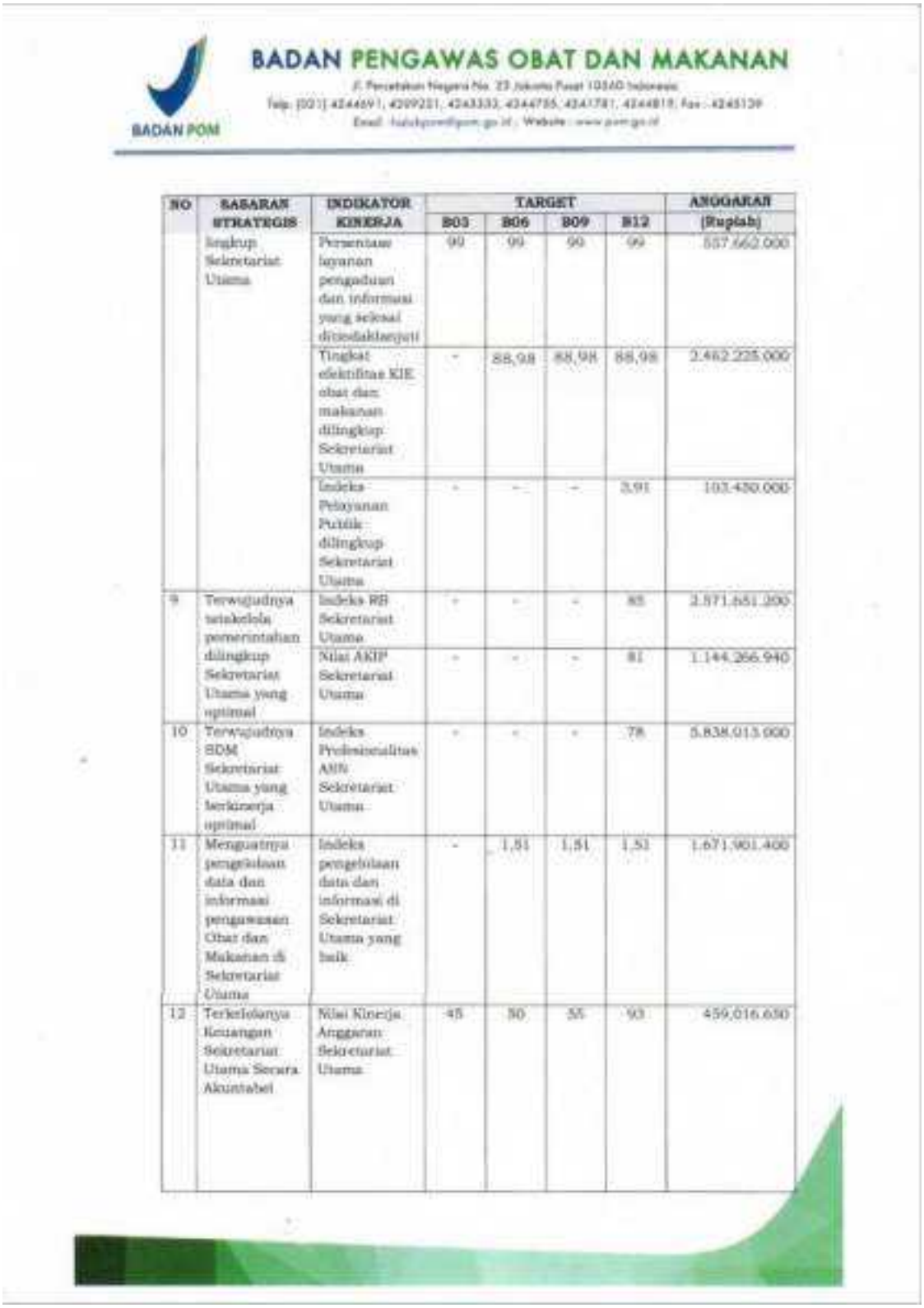

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4243332, 4244755, 4241781, 4244819, Fax. 4245139
Email : hubkpom@pom.go.id , Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	lingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	90	99	90	99	557.662.000
		Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	-	88,98	88,98	88,98	2.462.225.000
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	-	-	-	3,91	103.450.000
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	-	-	-	85	2.571.651.200
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	-	-	81	1.144.266.940
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	-	-	-	78	5.838.013.000
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	-	1,51	1,51	1,51	1.671.901.400
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	45	50	55	93	459.016.650

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021)4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax. 4245124
Email: tatausaha@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	1.068.779.100

Jakarta, 2 Juni 2020
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Plt. Sekretaris Utama

Dra. Elin Herlina Apt, MP

Lampiran 6

PENGUKURAN KINERJA TRIWULANAN SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2020	TARGET				REALISASI												CAPAIAN (Realisasi dan Target 2020(%))
					I03	I06	I09	I012	I03			I06			I09			I012			
									Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	
Stakeholder Perspective																					
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	41	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.25	98.41
		2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73.25	-	-	-	73.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.88	95.40
		3	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	-	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	-	WTP	-	-	WTP	-	-	WTP	100.00
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	45	93	93	93	-	-	36.17	-	-	94.82	-	-	95.17	-	-	95.17	102.34
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79.5	-	-	-	79.5	-	-	-	-	-	85.30	-	-	85.30	-	-	85.30	107.30
		6	Indeks Kepuasan Media	73	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.02	101.40
		7	Indeks Opini Publik BPOM	68	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.60	108.61
		8	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3.7	-	3.7	3.7	3.7	-	-	-	-	-	3.788	-	-	3.788	-	-	3.8	102.70
Internal Process Perspective																					
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	27	59	77	100	0	22	27.27	13	22	59.09	17	22	77.27	22	22	100.00	100.00
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	10	Nilai Pengelolaan BMN	80	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-			79.00	98.75
		11	Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	78	-	40	40	78	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-	-	82.9	119.10
		12	Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	81	44	63	63	81	-	-	45.99	-	-	72.77	-	-	72.77	-	-	96.34	119.93
5	Organisasi yang sepat tumbuh, sepat proses, dan sepat ubah	13	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	104	104	100	100.00
		14	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	105	79	100.00

SASARAN PROGRAM			INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	TARGET				REALISASI												CAPAIAN dibandingkan Target 2020(%)
					B3	B6	B9	B12	B3			B6			B9			B12			
									Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	15	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	25	50	75	100	64	107	59.81	104	191	54.45	185	243	76.15	258	258	100.00	100.00
		16	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	62	62	62	62	62	34	40	85.00	77	94	81.67	171	193	93.44	243	252	96.43	117.66
7	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	17	Persentase kerja sama yang efektif	62	20	40	60	62	-	-	20.24	-	-	41.00	-	-	86.47	-	-	81.67	111.79
8	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	18	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.59	99.59	99.59	99.59	99.59	3564	3576	99.61	10575	10602	99.75	20507	20548	99.80	24011	24067	99.94	100.25
		19	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99	99	99	99	99	4993	5043	99.00	9365	9414	99.48	14771	14852	99.45	19.597	19.691	99.47	100.48
		20	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	89.98	-	89.98	89.98	89.98	-	-	-	-	-	93.43	-	-	89.84	-	-	91.00	102.27
		21	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Setrama	3.91	-	-	-	3.91	-	-	-	-	-	-	-	-	4.48	-	-	4.48	114.58
Learning and Growth Perspective																					
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang	22	Indeks RB Sekretariat Utama	85	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.75	86.76
		23	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.69	99.62
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	78	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.37	99.19
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	25	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	1.51	-	1.51	1.51	1.51	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0.20	13.25
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	26	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93	45	50	85	93	-	-	46.07	-	-	48.28	-	-	93.03	-	-	91.47	98.35
		27	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	100	100	100	100	100	-	-	75.00	-	-	78.00	-	-	100	-	-	75.00	75.00

Keterangan: Capaian Indikator nomor 1 dan 2 merupakan capaian tahun 2019, karena hasil penilaian belum keluar dari KemenPAN-RB.

Lampiran 7

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**						
		1.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	**Input:**				
				Dana	Rp	5.805.451.970	5.709.060.573	98,34
				Output:				
				Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas		4,9	4,86*	99,18
				Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	-	73,25	69,88	95,39
				Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	-	WTP	WTP	100,00
				Nilai Kinerja Anggaran BPOM	-	93	95,37	102,54
		1.2	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	**Input:**				
				Dana	Rp	1.033.625.000	1.014.702.840	98,17
				Output:				
				Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	3.4	3.2*	94.12
				Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	-	4.4	4.32*	98.18
				Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	-	4.2	4.12*	98.10

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
		1.3	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	3.201.291.000	3.093.546.808	96,63
				Output:				
				Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	-	13.22	13,1*	99,09
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**						
		2.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	**Input:**				
				Dana	Rp	200.982.800	199.739.814	99,38
				Ouput:				
				Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Kerja Sama	Indeks	3.82	3,83	100,26
		2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	**Input:**				
				Dana	Rp	167.762.200	165.640.753	98,74
				Output:				
				Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks	3,79	3,79	100
		2.3	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	**Input:**				
				Dana	Rp	7.653.753.000	7.194.472.433	94
				Output:				
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	Indeks	79.5	85.30	107.29
				Indeks Kepuasan Media	Indeks	73	82,5	113
				Indeks Opini Publik BPOM	Indeks	66	79,6	120,60

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
				Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan	Indeks	3.63	3.63	100
		2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	239.310.682.000	198.110.323.789	82,78
				Output:				
				Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Umum dan SDM	Indeks	3,71	3,43	92,45
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, Penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**						
		3.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	**Input:**				
				Dana	Rp	4.317.644.740	4.248.551.710	98,40
				Output:				
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	%	100	100	100
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**						
		4.1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	38.973.739.000	37.389.788.298	95,94
				Output:				
				Nilai Pengelolaan BMN		80	79,00	98,75
				Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	%	78	92,9	119,10
				Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	%	81	96,34	118,93

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**						
		5.1	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	**Input:**				
				Dana	Rp	1.085.954.000	1.082.402.733	99,67
				Output:				
				Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	%	100	100	100,00
				Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	%	79	79	100,00
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**						
		6.1	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	**Input:**				
				Dana	Rp	3.404.360.000	3.374.290.547	99,12
				Ouput:				
				Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	%	100	100	100,00
				Persentase Advokasi Hukum yang efektif	%	82	96,43	117,60
7	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**						
		7.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	**Input:**				
				Dana	Rp	3.818.143.000	3.795.594.511	99,41
				Output:				
				Persentase kerjasama yang efektif	%	82	91,67	111,79
8	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**						
		8.1	Koordinasi Penyusunan	**Input:**				
				Dana	Rp	7.297.044.000	7.130.466.125	97,72

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	lingkup Sekretariat Utama		Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	**Output:**				
				Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	%	99,59	99,84	100,25
				Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	%	99	99,47	100,48
				Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	-	88,98	91,00	102,27
				Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	Indeks	3,91	4,48	114,58
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**						
		9.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	**Input:**				
				Dana	Rp	301.474.200	299.609.722	99,38
				Output:				
				Indeks RB Biro Kerjasama	Indeks	85	68,57	80,67
		9.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	**Input:**				
				Dana	Rp	1.628.576.350	1.608.415.161	98,76
				Output:				
				Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks	85	75,93	89,33
		9.3	Koordinasi Penyusunan	**Input:**				
				Dana	Rp	2.096.595.000	2.087.632.118	99,57

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
			Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	**Output:**				
				Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	Indeks	91	74,04	81,36
		9.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	**Input:**				
				Dana	Rp	351.115.000	348.057.967	99,13
				Output:				
				Indeks RB Biro Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Indeks	85	70.21	82.6
		9.5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	1.652.493.000	1.447.055.780	87,57
				Output:				
				Indeks RB Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Indeks	88	79.99	90.89
10	Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**						
		10.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	**Input:**				
				Dana	Rp	105.090.000	105.065.714	99,98
				Output:				
				Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama	Indeks	75	79,67	106,23
		10.2		**Input:**				

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
			Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Dana	Rp	324.437.000	321.808.000	99,19
				Output:				
				Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks	75	80,48	107,31
		10.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	**Input:**				
				Dana	Rp	13.868.000	13.829.475	99,72
				Output:				
				Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	Indeks	75	83,36	111,15
		10.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	**Input:**				
				Dana	Rp	297.378.000	294.698.567	99,10
				Output:				
				Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Indeks	80	78,66	98,32
		10.5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	1.036.798.000	839.631.400	80,98
				Output:				
				Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Indeks	75	72,4	96,53

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**						
		11.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	**Input:**				
				Dana	Rp	200.000.000	199.550.000	99,78
				Output:				
				Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Kerja Sama	Indeks	1,51	0	0
		11.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	**Input:**				
				Dana	Rp	246.508.000	246.458.000	99,98
				Output:				
				Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks	1,51	0,75	49,67
		11.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	**Input:**				
				Dana	Rp	149.884.000	149.867.000	99,99
				Output:				
				Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	Indeks	1,51	0	0
		11.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	**Input:**				
				Dana	Rp	156.950.000	152.359.363	97,08
				Output:				
				Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan yang baik	Indeks	1,51	0,25	16,56
		11.5		**Input:**				

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
			Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Dana	Rp	37.459.200	37.181.641	99,26
				Output:				
				Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Indeks	1,51	0	0
12	Terkelolanya Keuangan dilingkup Sektama secara Akuntabel	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**						
		12.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	**Input:**				
				Dana	Rp	17.800.000	17.338.000	97,40
				Output:				
				Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama		90	100	111,11
		12.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	**Input:**				
				Dana	Rp	652.343.740	637.786.602	97,77
				Output:				
				Nilai Kinerja Anggaran sekretariat Utama		93	91,47	98,35
				Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan		100	100	100
		12.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	**Input:**				
				Dana	Rp	50.140.000	48.910.000	97,55
				Output:				
				Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi		95	95	100

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
		11.4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	**Input:**				
				Dana	Rp	365.216.000	362.442.457	99,24
				Output:				
				Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan		88	96,63	109,81
		11.5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	**Input:**				
				Dana	Rp	2.871.301.000	2.781.248.553	96,86
				Output:				
				Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Biro Umum dan Sumber Daya Manusia		100		

Lampiran 8

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Program/Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	%
A	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**		**328.548.378.000**	**284.410.751.968**	**86,57**
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	IK1-Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	5.886.375.510	5.703.514.046	96,89
		IK2-Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	2.093.796.090	2.085.543.430	99,61
		IK3-Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	982.021.500	957.886.148	97,54
		IK4-Nilai Kinerja Anggaran BPOM	1.078.174.870	1.070.366.597	99,28
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	IK5-Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	74.951.000	73.021.032	97,43
		IK6-Indeks Kepuasan Media	727.460.000	726.328.405	99,84
		IK7-Indeks Opini Publik BPOM	941.318.000	885.882.158	94,11
		IK8-Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	245.589.451.000	203.984.945.195	83,06
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, Penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan	IK9-Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	4.317.644.740	4.248.551.710	98,40
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	IK10-Nilai Pengelolaan BMN	1.345.841.000	1.207.337.714	89,71
		IK11-Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	35.999.382.000	34.587.527.572	96,08
		IK12-Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	1.628.516.000	1.594.923.012	97,94

No	Program/Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi	%
5	Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	IK13-Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	387.754.000	384.294.733	99,11
		IK14-Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	698.200.000	698.108.000	99,99
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	IK15-Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	2.124.755.000	2.106.308.266	99,13
		IK16-Persentase Advokasi Hukum yang efektif	1.279.605.000	1.267.982.281	99,09
7	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	IK17-Persentase kerja sama yang efektif	3.818.143.000	3.795.594.511	99,41
8	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama	IK18-Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	2.772.155.000	2.760.009.858	99,56
		IK19-Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	130.480.000	125.747.500	96,37
		IK20-Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	4.327.053.000	4.179.677.767	96,59
		IK21-Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	67.356.000	65.031.000	96,55
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	IK22-Indeks RB Sekretariat Utama	2.776.374.890	2.744.991.584	98,87
		IK23-Nilai AKIP Sekretariat Utama	2.976.397.460	2.949.004.676	99,08
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	IK24-Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	1.777.571.000	1.575.033.156	88,61
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	IK25-Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	790.801.200	785.416.004	99,32
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	IK26-Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	502.874.950	490.763.296	97,59
		IK27-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	3.453.925.790	3.356.962.317	97,19

Lampiran 9

MAPPING ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2020

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				PEMBINAAN TEKNIS DAN AKREDITASI KETATAUSAHAAN BADAN POM	185.700.000	183.237.400	98,67%
				KOORDINASI PERSURATAN DAN KEARSIPAN	20.040.000	20.040.000	100,00%
				PENILAIAN DAN ALIH ARSIP	49.550.000	45.787.400	94,21%
				PEMUTAKHIRAN UNTUK PROAKTIF	257.475.000	253.791.340	98,56%
				PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENGADAAN	969.635.000	940.276.500	96,76%
		IK.2 Nilai AKIP BPOM	2503/Koordinasi Penyusunan Rencana dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	PENYUSUNAN PENGANA STRATEGIS BPOM 2020-2024	1.047.696.000	1.045.222.710	99,76%
				PERTEMUAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN	154.033.200	153.572.260	99,96%
				KOORDINASI PERENCANAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	97.125.000	93.046.940	95,80%
				ASISTENSI PENYUSUNAN PERENCANAAN STRATEGIS DAN TAHUNAN BALAI BESAR/BALAI POM	111.968.000	111.946.920	99,98%
				MONITORING DAN SUPERVISI PELAKSANAAN KEGIATAN BALAI BESAR/BALAI POM	160.360.000	160.342.960	99,99%
				MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN REFORMASI BIROKRASI	466.290.880	462.924.954	99,28%
				PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN POM TAHUN 2019	77.676.000	77.587.100	99,89%
		IK.3. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	2503/Koordinasi Penyusunan Rencana dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PUSAT DAN BALAI	67.268.000	66.923.750	99,49%
				PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI BPOM	313.964.000	236.328.200	85,22%
				WORKSHOP LAPORAN KEUANGAN	1.552.000	1.420.000	91,81%
				FGD LAPORAN KEUANGAN BADAN POM	599.248.000	595.259.580	99,66%
		IK.4. Nilai Kinerja Anggaran BPOM	2503/Koordinasi Penyusunan Rencana dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	PENYELARASAN PENGANGGARAN PENJAMINAN BPOM TA 2020	665.243.000	663.662.924	99,80%
				BIMTEK APLIKASI SAKTI	54.763.200	53.537.000	98,43%
				KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN	98.556.220	98.632.512	99,96%
				PERMINTAAN PELAKSANAAN ANGGARAN	39.048.000	37.923.540	97,25%
				EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN	100.226.000	125.461.300	96,39%
				MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN	981.958.400	951.452.200	93,83%
2	552. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretama	IK.5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadaan dan informasi	470 Pengelolaan Hukungan Masyarakat dan Kerjasama Dukungan Strategis Preparan		**247.333.980.000**	**235.678.116.790**	**83,90%**
				Operasional Layanan Pengadaan dan Informasi	73.571.000	71.641.010	97,38%
				Evaluasi Layanan Pengadaan dan Informasi	1.000.000	1.000.000	100,00%
		IK.6. Indeks Kepuasan Media	470 Pengelolaan Hukungan Masyarakat dan Kerjasama Dukungan Strategis Preparan	Pemerintah dengan Media	727.460.000	726.328.400	99,84%
		IK.7. Indeks Opini Publik BPOM	470 Pengelolaan Hukungan Masyarakat dan Kerjasama Dukungan Strategis Preparan	Pengelolaan Isu	941.200.000	885.882.150	94,11%
		IK.8. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	2503 Koordinasi Penyusunan Rencana dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	ASISTENSI PENYUSUNAN PERENCANAAN STRATEGIS DAN TAHUNAN BALAI BESAR/BALAI POM	21.992.000	21.992.000	99,50%
				PEMANTAPAN PENGAWASAN PENGANGGARAN DI BBPOM	55.396.000	55.308.750	99,85%
				KOORDINASI LINTAS SEKTOR PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN	4.760.000	3.680.500	77,09%
				PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PUSAT DAN BALAI	26.907.800	26.769.500	99,49%
				KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAN PELAPORAN	48.796.400	47.916.400	98,20%
			470 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	PENGAMPINGAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SDM	25.000.000	25.480.100	98,71%
				PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	1.393.603.000	1.381.946.540	95,01%
				PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI DAN TUNJANGAN KINERJA BADAN POM	91.505.000	91.271.000	99,74%
				IMPLEMENTASI HEAD MAP ENGAGEMENT PEGAWAI	133.225.000	132.912.000	99,77%
				PENINGKATAN PRUNITAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPOM DALAM RANGKA PENGENDALIAN COVID-19	827.350.000	812.067.870	98,35%
				RAPID TEST KEMAMPUAN KESEHATAN PEGAWAI DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENULARAN COVID-19	1.207.557.000	1.072.229.430	88,79%
				Pengadaan Peralatan Cetak Nametag Pegawai	37.000.000	36.950.000	99,73%
				Pembayaran Gaji dan Tunjangan	99.347.103.000	99.512.553.970	77,77%

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				Tunjangan Kinerja	86.328.537.000	83.540.621.396	96,58%
				PERAWATAN/PENGAWASAN OPERASIONAL BIDANG	3.381.270.000	3.284.462.961	97,71%
				PERAWATAN/PENGAWASAN OPERASIONAL	72.800.000	69.302.172	95,20%
				LAIN-LAINNYA DAN JASA	4.333.767.000	3.956.471.436	91,29%
				PERAWATAN GEDUNG DAN BANGUNAN	12.770.876.000	10.310.625.996	80,73%
				CLEANING SERVICE	4.634.420.000	4.256.835.227	91,86%
				JASA KEAMANAN DAN PENGAMANAN	5.007.830.000	4.747.764.286	94,81%
				PEMELIHARAAN ALAT PENGOLAH DATA/PERLENGKAPAN ELEKTRONIK/TEKNOLOGI	400.000.000	359.904.900	89,98%
				PENGADAAN/PENGGANTIAN UT/MUBAI	364.000.000	330.610.000	84,98%
				HONOR PANITIA/PENGELOLA KEGIATAN/BPOM	23.428.987.000	22.652.246.433	96,69%
				JASA FOTOCOPI/SERTIFIKAT	1.143.530.000	1.025.174.616	89,66%
				SEWA KOTAK PERSPEKTIF	3.600.000	2.340.000	64,00%
				PENGELOLAAN HONOR PANITIA/BIAYA TIDAK PENGELOLA KEGIATAN SEKTAMA	4.371.712.000	4.131.868.911	94,55%
				PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN	585.392.000	585.392.000	100,00%
				SEWA PERLENGKAPAN ACARA BPOM	600.000.000	547.396.400	91,23%
			3769 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Operasional Biro Kerja Sama	200.962.000	199.739.654	99,39%
			477 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Pengelolaan Media Sosial	674.334.000	665.756.900	98,84%
				Representasi/Pelayanan Pimpinan dan Pimpinan	1.464.846.000	1.441.150.964	98,38%
				Koordinasi Kepositifan dan Kesekretariatan Pimpinan	656.430.000	636.150.050	96,91%
				Rapat Koordinasi Pimpinan/Khusus/Sial	345.600.000	345.506.500	99,59%
				Koordinasi Linsar Sektor Pimpinan Dalam dan Luar Negeri	1.745.200.000	1.364.056.075	78,16%
				Koordinasi Substansi Kegiatan Strategis	68.292.000	67.618.157	99,24%
				Analisis Kebijakan Strategis	449.310.000	447.422.550	99,62%
				Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Pimpinan	448.035.000	441.921.340	98,64%
1	5553 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	IKS Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan secara valid dan memenuhi standar			**6.312.044.740**	**6.240.503.798**	**98,48%**
			3769 Koordinasi Penyusunan Rencana dan Renstra Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	PERTEMUAN PENYUSUNAN PENELAAHAN TAHUNAN	256.722.000	254.921.750	99,30%
				WORKSHOP PENGANGGARAN KEGIATAN PENGADUTU/SIAT DAN UPT BPOM	35.000.000	34.802.000	99,43%
				SOSIALISASI/BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL PAGU ANGGARAN	305.023.000	301.495.400	98,84%
				SOSIALISASI/BIMTEK PENYUSUNAN RKAKL ALOKASI ANGGARAN	48.823.240	48.583.300	99,51%
				PENYIAPAN BAHAN DAN PENGAWALAN RDP DENGAN KEPALA KEDJA BADAN POM	85.091.000	85.091.000	100,00%
				KOORDINASI PENGANGGARAN DENGAN UNTAT/REKTOR	94.036.000	92.981.000	98,88%
				Review Pagu Alokasi Anggaran	94.400.000	94.400.000	100,00%
				PENYUSUNAN SBK	9.000.000	9.000.000	100,00%
				PENYUSUNAN JUKLAK DAN JUKNIS	219.870.000	219.230.500	99,71%
				PERTEMUAN REKONSILIASI HASIL PENGANGGARAN DENGAN STAKEHOLDER	140.685.000	139.222.500	99,04%
				SOSIALISASI SBK TA 2021	48.783.000	48.780.000	99,99%
				FGD KEGIATAN PRIORITAS ESELON I	101.060.000	92.920.000	99,67%
				PEMANTAPAN/MEKANISME PENGANGGARAN DI BPOM	59.398.000	59.388.798	99,99%
				PENGEMBANGAN SBK	30.726.000	30.676.500	99,84%
				SUPERVISI PENGANGGARAN BERSAMA INSTANSI TERKAIT	98.752.000	95.615.457	96,46%
				MONITORING DAK BPOM	254.842.000	231.802.000	90,96%
				PENGELOLAAN PNBP FUNGSIONAL DAN PENGUSULAN APORAN PNBP FUNGSIONAL	459.677.000	448.783.500	97,63%
				PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	332.442.500	312.310.254	95,02%
				RAPAT EVALUASI NASIONAL TAHUN 2020	910.116.000	909.091.965	99,43%
				PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN BADAN POM TAHUN 2020	98.427.000	98.421.900	100,00%
				SIMTEK GAKP DAN PKBN (y ONLINE	539.590.000	539.535.443	99,99%

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
4	SSK: Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	IK 9. Nilai Pengelolaan BMN	4112 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	PENGHAPUSAN BMN	53.410.000	53.335.040	70,28%
				FOCUS GROUP DISCUSSION KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG	335.240.000	163.725.600	42,58%
				PEMUTAKHIRAN DATA DALAM RANGKA PENGUSULAN LAPORAN BMN	1.037.071.000	542.768.440	90,99%
		IKTI. Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	4112 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN VIRUS COVID-19 DI	1.245.180.000	1.062.261.360	85,31%
				PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA	5.472.577.000	5.167.758.140	94,42%
				PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA PRASARANA PENUNJANG	1.000.000.000	1.000.000.000	99,91%
				PENGADAAN PEMBANGKIT LISTRIK	614.333.000	611.514.710	99,54%
				VERTICAL GARDEN	135.000.000	134.540.000	99,66%
				PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS KANTOR BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	4.000.000	4.000.000	100,00%
				PEMBUATAN WEED PROTOCOL KESEHATAN	62.250.000	61.245.000	98,32%
				PENGADAAN KABEL FEEDER UTAMA GEDUNG D	485.080.000	484.940.000	99,99%
				PENGADAAN MEUBELAIR BIRO HOSP	96.250.000	96.250.000	100,00%
				PENGADAAN SINYSORLIP TIM PORH DALAM RANGKA PENANGANAN COVID 19	94.080.000	93.480.000	99,68%
				PENGADAAN RITEHOR GEDUNG B	100.000.000	99.517.000	99,52%
				PENGADAAN MESIN POMPA SAMPIT DAN	42.350.000	42.370.000	99,94%
				PENGADAAN PENJUANG UKPBJ	2.080.000	1.940.209	87,31%
				PENGADAAN ALAT PENDUKUNG GUNNING SERVICE	99.400.000	99.130.000	99,92%
				PENGADAAN NETWORK ACCESS STORAGE	104.000.000	103.900.000	99,94%
				PENGADAAN PENJUANG KINERJA GAGAN Pos	60.000.000	59.455.000	99,09%
				PENGADAAN AKUARIUM	121.000.000	108.900.000	90,00%
				PENGADAAN PEKERJAAN PERKUNGAN GENSET DAN STRUK TUR RUMAH GENSET	85.125.000	85.125.000	100,00%
				PENGADAAN GENSET	155.524.000	155.064.523	99,57%
				PENGADAAN MEUBELAIR	2.294.875.000	2.270.926.699	92,43%
				PENGADAAN FAK AROMP	465.000.000	463.460.000	99,66%
				PENGADAAN LAMTER GP RPORT BARAT	193.762.000	107.000.000	54,98%
				RENOVASI GEDUNG KANTOR	4.949.000.000	4.949.342.904	100,00%
				PENGADAAN FURNITURE DAN INTERIOR GEDUNG D	100.000.000	98.804.000	98,80%
				LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG D	11.771.000.000	11.495.075.500	97,50%
				PENGADAAN ATS GENSET GEDUNG LABORATORIUM PUBLIK	180.000.000	178.614.910	99,23%
				PENGADAAN UMBULAN HIDROLIK	200.000.000	199.980.000	99,99%
				PENANGANAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DILINGKUNGAN BADAN POM	574.578.000	563.088.503	98,00%
				PENGADAAN PEMBUNAN SARANA ACARA	94.000.000	94.000.000	100,00%
				INVENTARISASI BMN	188.175.000	101.630.460	54,00%
				COACHING CLINIC SUPERVISI PENGELOLAAN SARANA PRASARANA DAN BMN	73.945.000	66.690.000	90,19%
				TATA KELOLA SARANA DAN PRASARANA BADAN POM	230.625.000	142.599.370	66,63%
				PEMUTAKHIRAN RENCANA KEBUTUHAN BMN	171.000.000	156.764.000	91,68%
				PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG TUGAS DAMKAR PANDEMI COVID-19	462.375.000	413.460.045	89,42%
				INTENSIFIKASI DAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA	1.041.401.000	1.020.470.000	97,99%
				SEWA BANGUNAN KANTOR PERWAKILAN	1.900.000.000	1.844.750.000	97,09%
				PEMELIHARAAN HYGIENE DAN SANITASI RUANGAN	320.000.000	215.998.225	68,25%
				SEWA MESIN FOTO COPY	596.000.000	590.019.000	99,00%
				PENGADAAN PAKAIAN	750.363.000	604.680.000	85,92%
				PEMELIHARAAN JARINGAN	350.000.000	275.623.305	78,89%
				Sewa Digital Internet (E-mail)	50.000.000	46.750.000	97,50%
		IK 12. Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	4112 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	PEMBINAAN TEKNIS DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEGAWAI	225.736.000	224.843.900	99,60%
				PENYELENGGARAAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	33.590.000	32.587.500	97,01%
				PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL	733.376.000	708.526.040	96,54%
				PENEMPATAN JABATAN FUNGSIONAL	150.150.000	147.934.350	98,52%
				PENGANGKATAN DALAM JABATAN	66.200.000	66.099.715	99,85%
				PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN	165.430.000	163.470.900	98,82%

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				PENGELOLAAN KEUANGAN, PANGKAT/PENSIUN PEGAWAI	183.514.000	183.450.304	99,97%
3	035. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	IK.03. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	4116 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana		5.085.954.000	3.882.402.733	33,87%
				PENATAAN ORGANISASI PENGELOLAAN PROGRAM	387.754.000	384.254.733	99,1%
		IK.04. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	4116 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	SERTIFIKASI/PENGEMBANGAN SMM ISO 9001:2015 BPOM	698.200.000	696.106.200	99,7%
3	036. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	IK.05. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	4116 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana		3.404.360.000	3.374.290.547	99,12%
				Kajian Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	188.300.000	188.073.804	99,79%
				Pembahasan Rancangan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	238.995.000	237.924.600	99,47%
				Koordinasi Lintas Sektor Eksternal dan Internal	416.670.000	412.166.520	98,9%
				Finalisasi Draft Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	833.370.000	830.962.637	99,59%
				Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	230.810.000	229.760.465	99,5%
				Penanganalisan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	30.998.000	30.000.000	96,8%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25.463.000	25.057.546	97,7%
				Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Peraturan Perundang-undangan	75.300.000	69.525.000	92,3%
		IK.06. Persentase Advokasi Hukum yang efektif	4116 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Penanganan Perkara/Biaya Penyelesaian Perkara Di Lingkungan BPOM	520.516.000	516.705.691	99,3%
				Koordinasi Internal dan Eksternal	905.340.000	905.307.530	99,9%
				Pembinaan Hukum Tentang Permasalahan Pengawasan Di Bidang Obat dan Makanan Yang Terjadi Di Lingkungan BPOM	164.300.000	162.755.100	99,1%
				Penyuluhan Hukum dan pembelajaran aspek Penindak Hukum di Lingkungan Badan POM	41.440.000	41.254.000	99,6%
7	037. Peningkatan kerja sama BPOM yang efektif	IK.17. Persentase kerjasama yang efektif	1958 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM		6.530.256.000	6.525.604.365	99,47%
				Perumusan Kajian, Posisi dan Perjanjian Kerja Sama Bilateral	365.586.000	363.361.854	99,55%
				Koordinasi Lintas Sektor/Kementerian/Lembaga dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	462.454.000	462.206.501	99,56%
				Workshop/Seminar/Sosialisasi/Su-mu Kerja Sama Bilateral	148.475.000	148.394.616	99,95%
				Perumusan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	237.389.000	237.186.388	99,92%
				Koordinasi dan Pertemuan Implementasi dan Pertemuan Regional di	248.601.000	248.592.430	99,96%
				Workshop/Seminar/Sosialisasi/Su-mu Kerja Sama Regional dan Multilateral	836.383.000	835.593.425	99,91%
				Penyelenggaraan Pertemuan PPOM	9.095.000	9.095.000	100,00%
				Perumusan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	172.650.000	164.902.900	95,72%
				Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	725.167.000	720.847.071	99,36%
				Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi MoU Dalam Negeri	352.283.000	352.235.343	99,94%
				Peningkatan Kapasitas Aula PoliMi	2.570.000	2.570.760	99,98%
				Peningkatan Kerja Sama dengan Negara di Afrika/Negara OKI	478.157.000	478.773.686	99,72%
		IK.02. Persentase liputan pemberitaan BPOM di media	4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Pelliputan Kegiatan BPOM	594.160.000	591.814.342	99,54%
				Workshop Informasi dan Komunikasi	200.695.000	200.475.500	99,89%
				Publikasi BPOM	2.964.000	2.964.000	100,00%
				Publikasi Kinerja BPOM	1.974.376.000	1.962.705.976	99,41%
8	038. Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretama	IK.03. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan		4.524.885.000	4.370.458.261	96,59%
				Koordinasi Layanan Pengaduan dan Informasi	1.172.000	1.172.000	100,00%
				Pengembangan Aplikasi Pemrograng Layanan	934.810.000	931.994.500	96,52%
				Pejabat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1.960.000	7.445.000	96,17%
				Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	16.737.000	15.905.000	95,03%
		IK.20. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan di lingkup Sekretariat Utama	4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	954.220.000	538.548.700	96,78%
				Strategi Advokasi Hal di BPOM bersama Tokoh Masyarakat	870.750.000	874.766.589	99,55%
				KIE Obat dan Makanan melalui Media Nasional	1.085.000	1.083.000	99,82%
				Kampanye Hal di BPOM Bersama Tokoh	2.126.233.000	2.126.410.500	95,07%

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				Pembuatan Konten KIE Media Sosial, Media Cetak, dan Elektronik	435.744.000	321.175.200	73,04%
				Penyusunan Evaluasi dan Kajian KIE BPOM	23.422.000	22.753.000	97,14%
				penegakan-penanganan covid-19	231.000.000	209.141.756	90,53%
		IK.21 Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretama	4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Pengembangan Contact Center HaloBPOM 1500533	67.356.000	65.031.000	96,55%
3	3005 Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretama yang Optimal	IK.22 Nilai RB Sekretama			5.752.772.350	5.611.396.261	98,00%
			3163 Koordinasi Penyusunan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	REVIU GRAND DESIGN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	534.533.000	506.739.870	93,84%
				KAJIAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KUALITAS INDIKATOR KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	301.121.000	264.442.000	90,15%
				KOORDINASI PENYUSUNAN/USULAN/SAHAN DIPA/ANGGARAN	86.322.000	86.219.750	99,88%
				PEMBANGUNAN/PENYUSUNAN DASHBOARD INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (BKN)	159.416.000	141.376.210	94,22%
				MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN REFORMASI BIROKRASI	107.912.000	107.523.000	99,63%
				KOORDINASI SPIP/ PERENCANAAN DAN KEUANGAN DENGAN INTAS /INSTORI	146.163.000	142.746.301	97,66%
				PENATAAN ARSIP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	11.745.000	11.092.500	94,44%
				INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI KINERJA BPOM	191.536.000	191.468.608	99,97%
			4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Pembahasan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	536.165.000	533.489.944	99,50%
			4112 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	IMPLEMENTASI ROAD MAP STRATEGI PENGELOLAAN SDM DAN SIMN	605.696.000	601.424.840	99,29%
			4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Implementasi Reformasi Birokrasi Biro HESP	53.737.000	53.269.400	99,30%
		IK.23 Nilai AKIP Sekretama	3163 Koordinasi Penyusunan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN REFORMASI BIROKRASI	21.584.460	21.526.700	99,68%
				PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2019	6.725.000	6.723.500	99,98%
				PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN TAHUNAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2019	17.460.000	17.447.100	99,94%
			4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	KOORDINASI INTERNAL DAN EKSTERNAL BIDANG HUKUM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	967.472.000	962.132.190	99,45%
				OPERASIONAL PENDUKUNG KEGIATAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	507.238.000	506.200.581	99,80%
				Pemeliharaan Fasilitasi Perkantoran Biro Hukum dan Organisasi	95.800.000	95.800.000	100,00%
			4112 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	RAPAT EVALUASI NASIONAL TAHUN 2020	197.900.000	174.770.653	93,31%
				TATA KELOLA KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN REFORMASI BIROKRASI	711.724.900,00	706.451.172,35	99,26%
			3358 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Operasional Biro Kerja Sama	301.476.200	299.605.722	99,38%
			4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Biro HESP	921.010.000	908.334.399	98,62%
10	3009 Terwujudnya SDM dilingkup Sekretama yang berkinerja optimal	IK.24 Indeks Profesionalitas ASN BPOM			1.777.571.000	1.575.033.756	88,61%
			3163 Koordinasi Penyusunan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	WORKSHOP PELAPORAN ANGGARAN	60.060.000	65.620.000	36,41%
				WORKSHOP DAN BIMTEK/ BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	256.317.000	256.160.000	99,93%
			4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	PEMBINAAN KINERJA ASN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	10.065.000	10.025.475	99,72%
			4112 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	MONITORING DAN EVALUASI PENGAWAS PEGAWAI DALAM RANGKA PENEGAKAN DISIPLIN	15.244.000	14.745.400	96,73%

No	Program/Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
				PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN	52.500.000	51.675.000	98,85%
				PENGENALAN ORGANISASI DAN SEREMONI GUEST DENGAN MELIBATKAN PAGUYUBAN AT	225.536.000	200.000.000	88,69%
				KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN BADAN PEMBINA TINGKAT EKSTERNAL	281.233.000	248.521.000	88,34%
				PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENGELOLA SEMBRENGANAAN PINASANAMA	462.195.000	324.996.000	70,31%
			1958 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	105.080.000	105.080.716	99,99%
			4119 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Koordinasi Lintas Sektor Kehumasan	49.540.000	48.500.000	97,90%
				Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Unit Kegiatan	10.420.000	10.420.000	99,90%
				Knowledge Sharing Forum	31.995.000	31.995.000	97,99%
				Seminar Informasi Publik	9.500.000	9.500.000	100,00%
				Liputan dan Peliputan	93.394.000	93.276.000	99,87%
				Peningkatan Kapasitas Dukungan Strategis Pimpinan	102.500.000	102.006.400	99,48%
11	3308 Penguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IK26. Indeks pengelolaan data dan informasi Sekretama yang optimal			730.001.200	705.436.004	99,32%
			1958 Koordinasi Penyusunan Rencana dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	PEMELIHARAAN BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	65.638.000	65.638.000	100,00%
				PEMELIHARAAN BAGIAN PERENCANAAN	72.620.000	72.620.000	100,00%
				PEMELIHARAAN BAGIAN PENGANGGARAN	83.000.000	83.000.000	100,00%
				PEMELIHARAAN BAGIAN KEUANGAN	29.200.000	29.200.000	99,83%
			4118 Koordinasi Penyusunan Penelaan Perundang-undangan, Advokasi Hukum serta Organisasi dan tata laksana	Pembinaan dan Penyusunan Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi	145.694.000	145.067.000	99,59%
			4112 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	TATA KELOLA KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN REFORMASI BIROKRASI	37.455.200,00	37.181.640,95	99,26%
			1958 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Biro Kerja Sama	200.000.000	199.552.500	99,78%
			4119 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Operasional Kehumasan	102.950.000	102.355.363	97,08%
12	3309 Terlaksanya Keuangan dilingkup Sekretama secara Akuntabel	IK28. Nilai Kinerja Anggaran sekretariat Utama			3.956.000.740	3.847.725.612	97,26%
			1958 Koordinasi Penyusunan Rencana dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	IMPLEMENTASI APLIKASI SAKTI	6.094.800	5.993.000	98,33%
				KOORDINASI PENGUMPULAN BAHAN SEKRETARIAT UTAMA	442.004.000	430.963.546	97,50%
				MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN REFORMASI BIROKRASI	53.566.150	53.816.750	99,53%
		IK27. Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	1958 Koordinasi Penyusunan Rencana dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUNAN	9.000.000	9.221.500	95,33%
				KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN	96.322.350	96.219.791	99,90%
				KOORDINASI ANTAR SEKTOR PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN	4.750.000	3.693.500	77,76%
				KOORDINASI INFO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN DENGAN ANTAR SEKTOR	46.716.400	47.316.450	98,30%
			4119 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi	50.140.000	48.990.000	97,70%
			4112 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	KOORDINASI ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA PENGELOLAAN PRINSIP SARANA DAN PRASARANA	72.000.000	69.660.000	96,68%
				PENYELENGGARAAN PERKANTORAN	1.850.142.000	1.805.455.470	97,73%
				SEWA PEMANFAATAN PENGEMBANGAN KEPALA BADAN DAN PEJABAT ESELON I	1.163.158.000	1.109.983.160	96,50%
			1958 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Biro Kerja Sama	77.900.000	77.350.000	97,40%
			4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Dukungan Kesekretariatan Biro HDSP	385.216.000	382.442.451	99,24%

Lampiran 10

CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	%Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM				**328.548.378.000**	**284.410.751.968**	**86,57**
1	**3158 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM**				4.643.490.000	4.616.897.761	99,43
	3158.001 Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan (dokumen)	65	78	120,00	4.163.302.000	4.138.053.327	99,39
	3158.002 Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)(kawasan)	1	1	100,00	480.188.000	478.844.434	99,72
2	**3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan. Penyusunan Dokumen Anggaran. Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan**				13.142.724.000	12.937.720.800	98,44
	3159.001 Dokumen perencanaan, Penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan (dokumen)	15	15	100,00	13.142.724.000	12.937.720.800	98,44
3	**4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Advokasi Hukum. serta Organisasi dan tata laksana**				7.834.426.000	7.771.634.713	99,20
	4110.001 Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Program Penataan dan Penguatan Organisasi serta Program Penataan Tata Laksana (dokumen)	2	2	100,00	3.893.921.000	3.860.371.017	99,14

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	%Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	4110.002 Layanan Advokasi hukum yang diberikan (Advokasi Hukum)	320	358	111,88	1.279.605.000	1.272.982.281	99,48
	4110.003 Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (rancangan)	220	268	121,82	2.660.900.000	2.638.281.415	99,15
4	**4111** **Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan**				15.981.148.000	15.344.132.653	96,01
	4111.002 Kegiatan kehumasan Badan POM yang dilaksanakan (dokumen)	195	251	128,72	9.973.452.000	9.734.966.883	97,61
	4111.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon (Layanan)	1	1	100,00	6.007.696.000	5.609.165.770	93,37
5	**4112** **Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM**				286.946.590.000	243.740.366.041	84,94
	4112.001 SDM Badan POM yang memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik (pegawai)	4105	4628	112,74	10.984.445.000	10.424.967.490	94,91
	4112.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1	1	100,00	28.749.268.000	27.977.415.752	97,32
	4112.956 Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN) (Layanan)	1	1	100,00	2.964.110.000	2.521.228.739	85,06
	4112.962 Layanan Umum (Layanan)	1	1	100,00	1.967.441.000	1.887.421.851	95,93
	4112.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	100,00	242.281.326.000	200.929.332.209	82,93

Lampiran 11

CAPAIAN RAPK PER ESELON II DI SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1,	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerjasama	3,82	Indeks	3,83	100,26
		Presentase kerja sama yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan	72	%	83,33	115,74
		Jumlah rekomendasi penguatan regulatori yang diterapkan oleh negara penerima KSS Badan POM	1	Rekomendasi	1	100
		Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	81	%	81,4	100,49
		Jumlah dokumen kerja sama Badan POM	65	Dokumen	78	120
		Jumlah negara selatan-selatan penerima program KSS mengenai penguatan fungsi regulatori	1	negara	1	100
		Nilai RB Biro Kerja Sama	85	Nilai	68,57	80,67
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama	75	Indeks	79,67	106,23
		Indeks pengelolaan data dan informasi	1,51		0	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama	90 (Efisien)	Nilai	100	111,11
2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas	4,9	Nilai	4,86*	99,18
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,25	Nilai	69,88*	95,39
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	93	Nilai	91,27	98,14
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	94,24	Nilai	93,76	99,49
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan Standara Akuntansi Pemerintahan	100%	%	100	100
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,79	Indeks	3,79	100
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kinerja satker terhadap pedoman	85	%	87,15	102,53

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase dokumen perencanaan, yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	100
		Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja anggaran minimal 95 berdasarkan mekanisme reward dan punishment berdasarkan mekanisme reward and punishment	20,9	%	20,9	100
		Persentase dokumen penganggaran yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%	%	100%	100
		Persentase unit kerja yang melaporkan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman	57	%	64,2	112,63
		Persentase dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	%	100	100
		Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal Baik	80	%	93	116,25
		Persentase dokumen laporan keuangan satker yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	100
		Persentase laporan PNBP unit kerja yang disampaikan tepat waktu	95	%	98	103,16
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	85	Indeks	75,93	89,33
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	75	Indeks	80,48	107,31
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan	1,51	Indeks	0,75	49,67
		Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100 (Efisien)	Nilai	100	100
3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3,40	Nilai	3.2*	94.12
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,4	Nilai	4.32*	98.18
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,2	Nilai	4.12*	98.10
		Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	3,55	Indeks	3,82	107,61
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	100	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	%	79	100
		Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	%	100	100

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	82	%	96,43	117,60
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	91	Indeks	74,04	81,36
		Indeks Profesionalitas ASN	75	Indeks	83,36	111,15
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	1,51	Indeks	0	0
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	95 (Efisien)	Nilai	95	100
4	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79.5	Indeks	85.30	107.29
		Indeks kepuasan media	73	Indeks	82,5	113
		Indeks opini publik BPOM	66	Indeks	79,6	120,60
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro HDSP	3.63	Indeks	3.63	100
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.59	Indeks	99,84	100,25
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99	%	99.47	100.47
		Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Biro HDSP	88,98	Indeks	91	102,27
		Indeks Pelayanan Publik di lingkup Biro HDSP	3,91	Indeks	4,48	114,57
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan manajemen eselon I	75	Nilai	85.37	113.82
		Indeks RB Biro HDSP	85	Indeks	70.21	82.6
		Indeks Profesionalitas ASN Biro HDSP	80	Indeks	78,66	98,32
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro HDSP yang baik	1.51	Indeks	0,25	16,56
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro HDSP	88 (Efisien)	Nilai	96,63	109,81
5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13,22	Nilai	13,1*	99,09
		Nilai Pengelolaan BMN BPOM	80,00	Nilai	0	Feb 2021
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,71	Indeks	3,43	92,45
		Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	89	%	99,94	112,29

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir	73	%	92,73	127,03
		Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	89	%	0	Feb 2021
		Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar	78	%	97,4	100,76
		Persentase unit kerja yang mampu mengelola arsip dengan baik sesuai standar pengelolaan kearsipan	86	%	85,71	99,66
		Indeks RB Biro Umum dan SDM	88	Indeks	69,03	78,44
		Indeks Profesionalitas SDM Biro Umum dan SDM	75	Indeks	72,4	96,53
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Umum dan SDM yang optimal	1.51	Indeks	0,25	16,56
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Biro Umum dan SDM	100 (Efisien)	Nilai	0	0

Keterangan: *) merupakan capaian tahun 2019, karena hasil penilaian dari KemenPAN-RB belum keluar.

Lampiran 11

CAPAIAN KINERJA BKKBN
TAHUN ANGGARAN 2019

Tabel 4. Formulir Pengukuran Target Kinerja

Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Utama

Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Program/ Bidang		Indikator Kinerja	Tahun 2019	Realisasi	% capaian
1.	Tersedia nya dukungan Manajemen dalam rangka menyelengg arakan Program KKBPK	1	Jumlah Produk Hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB	1	1	100%
		2	Tingkat opini laporan keuangan dari BPK	WTP	WTP	100% (tercapai)
		3	Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penggunggaran terpadu dan berbasis kinerja	4	5	125%
		4	Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai Roadmap)	63% Pengembangan SDM	100%	158,73%
		5	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	4 dari skala 1-4	3,17	79,25%
		6	Jumlah dukungan manajemen pengelolaan Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	34 Prov	34 Prov	100%
2.	Terwujud- nya dukungan manajemen dlm penyelengga raaan KKBPK	1	Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan lainnya	Peraturan perundangan terkait perkembangan program	Tersedia peraturan	100% (tercapai)
			Persentase unit kerja yang melakukan tata kelola keuangan dan BMN yang memenuhi standar kepatuhan	100%	89,3%	89,3%
			Persentase unit kerja BKKBN yang melakukan perencanaan program dan anggaran yang sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan nasional	100%	100%	100%
			Persentase penetaan ASN yang sesuai dengan standar kompetensi	100%	100%	100%
			Persentase pelayanan kerumahtanggaan & protokol, administrasi umum dan pengelolaan sarana prasarana yang sesuai dengan standar	100%	100%	80,5%

Sumber data : https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/LAKIP_SESTAMA_2019.pdf

1500533
HALOBPOM

Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560

021 4244691

halobpom@pom.go.id

www.pom.go.id

@bpom_ri

Bpom RI